# PENGANTAR POLITIK KENEGARAAN



Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D - Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP.
Henry Karya Nugraha, S.Kom

# PENGANTAR POLITIK KENEGARAAN

Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D (cand)
Rinto Setiyawan, A.Md.T - Henry Karya Nugraha, S.Kom

# PENGANTAR POLITIK KENEGARAAN



PenerbitX

Penulis:
**Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D (cand)**
**Rinto Setiyawan, A.Md.T**
**Henry Karya Nugraha, S.Kom**

Penyunting:
**Risma Farah Hamidah**

Penata Letak:
**Risma Farah Hamidah**

Pemeriksa Akhir:
**Azizatul Nur Imamah**

Perancang Kulit:
**Azam Fachri**

Ilustrator:
**Azam Fachri**

QRCBN: **62-7727-7444-356**
Cetakan pertama: **September 2025**

Diterbitkan oleh:
**PT. Penerbit X Indonesia Jaya**
**Muara Sarana Indah C-17, Jetis,**
**Malang - Jawa Timur**

All Rights Reserved.
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# Prolog

Tahun 1779, sebuah perusahaan dagang multinasional terbesar di dunia runtuh. Perusahaan itu adalah de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC lah yang kita sebut-sebut sebagai Kompeni. Penjajah.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa waktu itu, nilai valuasi perusahaan disebut mencapai -setara saat ini- US$ 8,2 triliun. Ada yang menyebut US$ 7,9 triliun. Meskipun Lodewijk Petram menyebut nilai valuasinya hanya US$ 1 milyar. Tapi, itu menunjukkan perusahaan yang sangat besar.

David E. Y. Sarna menulis dalam bukunya *History of Greed: Financial Fraud from Tulip Mania to Bernie Madof* bahwa "pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan swasta terkaya yang pernah ada di dunia, dengan kepemilikan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, 10.000 tentara swasta, dan pembayaran dividen 40% dari investasi awal." Saat itu penduduk Jawa diperkirakan 8 juta jiwa.

Dan 130 tahun kemudian, perusahaan terbesar di dunia yang berbasis di Hindia- Belanda itu, runtuh. Salah satu penyebab keruntuhannya adalah: korupsi dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Meskipun belum ditemukan catatan resmi berapa komposisi karyawan kulit putih dan karyawan lokal, tapi bisa dipastikan jauh lebih banyak karyawan lokal.

Maka, sesungguhnya, kita, bangsa Indonesia, sebuah Republik dengan sejarah panjang feodalisme, perilaku curang, dan koruptif. Indonesia seolah menjadi negara yang sulit melepaskan diri dari sejarah negatif itu. Bagaimana tidak? Setelah hampir 10 windu merdeka, Indonesia masih saja berkutat pada feodalisme birokrasi, perilaku koruptif dan kecurangan yang masih saja marak.

Baik dari pejabat publiknya, hingga masyarakat kecilnya.

Berbagai praktek kecurangan dan perilaku koruptif dapat dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai rakyat kecil. Mulai dari kecurangan timbangan yang tidak presisi, kecurangam yang dilakukan oknum karyawan saat membeli BBM di SPBU sampai parkir gelap.

Di SPBU Prima, yang layanannya "mulai dari nol" dan diakhiri ketika angka sudah menunjukkan angka yang semestinya, tapi masih ada *effort* untuk berbuat korup, yaitu dengan memainkan pelatuk nozzle.

Di halaman ATM atau di tepi jalan, atau di tempat-tempat publik lain yang semestinya menjadi wilayah yang bebas diakses masyarakat, selalu ada oknum tukang parkir yang mengaku "legal" karena sudah membayar setoran kepada "oknum" pemerintah, atau tiket masuk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tidak usah disebutkan perilaku curang, feodal dan koruptif dari oknum-oknum birokrasi negara dan perangkat pemerintahan hingga ke wilayah administrasi paling kecil, desa. Sebab, itu sudah menjadi pengetahuan umum, jamak dan tidak menjadi rahasia lagi.

Kita khawatir perilaku curang, feodal dan koruptif, itu akan dianggap "normal" oleh anak-cucu kita. Sesuatu yang seharusnya "salah" berbalik menjadi "benar", atau paling tidak: "normal". Tidak lagi salah. Betapa mengerikan jika kita menerima kenyataan itu. Sementara, sejak kecil, kita mengajari anak kita hal-hal yang religius dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum tidur, berdoa. Sebelum makan, berdoa. Makan atau minum, sebaiknya dengan duduk. Membudayakan antri. Tapi, disaat yang sama, mereka juga dihadapkan pada kecurangan, feodalisme dan perilaku koruptif di

lingkungannya.

Misalnya, seperti pengakuan seorang Ayah di Malang tentang sekolah anaknya. Oknum guru selalu mengkhotbahkan kejujuran kepada murid-muridnya. Tapi, saat ujian nasional, justru oknum guru itu mengajak semua muridnya melakukan kecurangan.

Maka, cara terbaik untuk menyelamatkan anak-cucu kita dari pembalikan nilai adalah memberikan kehidupan dan lingkungan yang normal kepada mereka. Keadaan yang memang semestinya. Dan untuk menciptakan keadaan yang semestinya itu harus didukung dengan tools yang relevan. Jika tidak, maka bukan perusahaan lagi yang runtuh, bukan pula pemerintah dan negara yang runtuh. Tapi, kemanusiaan kita yang runtuh.

Saat ini, *tools* yang tersedia dan relevan adalah dengan menggunakan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), dan big data. Dengan ketiga *tools* tersebut, ada harapan, ada janji, meskipun bukan jaminan, bahwa kehidupan kita akan menjadi normal. Menemukan apa yang curang, apa yang salah, tetap menjadi "salah". Dan menghadapi kehidupan yang normal dengan level kecurangan, feodalisme, dan perilaku koruptif yang minimal.

***Partai X menawarkan ketiga hal tersebut kepada kita semua, bangsa Indonesia. Bukan sekedar politik untuk kekuasaan. Melainkan politik kemanusiaan, kebangsaan, untuk kehidupan yang semestinya bagi anak cucu kita.***

“Sebagai seorang praktisi dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Sahid dan Universitas Tarumanagara, saya yakin bahwa buku ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi yang ingin belajar lebih dalam mengenai Politik dan Kenegaraan. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi para pembaca karena isi dalam buku ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar kenegaraan khususnya mengenai perbedaan antara negara dan pemerintah serta pentingnya merumuskan sistem pemerintahan yang paling tepat dengan karakteristik Bangsa Indonesia.

Politik, Negara, dan Hukum adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling memiliki keterkaitan yang erat. Hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh politik dan politik membutuhkan hukum yang memberikan kerangka normatif serta prosedur bagi praktik politik. Hukum juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan politik agar tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan konsep *rule of law*. Demikian juga halnya dengan Ilmu Negara memiliki kaitan erat dengan hukum. Ilmu Negara membahas sumber legitimasi kekuasaan seperti konstitusi yang menjadi dasar dari semua peraturan hukum, sehingga hal ini membuat hukum harus berdiri sesuai dengan struktur negara serta prinsip dasar dalam Ilmu Negara. Hukum juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan dari negara.

Buku ini akan menjadi sangat penting mengingat kebutuhan literatur mengenai politik dan negara juga dapat menjadi penunjang di bidang hukum. Dalam hal ini diperlukan panduan teoritis maupun praktis yang dapat membantu para pembaca dalam memahami politik kenegaraan dengan tepat. Buku ini bukan hanya menjadi sumber referensi yang penting tetapi juga memberikan perspektif baru yang tentunya akan memperkaya wacana hukum di Indonesia.

Penulis telah berhasil mendedikasikan penelitian dan kajian berbagai

aspek dalam politik kenegaraan ke dalam buku ini. Konsep-konsep kenegaraan yang semula rumit menjadi mudah dipahami dalam buku ini sehingga buku ini tidak terbatas pada kalangan mahasiswa, dosen, peneliti maupun praktisi, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi upaya serta dedikasi penulis dalam menyusun buku ini. Harapannya buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu politik, negara, maupun hukum dan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi pembaca. Semoga buku ini memicu diskusi yang membangun dan menjadi bahan kajian yang berharga.



**Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., BSC., MBA.**

**Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia**

# DAFTAR ISI


Prakata ix

Pengantar xi

BAB 1 - Negara 1

BAB 2 - Pemerintahan 17

BAB 3 - Praktek Politik di Berbagai Negara 41

BAB 4 - Sistem Ekonomi 83

BAB 5 - Demokrasi 103

BAB 6 - Partai Politik dan Civil Society 123

BAB 7 - Organisasi Regional dan Global 139

BAB 8 - Partai X 163

# Prakata

Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Pengantar Politik Kenegaraan* ini. Setelah melalui proses yang panjang, penuh diskusi dan riset, akhirnya buku ini dapat hadir di tangan para pembaca.

Ide penyusunan buku ini berangkat dari kebutuhan akan literatur politik yang membahas konsep kenegaraan secara komprehensif dan kontekstual. Di tengah derasnya arus informasi dan kompleksitas perkembangan zaman, pemahaman mengenai konsep negara, sistem pemerintahan, demokrasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat menjadi sangat penting. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dasar-dasar ilmu politik kenegaraan yang relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik saat ini.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tema-tema fundamental, mulai dari konsep negara, struktur dan fungsi pemerintahan, praktik politik di berbagai negara, hingga isu-isu kontemporer seperti demokrasi, partai poitik, civil society, serta organisasi regional dan global. Setiap bab disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami namun tetap mempertahankan kedalaman analisis.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum dalam memahami dinamika politik dan kenegaraan. Semoga buku ini juga dapat menjadi langkah kecil dalam memperkaya literatur ilmu politik di Indonesia.

Malang, 14 September 2025

**Penulis**

# Pengantar

Tidak terasa, kita tengah berada di era globalisasi dan transformasi sosial-politik yang begitu cepat. Arus informasi yang kian masif, perkembangan teknologi digital, serta interaksi antarnegara yang semakin intens membuat konsep negara dan pemerintahan tidak lagi bisa dipahami secara sederhana. Tantangan zaman ini menuntut masyarakat untuk lebih melek politik, memahami sistem yang mengatur kehidupan bernegara, dan menyadari peran mereka dalam proses demokrasi.

Dalam sejarahnya, konsep negara, pemerintahan, dan demokrasi telah berkembang seiring perubahan peradaban manusia. Dari model kerajaan dan fodalisme, hingga negara modern yang berbasis hukum dan demokrasi, perjalanan panjang tersebut memperlihatkan bahwa negara bukan sekedar entitas geografis, melainkan organisasi yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak, kewajiban, dan kepentingan warganya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, agama, dan bahasa, menghadapi tantangan unik dalam menjalankan pemerintahan. Dinamika politik dalam negeri, pengaruh global, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis menegaskan perlunya pemahaman mendalam mengenai bagaimana negara dikelola. Buku ini hadir untuk mengupas konsep dasar negara, sistem pemerintahan, dan peran masyarakat dalam membangun tatanan politik yang adil dan demokratis.

Pembaca akan diajak memahami tidak hanya teori politik dan hukum tata negara, tetapi juga praktik nyata yang terjadi di berbagai negara. Pembahasan dalam buku ini dimulai dari konsep dasar negara, kemudian bergerak ke dinamika pemerintahan, demokrasi, partai politik, civil society, hingga peran organisasi internasional dalam membentuk tata dunia. Dengan

Tidak terasa, kita tengah berada di era globalisasi dan transformasi sosial-politik yang begitu cepat. Arus informasi yang kian masif, perkembangan teknologi digital, serta interaksi antarnegara yang semakin intens membuat konsep negara dan pemerintahan tidak lagi bisa dipahami secara sederhana. Tantangan zaman ini menuntut masyarakat untuk lebih melek politik, memahami sistem yang mengatur kehidupan bernegara, dan menyadari peran mereka dalam proses demokrasi.

Dalam sejarahnya, konsep negara, pemerintahan, dan demokrasi telah berkembang seiring perubahan peradaban manusia. Dari model kerajaan dan fodalisme, hingga negara modern yang berbasis hukum dan demokrasi, perjalanan panjang tersebut memperlihatkan bahwa negara bukan sekedar entitas geografis, melainkan organisasi yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak, kewajiban, dan kepentingan warganya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, agama, dan bahasa, menghadapi tantangan unik dalam menjalankan pemerintahan. Dinamika politik dalam negeri, pengaruh global, serta tuntutan masyarakat yang semakin kritis menegaskan perlunya pemahaman mendalam mengenai bagaimana negara dikelola. Buku ini hadir untuk mengupas konsep dasar negara, sistem pemerintahan, dan peran masyarakat dalam membangun tatanan politik yang adil dan demokratis.

Pembaca akan diajak memahami tidak hanya teori politik dan hukum tata negara, tetapi juga praktik nyata yang terjadi di berbagai negara. Pembahasan dalam buku ini dimulai dari konsep dasar negara, kemudian bergerak ke dinamika pemerintahan, demokrasi, partai politik, civil society, hingga peran organisasi internasional dalam membentuk tata dunia. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sarana refleksi atas arah pembangunan politik Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bekal awal bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum untuk memahami kompleksitas bernegara. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan lahir generasi yang kritis, peduli, dan mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa.

**Penulis**

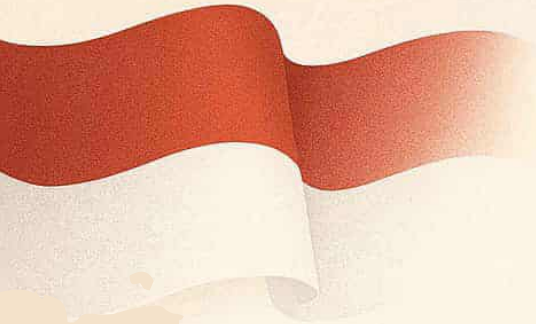



# I Negara




Bagian ini akan membahas tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, evolusi konsep negara, tujuan didirikan negara, fungsi negara, bentuk-bentuk negara, serta sedikit tentang pemerintahan sebuah negara.

## Pengertian

Negara merupakan konsep yang fundamental dalam ilmu politik dan hukum, yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu wilayah tertentu, di mana pemerintahannya berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban serta menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu dan diorganisir di bawah lembaga politik yang memiliki kekuasaan untuk mematuhi hukum.

Sehingga, secara sederhana negara bisa dimaknai sebagai entitas politik yang terdiri dari wilayah geografis tertentu dengan pemerintahan yang mengelola wilayah tersebut dan rakyat yang tinggal di dalamnya.

## Unsur-Unsur Negara

Untuk menjadi sebuah negara, sebuah entitas harus memiliki empat unsur seperti disebutkan sebagai berikut:

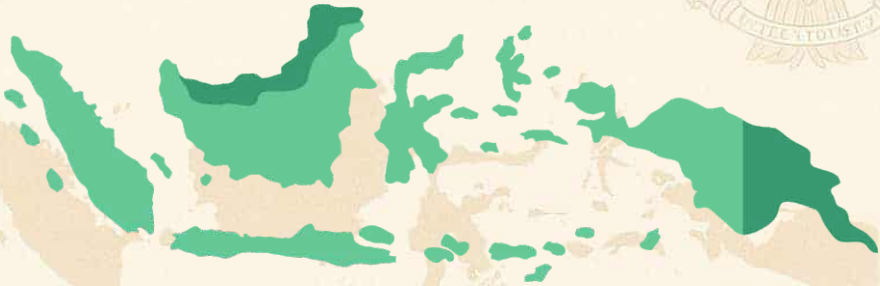

1. **Wilayah**
   Merujuk pada wilayah geografis tertentu yang dianggap sebagai wilayah suatu negara, meliputi daratan, perairan, dan udara di atasnya.
2. **Pemerintahan**
   Merujuk kepada lembaga atau institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan, dan administrasi sebuah entitas.
3. **Penduduk/ Rakyat**
   Merujuk pada sekelompok manusia yang tinggal di wilayah tertentu dari suatu entitas negara. Secara politik, penduduk memiliki posisi politik sebagai rakyat sekaligus warga negara. Status kewarganegaraa berakibat pada kepemilikan hak dan kewajiban tertentu terhadap negara.






**4. Kedaulatan**

Sebuah entitas negara memiliki kewenangan absolut atas wilayahnya sendiri dan memiliki hak untuk membuat kebijakan dalam negeri dan luar negeri tanpa campur tangan negara-negara lain. Kedaulatan ini melibatkan pengakuan dari negara-negara lain dan organisasi internasional.



## Evolusi Konsep Negara




Konsep negara mengalami evolusi bersama dengan perkembangan politik, budaya, dan sejarah. Evolusi negara merujuk pada perkembangan dan perubahan struktur, fungsi, dan konsep negara sepanjang sejarah. Proses ini melibatkan berbagai faktor, termasuk faktor sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Di bawah ini disajikan beberapa aspek penting dalam evolusi negara:

### 1. Asal Usul Negara

Apakah negara itu ada dengan sendirinya secara natural ataukah lahir dan tumbuh bersamaan dengan kebutuhan dan kompleksitas kehidupan manusia?

Awal mula konsep negara sebenarnya bisa ditelusuri dari kehidupan berkelompok. Kemudian, berkembang menjadi kelompok besar yang dipimpin dan atau dikuasai oleh seseorang. Konsep ini bisa ditemui sejak era Mesir purba, Mesopotamia, Persia, India, China, Yunani, dan Roma. Namun, dalam buku pertama ini akan dibahas secara ringkas, selanjutnya lebih detil pada buku terpisah.

Merujuk pada pemikiran para filosof Eropa era modern, berikut dua kelompok teori lahir dan tumbuhnya negara:

- Teori Kontrak Sosial

  Para pemikir politik, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, berpendapat bahwa negara muncul dari kesepakatan sosial antara individu untuk membentuk masyarakat yang teratur dan aman. Meskipun eksistensi "negara" sudah ada berabad-abad sebelumnya.

- Perkembangan negara dimulai dari transisi peradaban pemburu-bertanam

  Transisi dari masyarakat pemburu-pengumpul ke masyarakat agraris memungkinkan pembentukan komunitas yang lebih besar dan kompleks, yang kelak berkembang menjadi negara. Pandangan ini cenderung melihat lahir dan tumbuhnya negara lebih sebagai proses natural sesuai kebutuhan dan kompleksitas masyarakat.

**2. Perkembangan Sistem Pemerintahan**

Lahir dan tumbuhnya negara juga diikuti oleh berkembangnya sistem pemerintahan. Pada awalnya, pemerintahan secara umum berbentuk monarki absolut, sebagaimana bisa disimak dari sejarah dunia sejak zaman Babilonia, Mesir zaman Fir'aun, hingga *renaissance*. Kemudian, monarki absolut itu mulai berubah sejak deklarasi kemerdekaan Amerika dari Inggris. Sejak saat itu, tumbuhlah model negara republik dengan Amerika sebagai modelnya.

Di bawah ini diuraikan secara ringkas apa itu monarki dan apa itu republik, yang kemudian dijelaskan secara lebih mendalam pada bagian akhir dari bab ini.

- Monarki

  Negara-negara di dunia pada mulanya dipimpin oleh pemimpin tunggal yang disebut raja atau ratu atau sebutan lain yang memiliki

kekuasan absolut. Pada banyak peradaban, monarki sering kali dianggap sebagai representasi dari kehendak Tuhan. Monarki bisa dilacak eksistensinya sejak zaman Babilonia.

- Republik
  Meskipun secara sederhana sudah eksis sejak zaman Platon, konsep Republik baru menemukan momentum pertumbuhannya sejak kemerdekaan Amerika. Lahirnya Amerika mendorong kelahiran model baru sistem pemerintahan, yaitu Republik, yang kekuasaannya berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui perwakilan.

## Tujuan Negara

Secara umum, negara didirikan dengan tujuan untuk:

1. Melindungi Rakyat
2. Mengatur Rakyat
3. Melayani Rakyat

Dalam perjalanan waktu, tujuan negara berkembang ke dalam yang berarti, semakin kompleks kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, maka semakin kompleks pula 3 tujuan negara di atas dirumuskan turunannya. Tujuan negara pun berkembang sesuai dengan kompleksitas kehidupan masyarakatnya.

Adapun di era kontemporer, tujuan dan fungsi negara berkembang sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. **Menyejahterakan Rakyatnya**
   Negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negaranya melalui penyediaan layanan publik yang baik. Aspek-aspek kemasyarakatan yang dimaksud dengan layanan publik, yaitu: penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, terminal,

gedung sekolah dan rumah sakit, dan sebagainya), jaminan keamanan dan penegakan hukum, menjaga lingkungan hidup, jaminan kesejahteraan sosial, serta layanan administrasi.

**2. Pembangunan Ekonomi**

Salah satu cara paling utama dalam mendorong dan menciptakan kesejahteraan itu adalah dengan memfasilitasi dan mendukung aktivitas perekonomian rakyat. Bentuk dorongan dan dukungan itu bisa berupa menciptakan lapangan kerja, menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada warga negara, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan sebagainya.

**3. Kebijakan Luar Negeri**

Sebuah negara niscaya menjadi bagian dari komunitas global yang memiliki aturan main. Kadang aturan yang dijalankan di lingkungan global selaras dengan kepentingan nasional sebuah negara. Tapi tidak jarang aturan main yang terjadi bertentangan dengan kepentingan nasional sebuah negara. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah membangun doktrin kebijakan luar negeri yang berorientasi melindungi kepentingan nasional dengan tetap menjaga pergaulan yang seimbang di tingkat internasional, menjaga perdamaian, dan mempromosikan kerjasama internasional.

**4. Kohesi Sosial**

Negara menjadi tempat bagi berbagai macam kelompok rakyat yang beragam dengan berbagai variasi dan kompleksitas masalahnya. Salah satu peran utama negara adalah mendorong integrasi dan kesatuan di antara beragam kelompok dalam masyarakat, serta meningkatkan toleransi dan saling pengertian untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas negara.



**5. Pembangunan Infrastruktur dan Menjaga Kelestarian Lingkungan**

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyatnya, negara perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari warganya. Seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, sekolah, pelabuhan, bandar udara, jaringan komunikasi, dsb. Selain itu, negara juga harus mempromosikan perlindungan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan.

**6. Kepentingan Nasional dan Identitas Nasional**

Kepentingan nasional dan identitas nasional merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan atau seperti dua muka pada sekeping uang logam.

Kepentingan nasional merujuk pada tujuan dan nilai yang dianggap penting oleh suatu negara untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, kepentingan

nasional mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, ekonomi, sosial,dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan bangsa.

Kepentingan nasional menjadi dasar dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan luar negeri ketika pemerintah berusaha melindungi dan mendorong kepentingan rakyatnya di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, kepentingan nasional juga mencerminkan identitas kolektif bangsa, maka setiap elemen masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut.

Sedangkan identitas nasional merupakan suatu konstruksi sosial yang mencerminkan kesadaran kolektif suatu bangsa, yang dibentuk melalui sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai bersama. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional tidak hanya mencakup aspek-aspek fisik seperti bendera dan lambang negara, tetapi juga melibatkan pengakuan terhadap keragaman etnis dan budaya yang ada di dalamnya.

Proses pembentukan identitas nasional ini sering kali melibatkan narasi sejarah yang mengedepankan perjuangan bersama dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara. Selain itu, pendidikan dan simbol-simbol nasional juga berperan penting dalam memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga negara.

Dengan demikian, identitas nasional menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun dalam praktiknya sering kali dihadapkan pada tantangan perbedaan dan kompleksitas persoalan di masyarakat.

## Bentuk Negara

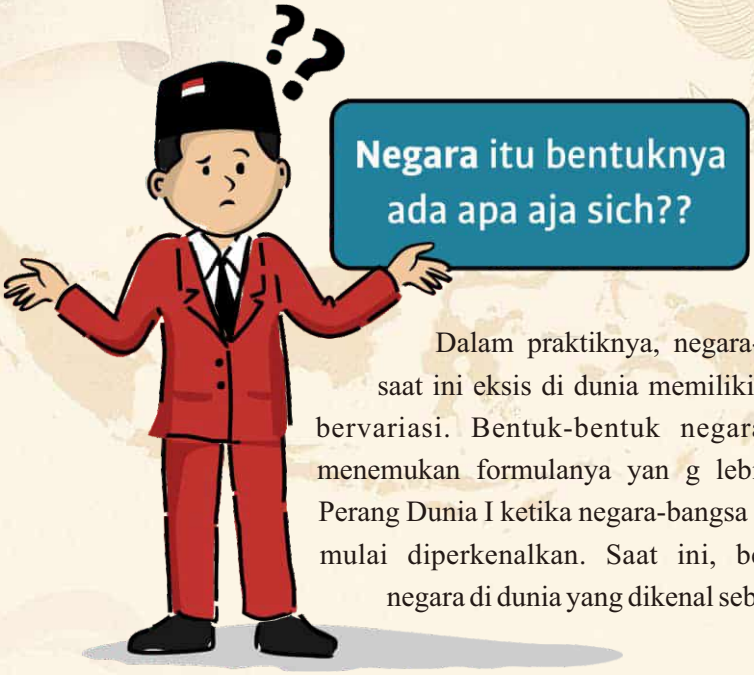


Dalam praktiknya, negara-negara yang saat ini eksis di dunia memiliki bentuk yang bervariasi. Bentuk-bentuk negara ini mulai menemukan formulanya yan g lebih solid usai Perang Dunia I ketika negara-bangsa *(nation state)* mulai diperkenalkan. Saat ini, bentuk-bentuk negara di dunia yang dikenal sebagai berikut:

**1. Negara Kesatuan**

Negara kesatuan memiliki pemerintahan yang sentralistis di tingkat nasional, yang artinya otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Administrasi wilayah di negara kesatuan, contohnya Indonesia, memiliki otonomi terbatas dan tunduk pada hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

**2. Negara Federal**

Negara federal terdiri dari entitas politik yang lebih kecil, seperti negara bagian yang setara dengan provinsi di negara kesatuan. Negara bagian memiliki otonomi yang signifikan dan berbagi kekuasaan dengan pemerintah pusat. Setiap entitas politik biasanya memiliki sejumlah kebijakan internal negara bagian. Pemerintah negara bagian bisa memiliki

undang-undang sendiri, aturan main sendiri, bahkan memiliki kantor imigrasi independen untuk memfilter warga asing atau warga lokal dari negara bagian lain. Bentuk negara ini bisa dilihat pada Malaysia, Amerika Serikat, dan Brasil.

**3. Konfederasi**

Konfederasi adalah bentuk negara ketika entitas-entitas politik yang lebih kecil, seperti negara atau wilayah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan sumber daya internal serta dalam mempertahankan kedaulatan mereka sendiri. Di sini pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang terbatas, yang membuat konfederasi lebih longgar daripada negara federasi. Pada awal pembentukannya, akhir tahun 1770-an, Amerika Serikat mengambil bentuk konfederasi. Namun, karena tidak efektif, tak lama kemudian diubah menjadi negara federal. Saat ini, tidak ditemukan negara konfederasi yang masih eksis di dunia.

## Pemerintahan

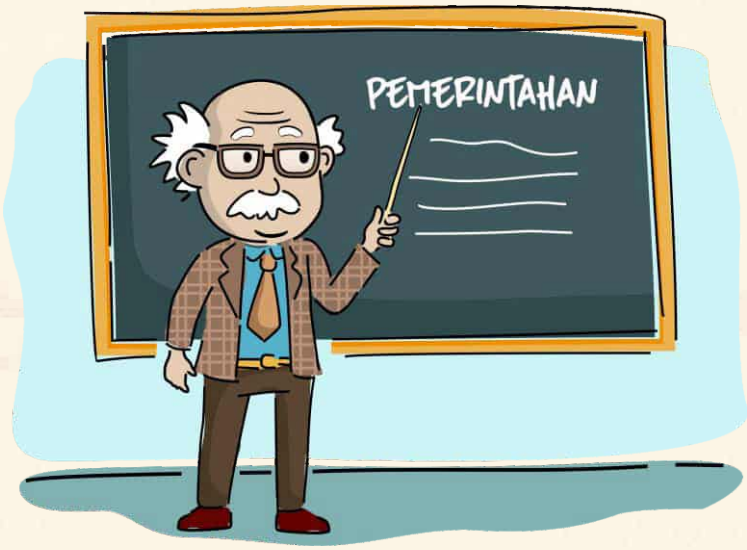

Aristoteles mengartikan pemerintah adalah organisasi yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Definisi ini menekankan tujuan moral dan etis dari pemerintahan.

Sementara, para pakar lain juga membangun definisi masing-masing tentang apa itu pemerintahan. Di bawah ini disajikan beberapa definisi pemerintahan menurut sejumlah pakar sebagai pengayaan khazanah pengetahuan:

**1. David Easton**

Menurut Davin Easton, pemerintah didefinisikan sebagai "institusi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan yang mengatur perilaku masyarakat." Definisi ini menekankan peran pemerintah dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial.

**2. Robert Dahl**

Robert Dahl mendefinisikan pemerintah sebagai "seperangkat lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan mengelola konflik dalam masyarakat." Dalam pandangannya, pemerintah berfungsi untuk mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan perbedaan di antara warga negara.

**3. Max Weber**

Max Weber menyatakan bahwa pemerintah adalah "suatu organisasi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuatan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu." Pengertian ini menyoroti aspek kekuasaan dan legitimasi yang melekat pada pemerintah.

**4. John Locke**

John Locke melihat pemerintah sebagai "perjanjian sosial ketika individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka." Ini menunjukkan

bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak individu.

**5. B Guy Peters and John Pierre**

Pemerintah diartikan sebagai tata kelola sebuah negara dalam upaya mencapai kepentingan kolektif dan mengarahkan serta mengkoordinasikan masyarakat.

Dari uraian singkat di atas, bisa diambil benang merah untuk memahami makna pemerintah. Tidak semua orang harus memiliki deskripsi dengan kalimat yang sama, tetapi keragaman dalam prinsip pemahaman yang sama itu menjadi kekayaan tersendiri.

## Bentuk - Bentuk Pemerintahan

Dalam implementasinya, ada beberapa bentuk pemerintahan yang eksis di dunia saat ini. Bentuk - bentuk pemerintahan tersebut, yaitu:

**1. Monarki**

Monarki adalah bentuk negara dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja, ratu, atau individu tunggal dengan gelar yang beragam. Gelar-gelar tersebut misalnya Sultan, *Brotherly Leader and Guide of the Revolution*, atau lainnya. Monarki lazimnya merupakan negara modern yang dibentuk berbasiskan wilayah dan kekuasaan kerajaan di masa sebelumnya.

Selain monarki absolut, yang berarti raja memiliki kekuasaan mutlak, bentuk pemerintahan ini bisa juga berupa monarki konstitusional, yaitu raja memiliki peran sebagai kepala negara, sementara pengelolaan negara dijalankan oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat.

Beberapa negara yang menerapkan monarki konstitusional adalah

Inggris, Jepang, dan Belanda, sedangkan bentuk monarki absolut contohnya Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Ada pula negara monarki absolut yang mulai memperkenalkan konstitusi, misalnya Qatar.

**2. Republik**

Republik merupakan bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan warga negara dan dilaksanakan oleh perwakilan yang dipilih, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Republik dibangun berdasarkan pemikiran bahwa wilayah dan seluruh kekayaan di dalam wilayah itu merupakan milik semua warga yang mendiaminya. Istilah Republik pertama kali diperkenalkan oleh Plato, seorang cendekiawan pada masa Yunani kuno.

Di negara-bangsa modern, republik memiliki dua bentuk, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial merupakan bentuk republik ketika presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, contohnya adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Sedangkan dalam bentuk parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh dua individu yang berbeda, seperti pada Turki, Prancis, Finlandia, dan Italia.

## Epilog Bab I

Uraian di atas memberikan gambaran umum mulai dari pengertian sederhana negara, tujuannya, unsur-unsur yang menjadi pembentuknya, bentuk-bentuk yang dikembangkan dan eksis dalam sejarah, hingga pengelolaan negara yang diserahkan kepada sebuah pemerintahan.

Namun, sebagai tambahan khazanah pengetahuan, menurut al Farabi, sesungguhnya sebuah negara itu bisa dikategorikan ke dalam salah satu di antara 5 (lima) kategori di bawah ini:

1. Negara utama *(al madinah al fadila)*
2. Negara orang-orang tanpa pengetahuan *(al madinah al jahilah)*
3. Negara orang fasik *(al madinah al fasiqa)*
4. Negara orang-orang yang tak konsisten *(al madinah al mutabaddilah)*
5. Negara sesat *(al madinah al dalla)*

Menurut Anda, termasuk dalam kategori ke berapakah Indonesia versi hari ini?



# II Pemerintahan




Bagian ini akan menguraikan secara ringkas tentang sistem pemerintahan kontemporer yang diadopsi di berbagai negara di dunia. Dimulai dari demokrasi, monarki, oligarki, hingga sistem totalitarianisme, dan diakhiri dengan teokrasi.

Bagian ini memberi khazanah yang relatif detail tentang kelima sistem tersebut meskipun disampaikan secara ringkas dan praktis untuk tujuan kursus pendek atau dibaca secara ringan oleh khalayak umum.

Selain menguraikan konsep sistem pemerintahan, setiap pembahasan juga akan disertai dengan contoh-contoh negara yang mengadopsinya untuk memberi gambaran kepada pembaca bagaimana wujud kasat mata dari konsep-konsep yang diimplementasikan di sebuah negara.

## Pengertian

Menghimpun dari berbagai sumber, secara sederhana, sistem pemerintahan dimaknai sebagai seperangkat aturan, infrastruktur, alat, dan

fasilitas untuk pengelolaan negara. Untuk memberikan lanskap pengertian sistem pemerintahan secara lebih luas, berikut disajikan rumusan atau definisi sistem pemerintahan menurut para pakar:

- Ismail Suny menyatakan bahwa "sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara".
- Sementara, Sri Soemantri mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai "suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan".
- Lain halnya dengan Robert Dahl yang menjelaskan "sistem pemerintahan adalah cara dimana kekuasaan politik diorganisir dan dijalankan".
- Sedangkan Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa "sistem pemerintahan mencakup institusi-institusi, prosedur, dan norma-norma yang membentuk cara-cara kekuasaan politik dijalankan.
- Terakhir, C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori: "parliamentary executive" dan "non-parliamentary executive," yang menyoroti variasi dalam struktur dan fungsi pemerintah di berbagai negara. Dengan demikian, Strong menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal untuk sistem pemerintahan, melainkan beraneka ragam bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara.



Di era kontemporer, dimana setiap negara berbasis-negara bangsa, wujud sistem pemerintahan negara-negara di dunia adalah sebagai berikut:

**1. Demokrasi**

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipiih. Istilah "demokrasi" berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti "penduduk" atau "rakyat", dan "kratos" yang berarti "kekuasaan".

Dalam konteks ini, demokrasi berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial melalui proses politik yang inklusif dan representatif. Demokrasi tidak hanya melulu tentang pemilihan umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintah.

**1.1. Sumber-Sumber Awal Gagasan Demokrasi**

Gagasan demokrasi telah berkembang sepanjang sejarah, dengan inspirasi dari berbagai sumber filosofis dan politik. Salah satu sumber utama adalah Aristoteles, melalui karyanya: *Politica*, yang menjelaskan tentang jenis-jenis pemerintahan.

Aristoteles mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan menjadi tiga kategori utama: monarki (pemerintahan oleh satu orang), aristokrasi (pemerintahan oleh sekelompok orang terpilih), dan demokrasi (pemerintahan oleh banyak orang).

Di era modern, lahir pua para pemikir politik dan filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan teoritis demokrasi. Locke, misalnya dalam *Questions Concerning the Law of Nature*

mengemukakan bahwa kekuasaan datang dari rakyat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Sementara Rousseau, dalam *Du contract social ou Principes du droit polittique* mengajukan konsep "kehendak umum", yang berarti keputusan yang diambil oleh rakyat secara kolektif demi kebaikan bersama.

Pemikiran tentang demokrasi terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia. Namun, tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dasar demokrasi diuraikan di bagian bawah ini.

## 1.2. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti berikut ini, mencakup beberapa elemen fundamental yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang demokratis:

a. Kedaulatan Rakyat

Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

b. Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama yang popular disebut trias politica, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini didesain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Setiap cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta saling mengawasi satu sama lain.

c. Hak Asasi Manusia

Demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk

kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Perlindungan terhadap hak-hak individu ini penting agar semua warga negara dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan represi.

d. Partisipasi Publik

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik adalah kunci dalam demokrasi. Tidak hanya pada pemilihan umum, tetapi juga keterlibatan dalam diskusi publik, organisasi masyarakat sipil, dan aksi protes untuk menyuarakan pendapat.

e. Akuntabilitas dan Transparansi

Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa tindakan pemerintah harus dapat diakses dan diawasi oleh publik untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan rakyat.

f. Keadilan dan Kesetaraan

Setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap suara dihargai dan memiliki bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu wujudnya adalah pengadilan yang independen.

### 1.3. Negara-Negara yang Mengadopsi Demokrasi

Sejak revolusi Amerika dan revolusi Perancis, banyak negara di dunia yang kemudian turut mengadopsi demokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka. Contoh-contoh negara demokrasi yang mapan termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Prancis.

Di Amerika Serikat, misalnya, pemilihan presiden dan anggota Kongres dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Sementara di Jepang, sistem demokrasi liberal telah berkembang pesat semenjak pasca-perang, dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

dengan fokus pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Sedangkan di Australia, demokrasi federal telah berhasil mengintegrasi kebudayaan lokal dengan kebutuhan global. Demokrasi juga telah berkembang di negara-negara lain seperti India, Brasil, dan Filipina, meski masih menghadapi tantangan-tantangan internal dan eksternal.

### 1.4. Model-Model Pemerintahan Demokrasi

a. Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial, yang diterapkan di Amerika Serikat dan Brasil contohnya, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif.

Ciri khas dari sistem ini adalah:

- Pemilihan Langsung
  Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- Kekuasaan Terpisah
  Ada pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

b. Sistem Parlementer

Kepala pemerintahan dalam parlementer lazimnya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen dari partai atau koalisi yang memenangkan pemilu. Inggris dan Kanada merupakan contoh negara yang menjalankan sistem yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Kepala Pemerintahan dipilih dari anggota parlemen
  Perdana menteri diangkat oleh parlemen. Biasanya ketua partai atau pemimpin koalisi. Perdana menteri dapat diberhentikan oleh

parlemen melalui mosi tidak percaya.

- Kekuasaan Eksekutif Terintegrasi

  Eksekutif dan legislatif saling terkait, dengan kabinet yang terdiri dari anggota parlemen.

c. Sistem Semi-Presidensial

Sistem semi-presidensial menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Dalam model ini, terdapat presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif, seperti yang diimplementasikan di Prancis dan Rusia.

Ciri-cirinya meliputi:

- Dua Kepala Eksekutif

  Presiden memiliki kekuasaan yang signifikan, tetapi perdana menteri juga menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

- Keseimbangan Kekuasaan

  Hubungan antara presiden dan perdana menteri dapat bervariasi tergantung pada konstitusi dan situasi politik.



d. Sistem Dewan Perwakilan Rakyat (Konsensus)

Model ini dijalankan di Swiss, ini menekankan pada konsensus dalam pengambilan keputusan, dengan berbagai partai politik berkoalisi untuk membentuk pemerintahan.

Karakteristiknya meliputi:

- Koalisi Partai

  Pemerintahan dibentuk oleh koalisi beberapa partai untuk mencapai mayoritas.

- Fleksibilitas dalam Kebijakan

  Keputusan seringkali memerlukan negosiasi antara berbagai kelompok kepentingan.

Setiap model pemerintahan demokrasi memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, serta mempengaruhi cara negara tersebut menjalankan fungsi pemerintahannya.

## 2. Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang. Bisa disebut raja atau ratu, atau sebutan lain yang setara. Sistem ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman kuno, ketika pemimpin suku dianggap sebagao wakil dewa atau memiliki legitimasi ilahi. Monarki sering kali berfungsi sebagai simbol persatuan dan kontinuitas dalam suatu negara.

### 2.1. Asal Mula dan Sejarah Monarki

Asal mula monarki dapat ditelusuri kembali ke masyarakat primitif, yang kala itu pemimpinnya dipilih berdasarkan kekuatan, kebijaksanaan, atau hubungan darah. Tentu saja waktu itu namanya belum Kerajaan. Seiring waktu, banyak kerajaan mulai mengembangkan struktur pemerintahan yang lebih formal, dengan raja sebagai penguasa absolut.

Dalam sejarah, monarki telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara-negara dan kebudayaan, seperti Mesir Kuno, Mesopotamia, Persia, Tiongkok kuno, Romawi, dan berbagai kerajaan di Eropa dan Asia. Di Nusantara, tentu saja banyak kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang tumbuh secara natural menggunakan sistem yang akhirnya disebut monarki ini, mulai dari Kalingga, Kutai Kartanegara, Kanjuruhan, dan seterusnya. Monarki seringkali dikaitkan dengan konsep legitimasi ilahi, dimana raja dianggap sebagai utusan Tuhan di muka bumi.

## 2.2. Para Pemikir Monarki

Para pemikir atau filsuf yang berkontribusi pada konsep monarki, antara lain:

1. Aristoteles

   Dalam karyanya *Politica*, Aristoteles membahas 3 bentuk pemerintahan, termasuk monarki. Ia mengklasifikasikan monarki sebagai bentuk pemerintahan yang baik jika dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil.

2. Thomas Hobbes

   Dalam bukunya *Leviathan*, mendukung ide monarki absolut sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Ia berargumen bahwa individu harus menyerahkan sebagian haknya kepada raja untuk mendapatan perlindungan dan keamanan.

3. Jean Bodin

   Bodin adalah seorang filsuf politik yang terkenal dengan teorinya tentang kedaulatan. Dalam karyanya *Six Books of the Commonwealth*, ia mendukung monarki absolut dan menekankan pentingnya kekuasaan raja yang tidak terbatas untuk menjaga stabilitas negara.

4. John Locke

   Meskioun Locke lebih dikenal sebagai pendukung demokrasi dan

hak asasi manusia, Locke juga membahas konsep monarki dalam konteks legitimasi pemerintahan. Lewat *Two Treatises of Government*, ia mengkritik monarki absolut dan menekankan pentingnya persetujuan rakyat.

Para pemikir yang disebutkan di atas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang monarki, baik dalam konteks sejarah maupun teori politik, dengan pandangan yang beragam mengenai legitimasi, kekuasaan, dan tanggung jawab penguasa.

### 2.3. Jenis-Jenis Monarki

Dalam praktiknya, monarki dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Monarki Absolut

   Dalam sistem ini, raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan hukum, seperti di Arab Saudi contohnya. Mereka dapat membuat keputusan tanpa persetujuan dari badan legislatif atau masyarakat.

2. Monarki Konstitusional

   Pada sistem yang diterapkan di Inggris, Jepang, dan Swedia, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau hukum. Raja bertindak sebagai kepala negara simbolis sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri dan pemerintah.

3. Monarki Parlementer

   Monarki parlementer, variasi dari monarki konstitusional, membatasi peran raja dalam urusan pemerintahan sehari-hari, parlemen-lah yang memiliki kekuasaan legislatif yang lebih besar. Contoh perwujudannya adalah Belanda dan Norwegia.

### 2.4. Revolusi Melahirkan Monarki Konstitusional

Pergeseran dari monarki absolut ke monarki konstitusional

seringkali terjadi melalui proses revolusi atau reformasi politik. Banyak negara mengalami perubahan ini pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak hak dan kebebasan politik.

Revolusi Prancis (1789) dan Revolusi Glorious di Inggris (1688) adalah contoh penting dari pergeseran ini, yaitu ketika rakyat menuntut pembatasan kekuasaan raja dan pengakuan terhadap hak-hak individu.

Sistem monarki banyak diadopsi oleh negara-negara modern. Terutama, negara-negara Eropa yang memiliki sejarah kolonialisme. Contoh negara-negara monarki yang eksis sampai saat ini:

- Monarki Absolut:
  - Arab Saudi: Raja memiliki kekuasaan penuh atas semua aspek pemerintahan.
  - Brunei Darussalam: Sultan berkuasa penuh.
- Monarki Konstitusional:
  - Inggris: Ratu berfungsi sebagai kepala negara simbolis, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.
  - Jepang: Kaisar adalah simbol negara dengan peran seremonial.
  - Swedia: Raja memiliki peran terbatas dalam urusan pemerintahan sehari-hari.

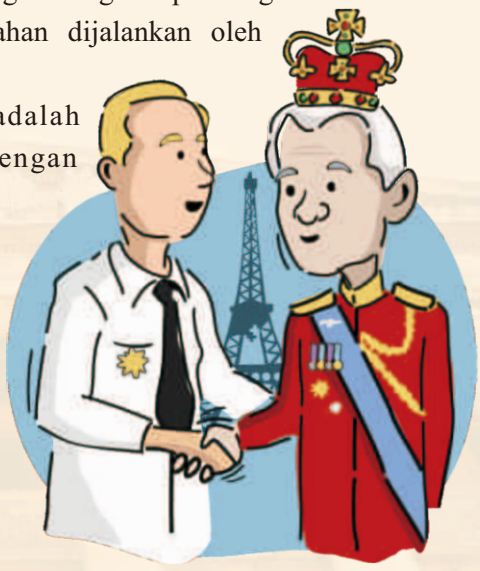

## 3. Oligarki

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politik dikuasai oleh sekelompok kecil orang, sering kali dari kalangan elit ekonomi, militer, atau aristokrasi. Dalam sistem ini, keputusan politik diambil oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Sementara, partisipasi masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan sangat terbatas.

### 3.1 Asal Mula dan Sejarah Oligarki

Istilah "oligarki" berasal dari bahasa Yunani "oligos," yang berarti "sedikit," dan "arkhein," yang berarti "memerintah." Oligarki telah ada sejak zaman kuno, ketika kelompok-kelompok elit menguasai kekuasaan politik dan ekonomi.

Dalam sejarah, banyak kerajaan dan negara kota yang dikuasai oleh oligarki, yaitu ketika kekuasaan terpusat pada aristokrat atau pemilik tanah. Misalnya, di Athena kuno. Meskipun ada elemen demokratis, kekuasaan tetap berada di tangan sekelompok kecil warga kaya.

### 3.2 Para Pemikir Konsep Oligarki

Beberapa pemikir yang berkontribusi pada konsep oligarki antara lain:

1. Plato

   Melalui karyanya *The Republic*, Plato membahas tentang idealisme politik yang melibatkan elite intelektual dan moral untuk mengurus negara. Meski tidak secara eksplisit membicarakan oligarki, idenya tentang elite intelektual yang berkuasa memiliki implikasi yang relevan dengan konsep oligarki.

2. Aristoteles

   Dalam Politica, Aristoteles menggambarkan monarki dan oligarki sebagai dua bentuk pemerintahan yang berlawanan. Monarki dianggap lebih baik karena kekuasaannya terpusat pada satu orang yang bijaksana. Sedangkan oligarki dipandang buruk karena

kontrolnya oleh sekelompok kecil yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengurus negara secara efektif.

3. John Locke

Meskipun bukanlah pemikir utama tentang oligarki, John Locke membahas tentang hak-hak individu dan konsep demokrasi liberal dalam karyanya Two Treatises of Government Kritikan Locke atas penyalahgunaan kekuasaan dapat diterjemahkan menjadi kritik terhadap sistem-sistem seperti oligarki yang sering kali menindas hak-hak rakyat.

### 3.3 Variasi Oligarki di Dunia

Oligarki dapat muncul dalam berbagai bentuk dan variasi, tergantung pada konteks sosial dan politik suatu negara. Beberapa variasi oligarki meliputi:

1. Oligarki Ekonomi

Pada oligarki ini, kekuasaan politik dikuasai oleh individu atau kelompok dengan kekayaan yang signifikan. Mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui lobi dan sumbangan politik.

2. Oligarki Militer

Dalam sistem ini, kekuasaan berada di tangan para pemimpin militer. Negara-negara yang mengalami kudeta militer sering kali beralih ke bentuk pemerintahan ini.

3. Oligarki Politik

Lain halnya dengan oligarki politik, yang sekelompok kecil partai politik atau pemimpin politik mendominasi proses pengambilan keputusan, namun tak jarang mengabaikan suara rakyat.

### 3.4 Contoh Negara yang Dipimpin Oligarki

Beberapa negara yang sering dianggap memiliki elemen oligarki dalam pemerintahan mereka antara lain:

- Rusia

  Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, banyak analis berpendapat bahwa negara ini dikuasai oleh sekelompok oligark kaya yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah.

- China

  Meskipun secara resmi merupakan negara komunis, Partai Komunis China (PKC) mengendalikan kekuasaan politik dan ekonomi, dengan elit partai yang mendominasi pengambilan keputusan.

- Meksiko

  Beberapa kritikus menyebutkan bahwa oligarki ekonomi berperan dalam politik Meksiko, yaitu hanya sejumlah kecil pebisnis kaya memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik.

- Amerika Serikat

  Meskipun merupakan negara yang mengklaim diri sebagai promotor demokrasi, banyak fakta yang menjelaskan bahwa sistem lobi dan pendanaan kampanye di Amerika Serikat menciptakan oligarki secara de facto, yang berarti kelompok-kelompok tertentu memiliki pengaruh besar terhadap proses legislatif.

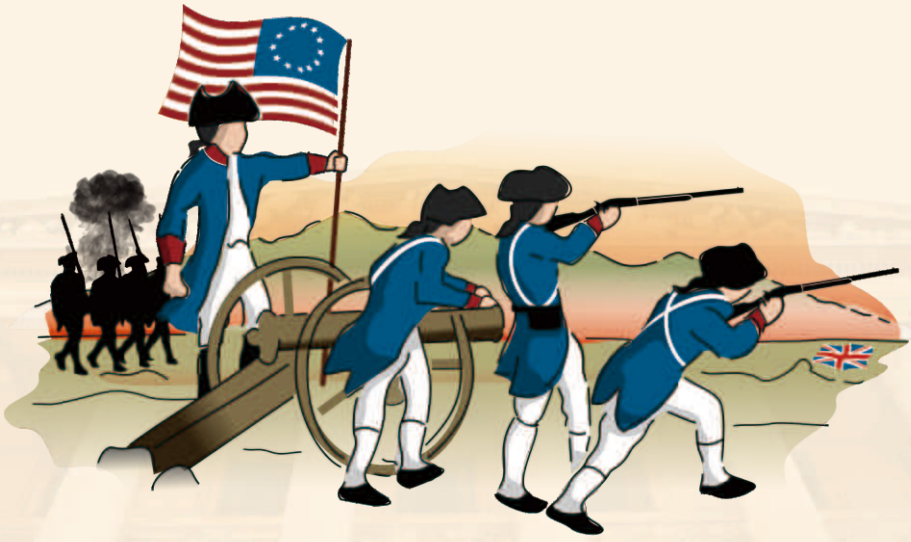

## 4. Totalitarianisme

### 4.1 Pengertian

Pemerintahan totaliter adalah sistem ketika negara memiliki kontrol penuh atas hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan bahkan kehidupan pribadi individu. Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada satu partai atau pemimpin yang tidak memberikan ruang bagi oposisi atau perbedaan pendapat

Totalitarianisme berasal dari kata "total" yang berarti keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan, istilah ini merujuk pada sistem di mana pemerintah berusaha untuk mengontrol semua aspek kehidupan publik dan pribadi termasuk pengawasan ketat terhadap media, pendidikan, dan kebebasan berbicara. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman ideologi dan mencegah munculnya gerakan oposisi.



## 4.2 Asal Mula dan Sejarah Totalitarianisme

Akar totalitarianisme dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia I. Ideologi totaliter muncul sebagai respons terhadap krisis politik dan sosial yang dihadapi banyak negara. Dua contoh paling terkenal dari pemerintahan totaliter adalah Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler dan Uni Soviet dalam kendali Joseph Stalin. Kedua rezim ini menggunakan propaganda, teror, dan kontrol sosial untuk mempertahankan kekuasaan mereka

Totalitarianisme berkembang pesat selama periode antara dua perang dunia ketika banyak negara Eropa mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi. Rezim-rezim totaliter ini seringkali menggunakan ideologi ekstrem untuk menarik dukungan massa dan menyingkirkan lawan politik. Demikian juga yang terjadji pada pemerintahan fasis di Italia di bawah Benito Mussolini.

## 4.3 Para Pemikir yang Berkontribusi pada Topik Totalitarianisme

Para pemikir berikut ini memiliki kontribusi pada konsep dan analisa totalitarianisme:

1. Carl Friedrich

   Dalam karyanya, Friedrich mengembangkan definisi totalitarianisme dan mengidentifikasi karakteristik utama dari rezim totaliter, seperti kontrol total terhadap masyarakat, penggunaan propaganda, dan penindasan terhadap oposisi.

2. Zbigniew Brzezinski

   Brzezinski, melalui bukunya Totalitarian Dictatorship and Autocracy, membahas mekanisme kekuasaan dalam sistem totaliter dan perbedaan antara totalitarianisme dan bentuk pemerintahan otoriter lainnya.

3. Hannah Arendt

   Dalam The Origins of Totalitarianism, Arendt menganalisis

bagaimana totalitarianisme muncul dari kondisi sosial dan politik tertentu, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya ideologi dan pengawasan sebagai alat pengendalian.

4. George Orwell

   Meskipun lebih dikenal sebagai novelis, karya Orwell, terutama 1984, memberikan wawasan mendalam tentang sifat totalitarianisme, termasuk pengawasan massal, manipulasi bahasa, dan kontrol pikiran.

5. Robert Michels

   Michels mengemukakan "hukum oligarki," pada karyanya Political Parties, yang menjelaskan bagaimana organisasi politik, termasuk yang bersifat totaliter, cenderung dikuasai oleh sekelompok kecil orang.

Para pemikir di atas telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menganalisis karakteristik serta dinamika sistem totaliter, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan individu.

## 4.4 Negara-Negara yang Menjalankan Pemerintahan Totaliter

Beberapa negara yang dikenal menjalankan pemerintahan totaliter antara lain:

- Uni Soviet

  Pemerintahan komunis di Uni Soviet menerapkan kontrol ketat atas masyarakat melalui partai komunis dan penggunaan teror negara. Uni Soviet berdiri tahun 1922 dan runtuh pada tahun 1991.

- Nazi Jerman

  Di bawah Adolf Hitler (1933-1945), Jerman menerapkan kebijakan totaliter dengan penekanan keras terhadap oposisi politik dan implementasi ideologi rasial yang ekstrem, utamanya anti-semit (yahudi)

- Korea Utara

Saat ini, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un dengan sistem pemerintahan yang sangat terpusat dan kontrol yang ketat terhadap warganya.

- Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
  Meskipun memiliki elemen ekonomi pasar, Partai Komunis China (PKC) tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat atas masyarakat.
- Libya
  Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi (1969-2011) menerapkan sistem totaliter dengan pengawasan ketat terhadap masyarakat dan penindasan terhadap oposisi.

## 5. Teokrasi

### 5.1 Pengertian Teokrasi

Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh tokoh agama atau lembaga keagamaan, dan hukum yang diterapkan didasarkan pada ajaran agama. Dalam teokrasi, pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, dan keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama.

Teokrasi berasal dari kata Yunani "theos," yang berarti "Tuhan," dan "kratos," yang berarti "kekuasaan." Dalam konteks negara, teokrasi mengacu pada pemerintahan yang dijalankan oleh para pemimpin agama atau berdasarkan hukum agama. Sistem ini berusaha untuk mengintegrasikan kehidupan politik dan spiritual, dimana hukum negara dan norma sosial ditentukan oleh doktrin agama.

### 5.2 Asal Mula dan Sejarah Teokrasi

Asal mula teokrasi dapat ditelusuri kembali dari peradaban kuno, dimana pemimpin dianggap memiliki legitimasi ilahi. Misalnya,

dalam Mesir Kuno, para fir'aun dianggap sebagai dewa dan memiliki kekuasaan absolut, begitu juga di Persia kuno, dan di banyak peradaban di dunia.

Dalam konteks modern, teokrasi muncul sebagai bentuk pemerintahan di masyarakat yang sangat religius, seperti dalam kasus Iran setelah Revolusi Islam 1979. Dalam sejarah, banyak negara telah menerapkan elemen teokrasi, seperti Kekaisaran Romawi Kuno dan berbagai kerajaan di Timur Tengah.

### 5.3 Pemikir Konsep Teokrasi

Beberapa pemikir yang berkontribusi pada konsep teokrasi antara lain:

- Saint Augustine

  Dalam karyanya *City of God*, Augustine membahas hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas ilahi, serta menekankan bahwa pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Kristen.

- Thomas Aquinas

  Thomas Aquinas mengembangkan ide bahwa hukum manusia harus sejalan dengan hukum Tuhan, sehingga pemerintah harus berfungsi untuk mencapai tujuan ilahi.

- Imam Khomeini

  Imam Khomeini adalah pemimpin revolusi Iran menggulingkan Shah Reza Pahlavi dan kemudian mendirikan Republik Islam Iran yang mengusung konsep wilayatul faqih. Imam Khomeini menulis buku *Vilayat el faqih* untuk mentranformasikan pemikirannya tentang bentuk pemerintahan Republik Islam Iran.

- John Calvin

  Pemikiran Calvin tentang pemerintahan gereja dan negara mempengaruhi pengembangan teokrasi di beberapa negara Eropa pada abad ke-16.

## 5.4 Variasi Teokrasi di Dunia

Implementasi Teokrasi di dunia bervariasi wujudnya, seperti:

- Teokrasi Absolut

  Dimana pemimpin agama memiliki kekuasaan penuh tanpa batasan dari lembaga lain. Contoh negara dengan teokrosi absolut adalah Iran.

- Teokrasi Konstitusional

  Menerapkan batasan hukum untuk mengendalikan kekuasaan pemimpin agama.

  Contohnya Paus di Vatikan yang memiliki kekuasaan politik terbatas, tetapi juga berfungsi sebagai kepala gereja.

- Teokrasi Campuran

  Sedangkan dalam teokrasi campuran, elemen-elemen teokratis digabungkan dengan bentuk pemerintahan lainnya, seperti monarki atau demokrasi. Perwujudannya bisa dilihat pada Arab Saudi, yang menggabungkan hukum Islam dengan sistem monarki.

## 5.5 Contoh Negara-Negara yang Mengadopsi Teokrasi

Beberapa negara yang dikenal menjalankan sistem teokrasi antara lain:

- Iran

  Setelah Revolusi Islam 1979, Iran menjadi republik Islam dengan pemimpin tertinggi (Ayatollah) yang memiliki kekuasaan absolut dalam urusan politik dan keagamaan.

- Vatican City

  Sebagai negara terkecil di dunia, Vatikan dipimpin oleh Paus sebagai kepala gereja Katolik dan memiliki struktur pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip gereja.

- Arab Saudi

  Meskipun merupakan monarki, Arab Saudi menerapkan hukum syariah sebagai dasar bagi sistem hukumnya, dengan raja sebagai pemimpin spiritual dan politik.

- Afghanistan (di bawah Taliban)

Setelah pengambilalihan Taliban, Afghanistan menerapkan hukum Islam secara ketat sebagai dasar pemerintahan. Taliban menamakan pemerintahannya sebagai sistem Imarah Islam.

Teokrasi menunjukkan bagaimana agama dapat mempengaruhi struktur politik dan sosial suatu negara, sering kali dengan dampak signifikan terhadap kebebasan individu dan pluralisme.

Kelima bentuk sistem pemerintahan yang diuraikan pada bagian ini masih eksis hingga hari ini dna diadopsi oleh negara-negara di muka bumi. Tentu saja dengan berbagai variasi yang dikembangkan negara terkait sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan kesejarahan negara tersebut.



Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara di Asia Tenggara

| Negara | Bentuk Negara | Sistem Pemerintahan |
|---|---|---|
| Malaysia | Monarki | Monarki Konstitusional |
| Thailand | Monarki | Monarki Konstitusional |
| Brunei Darussalam | Monarki | Monarki Absolut |
| Kamboja | Monarki | Monarki Konstitusional |
| Laos | Republik | Republik Sosialis |
| Vietnam | Republik | Republik Sosialis |
| Myanmar | Republik | Junta militer |
| Singapura | Republik | Republik Parlementer |
| Timor Leste | Republik | Republik Parlementer |
| Philipina | Republik | Republik Presidensial |
| Indonesia | Republik | Republik Presidensial |

Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Populer di Eropa

| Negara | Bentuk Negara | Sistem Pemerintahan |
|---|---|---|
| Inggris Raya | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Belanda | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Spanyol | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Norwegia | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Swedia | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Denmark | Monarki | MonarkiKonstitusional |
| Kosovo | Republik | Republik Presidensial |
| Belarus | Republik | Republik Presidensial |
| Jerman | Republik | Republik Parlementer |
| Italia | Republik | Republik Parlementer |
| Prancis | Republik | Republik Parlementer |
| Portugal | Republik | Republik Parlementer |



# III Praktek Politik di Berbagai Negara




Suprastruktur politik merujuk pada sistem dan institusi yang mendukung dan mengatur kehidupan politik di suatu negara. Hal ini mencakup lembaga-lembaga seperti pemerintah, partai politik, sistem hukum, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Suprastruktur politik berfungsi untuk menciptakan kerangka kerja seperti apa kekuasaan dijalankan dan diatur, serta bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat terjalin.

Dalam kajian ilmu politik, suprastruktur sering kali dipahami dalam konteks hubungan dengan infrastruktur ekonomi dan sosial. Suprastruktur politik dapat mempengaruhi cara kebijakan ekonomi diterapkan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.

Oleh karena itu, pemahaman tentang suprastruktur politik sangat penting untuk menganalisis dinamika kekuasaan dan proses pengambilan

keputusan di tingkat nasional maupun lokal.

Aspek-aspek dalam suprastruktur politik diantaranya:

- Lembaga Pemerintahan
  Seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjalankan fungsi pemerintahan.
- Hukum dan Peraturan
  Kerangka hukum yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.
- Partai Politik
  Organisasi yang berfungsi untuk mewakili kepentingan tertentu dalam proses politik.
- Norma Sosial dan Budaya
  Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan sistem politik.

Salah satu pemikir terkemuka dalam suprastruktur politik adalah Karl Marx. Marx menggunakan istilah "suprastruktur" dalam teorinya tentang hubungan antara basis ekonomi (infrastruktur) dan suprastruktur. Menurut Marx, suprastruktur dibentuk oleh kondisi material masyarakat, dan mencerminkan kepentingan kelas dominan. Dalam pandangannya, perubahan pada basis ekonomi akan mengarah pada perubahan dalam suprastruktur politik dan sosial.

a. Hubungan antara Suprastruktur dengan Infrastruktur

   Dalam teori Marxian, infrastruktur merujuk pada basis ekonomi produksi, tenaga kerja, dan hubungan produksi, sementara suprastruktur mencakup semua hal di luar itu.

   Marx berpendapat bahwa infrastruktur menentukan karakter suprastruktur. Misalnya, sistem kapitalis akan menghasilkan

lembaga-lembaga politik yang mendukung kepentingan kapitalis. Sebagai contoh, bursa saham hanya mungkin ada jika design perekonomian dunia adalah kapitalisme.




b. Fungsi Suprastruktur

Suprastruktur memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- Legitimasi Kekuasaan: Suprastruktur membantu memberikan legitimasi kepada kekuasaan yang ada, baik melalui hukum maupun norma sosial.
- Pengendalian Sosial: Melalui lembaga-lembaga seperti polisi dan sistem peradilan, suprastruktur dapat mengendalikan perilaku




individu untuk menjaga ketertiban.

- Reproduksi Sosial: Suprastruktur juga berperan dalam reproduksi nilai-nilai dan norma-norma sosial dari generasi ke generasi.

c. Perubahan Suprastruktur

Ketika terjadi perubahan sosial, revolusi, atau reformasi, seringkali suprastruktur mengalami transformasi signifikan. Misalnya, perubahan dari monarki ke demokrasi akan mengubah lembaga-lembaga pemerintahan serta hukum yang ada.

Dalam konteks modern, negara-negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda menunjukkan bagaimana suprastruktur politik dapat bervariasi. Misalnya, negara-negara demokratis memiliki lembaga perwakilan rakyat yang kuat. Sementara, negara otoriter dimungkinkan memiliki kontrol ketat terhadap partai politik dan media.

Secara keseluruhan, suprastruktur politik adalah elemen kunci dalam memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan menganalisis suprastruktur, dapat diperoleh wawasan lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik mereka.

Suprastruktur politik sebuah negara sangat mungkin berbeda dari negara lain, meskipun mengadopsi sistem dasar yang sama. Namun,

dalam implementasi, dimungkinkan ada berbagai variasi sesuai dengan adaptasi sebuah sistem di suatu lingkungan sosial politik tertentu.

Untuk pemahaman yang lebih jelas dan mudah, di bawah ini akan diuraikan secara praktis dan ringkas mengenai penerapan suprastruktur di beberapa negara. Penulis memilih 5 negara yang memiliki sistem politik berbeda sehingga dapat memperkaya wawasan pembaca.

Kelima negara tersebut adalah Amerika sebagai negara Republik Presidensial. Kemudian Arab Saudi yang secara sistem politik pemerintahan berada pada titik esktrem yang berlawanan dengan Amerika, yaitu Monarki Absolut. Ketiga, Inggris yang mewakili Monarki Konstitusional. Selanjutnya, Iran yang mewakili Teokrasi Konstitusional, dan yang terakhir adalah Tiongkok, yang menegaskan diri sebagai negara Komunis.

Kajian politik lima negara ini akan diawali dengan sejarah singkat masing-masing negara untuk mendapatkan perspektif perkembangan sebuah bangsa sepanjang bisa dilacak hingga pada masa terkini. Selanjutnya, akan diuraikan struktur politik di negara-negara tersebut untuk melihat apakah pilihan politik kenegaraan kontemporer suatu negara merupakan kontinuitas atas sejarah masa lalunya, ataukah merupakan hal yang sama sekali baru.

## 1. Amerika Serikat

### Sejarah Amerika: Dari Masa Kolonialisme hingga Deklarasi Kemerdekaan

#### Masa Kolonialisme (1607 - 1776)

Sejarah Amerika Serikat dimulai dengan kedatangan penjajah Eropa, terutama Inggris, yang mendirikan koloni pertama di Jamestown, Virginia, pada tahun 1607. Selama abad ke-17 dan ke-18, Inggris mendirikan 13

koloni, yang memiliki keberagaman dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Beberapa koloni bergantung pada pertanian (seperti koloni Selatan) dan yang lainnya pada perdagangan dan industri (seperti koloni Utara).

Kehidupan di koloni sering kali dipengaruhi oleh kebijakan Inggris, termasuk pajak dan regulasi yang diterapkan tanpa perwakilan rakyat koloni dalam parlemen Inggris. Ketidakpuasan ini mulai tumbuh di kalangan rakyat koloni, yang merasa bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara Inggris dilanggar.

Hal itu kemudian menimbulkan ketegangan hingga pecah perang selama tujuh tahun. Setelah Perang Tujuh Tahun (1756-1763), Inggris berusaha untuk mengurangi utangnya dengan mengenakan pajak baru kepada koloni. Beberapa undang-undang yang kontroversial termasuk Sugar Act (1764) dan Stamp Act (1765), yang memicu protes besar-besaran di kalangan rakyat koloni.

Slogan *"No taxation without representation"* (tanpa pajak tanpa perwakilan) menjadi seruan utama untuk menuntut hak-hak mereka. Ketegangan semakin meningkat dengan insiden seperti Boston Massacre pada tahun 1770 dan Boston Tea Party pada tahun 1773, yaitu rakyat koloni membuang teh ke pelabuhan sebagai protes terhadap pajak teh. Tindakan-tindakan ini menyebabkan Inggris memberlakukan Intolerable Acts, yang semakin memperburuk hubungan antara koloni dan pemerintah Inggris.

**Perang Revolusi dan Pembentukan Konfederasi**

Pada tahun 1775, pertempuran pertama antara pasukan koloni dan Inggris terjadi di Lexington dan Concord, menandai awal Perang Revolusi Amerika. Rakyat koloni membentuk Continental Army yang dipimpin oleh George Washington. Kemudian di tahun 1776, para pemimpin koloni

mulai mempertimbangkan kemerdekaan secara serius.

Pada tanggal 4 Juli 1776, Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani oleh para wakil dari semua 13 koloni di Philadelphia. Dokumen ini, yang ditulis oleh Thomas Jefferson, menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan serta mengumumkan pemisahan dari Inggris.

Setelah deklarasi kemerdekaan, negara-negara bagian mulai bergabung untuk membentuk sebuah konfederasi. Pada tahun 1781, Articles of Confederation disetujui sebagai kerangka kerja pemerintahan sementara. Namun, sistem ini memiliki kelemahan signifikan karena memberikan kekuasaan terbatas kepada pemerintah pusat dan tidak memungkinkan pengumpulan pajak atau pengaturan perdagangan antar negara bagian.

Kelemahan ini memicu perdebatan tentang perlunya pemerintahan yang lebih kuat, yang akhirnya mengarah pada Konvensi Konstitusi pada tahun 1787. Konvensi ini menghasilkan Konstitusi Amerika Serikat yang baru dan mendirikan sistem pemerintahan federal yang lebih kuat.



**Amerika di Era Kontemporer**

Amerika Serikat adalah salah satu negara utama yang paling berpengaruh di dunia. Amerika adalah pemenang Perang Dunia ke II, yang membuatnya merasa memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan dunia. Sebagai negara utama dan adikuasa, Amerika memiliki pangkalan militer di seluruh kawasan di dunia. Bahkan Amerika menjadi negara dengan tingkat perekonomian nomor satu di dunia. Amerika memperkenalkan demokrasi dan kapitalisme serta mengkampanyekan kedua hal itu, dengan harapan demokrasi dan kapitalisme diadopsi oleh sebanyak mungkin negara-negara di dunia.

Demokrasi Amerika berangkat dari situasi dan kondisi internal Amerika yang mayoritas penduduknya adalah imigran dari Eropa. Sebelum kedatangan para imigran Eropa, tanah Amerika dianggap "tanah kosong" meskipun ada penduduk asli di sana. Tapi, jumlah penduduk asli relatif kecil dan belum ada kekuatan komunal yang besar serta meluas yang mengelola tanah dan masyarakat lokal.

Tidak ada infrastruktur sosial sebelumnya -misalnya Kerajaan yang memungkinkan untuk mengelola sebuah wilayah yang luas dan jumlah populasi yang besar dalam komunitas yang beragam. Oleh karena itu, Amerika merumuskan sebuah sistem demokrasi yang adaptif terhadap kondisi internalnya.

Sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat (AS) adalah salah satu yang paling kompleks dan berpengaruh di dunia. Dengan struktur yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, sistem ini menggabungkan elemen-elemen federalisme, pemisahan kekuasaan, dan checks and balances, dengan semangat kapitalisme.

**A. Struktur Pemerintahan**

Sistem pemerintahan AS adalah Republik Federal yang terdiri dari tiga

cabang utama, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

**1. Eksekutif**

- Presiden

  Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memimpin angkatan bersenjata, dan mengelola kebijakan luar negeri. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh Kongres.

  a. Kantor Eksekutif Presiden

     Terdiri dari berbagai lembaga yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya, termasuk:

     - Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB): Mengelola anggaran federal dan menilai dampak kebijakan.
     - Dewan Keamanan Nasional (NSC): Memberikan nasihat mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.
     - Dewan Ekonomi Nasional (NEC): Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi.

  b. Departemen Federal

     Terdiri dari berbagai departemen yang masing-masing memiliki tanggung jawab khusus, seperti:

     - Departemen Pertahanan (DoD): Bertanggung jawab terhadap keamanan nasional dan pengelolaan angkatan bersenjata.
     - Departemen Pendidikan: Mengelola program pendidikan dan memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah.
     - Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia (HHS): Mengelola program kesehatan publik dan layanan sosial.

**2. Legislatif**

a. Kongres

   Terdiri dari dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan

Rakyat.

- Senat

  Memiliki 100 anggota yang menjabat selama enam tahun. Senat bertugas untuk menyetujui perjanjian internasional, konfirmasi pengangkatan Presiden, dan melakukan pemakzulan.

- Dewan Perwakilan Rakyat

  Terdiri dari 435 anggota yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Dewan ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengontrol anggaran, dan mengawasi eksekutif.

b. Badan Legislatif Khusus, antara lain:

- Biro Anggaran Kongres (CBO): Memberikan analisis independen tentang anggaran federal.
- Badan Akuntabilitas Pemerintah (GAO): Mengawasi penggunaan dana publik.



**3. Yudikatif**

a. Mahkamah Agung

Merupakan pengadilan tertinggi di AS yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi dan membatalkan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Mahkamah Agung terdiri dari sembilan hakim yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat.

b. Pengadilan Federal

Termasuk pengadilan distrik dan pengadilan banding yang menangani kasus-kasus federal. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas pelanggaran hukum federal dan sengketa antara negara bagian.

c. Pusat Yudisial Federal

Menyediakan pendidikan dan penelitian bagi sistem peradilan federal serta mendukung administrasi pengadilan.

## B. Federalisme

Amerika Serikat menerapkan sistem federalisme, yang berarti kekuasaan dibagi menjadi pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Setiap negara bagian memiliki konstitusi sendiri, lembaga pemerintahan, dan hukum yang dapat berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya.

Meskipun pemerintah federal memiliki kekuasaan tertentu yang diatur dalam Konstitusi, negara bagian juga menjalankan otonomi dalam banyak hal, termasuk pendidikan, transportasi, dan penegakan hukum.

## C. Pemisahan Kekuasaan dan Checks and Balances

Salah satu prinsip dasar dalam sistem politik AS adalah pemisahan kekuasaan. Ini berarti bahwa ketiga cabang pemerintahan beroperasi secara independen tetapi saling terkait untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan.

- Prinsip Checks and Balances

  Setiap cabang memiliki mekanisme untuk mengawasi cabang lainnya. Misalnya, meskipun Presiden dapat mengeluarkan veto terhadap undang-undang yang disetujui oleh Kongres, veto tersebut bisa dibatalkan kongres dengan suara mayoritas dua pertiga dari kedua kamar. Selain itu, Mahkamah Agung dapat meninjau tindakan eksekutif atau legislatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.

## D. Proses Pemilihan Umum

Proses pemilihan umum di AS melibatkan berbagai tingkat pemilihan, mulai dari pemilihan lokal hingga pemilihan presiden. Pemilihan presiden dilakukan setiap empat tahun dengan menggunakan sistem Electoral College, yaitu setiap negara bagian memiliki jumlah suara elektoral berdasarkan populasi mereka. Pemilih di setiap negara bagian memberikan suara untuk kandidat presiden berdasarkan hasil pemilihan populer di negara bagian tersebut.

## E. Partai Politik

Sistem politik AS didominasi oleh dua partai besar: Partai Demokrat dan Partai Republik. Meskipun ada partai-partai kecil lainnya, sistem dua partai ini telah menjadi norma dalam politik AS. Partai-partai ini memiliki platform yang berbeda mengenai isu-isu seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebijakan luar negeri.

## F. Lobby dan Kelompok Kepentingan

Kelompok lobi dan kepentingan memainkan peran besar dalam politik Amerika. Mereka mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan legislatif melalui berbagai cara, termasuk sumbangan kampanye, lobi langsung, dan kampanye media.

## G. Kementerian di Amerika

Amerika memiliki struktur kementerian yang ramping sehingga efisien. Meskipun bukan contoh ideal negara yang mengadopsi prinsip small government, big welfare, Amerika bisa menjadi contoh yang baik.

Konsep small government, big welfare merujuk pada pendekatan dalam kebijakan publik yang pemerintahnya relatif kecil tetapi tetap menyediakan program kesejahteraan sosial yang luas dan komprehensif.

Pendekatan ini sering kali bertujuan untuk meminimalkan intervensi pemerintah dalam kehidupan sehari-hari warga negara sambil memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan dasar yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka.

**Prinsip Dasar *"Small Government, Big Welfare"***

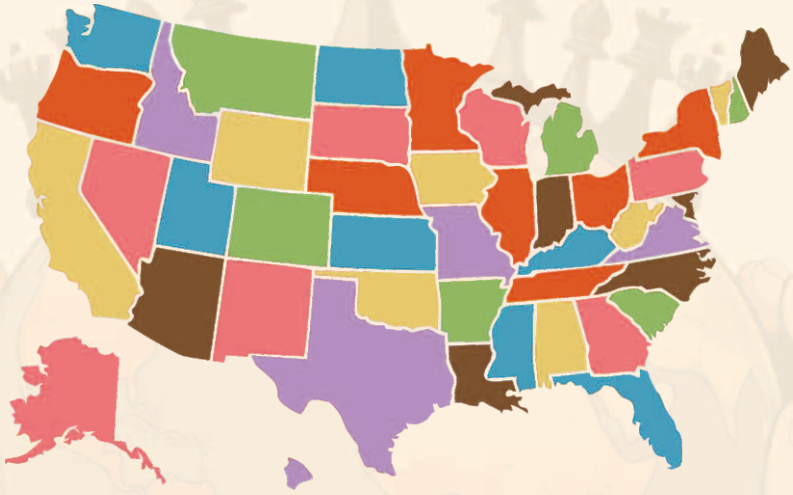

- Ukuran Pemerintah

  Dalam konteks ini, small government berarti bahwa pemerintah berusaha untuk mengurangi ukuran dan perannya dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat. seperti pengurangan regulasi, pengurangan

pajak, dan pengurangan pengeluaran pemerintah di luar program kesejahteraan.

- Kesejahteraan Sosial
  Sementara itu, "big welfare" menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kecil, ia tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan kesejahteraan yang signifikan. Layanan tersebut mencakup program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan dukungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sebagai negara dengan luas 9,83 juta km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 341 juta, Amerika mengimplementasikan prinsip small government. Hal ini diterjemahkan dalam jumlah Kementerian di Amerika yang hanya 15 kementerian sebagai berikut:

1. Departemen Negara (Department of State)
   Tugas: Mengelola hubungan luar negeri, diplomasi, dan kebijakan luar negeri AS. Departemen ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi kedutaan besar dan konsulat di seluruh dunia.
2. Departemen Keuangan (Department of the Treasury)
   Tugas: Mengelola keuangan federal, termasuk pengumpulan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan utang negara. termasuk juga mengawasi lembaga keuangan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi.
3. Departemen Pertahanan (Department of Defense)
   Tugas: Bertanggung jawab terhadap keamanan nasional dan pengelolaan angkatan bersenjata AS. Departemen ini mengawasi semua cabang militer dan merencanakan operasi militer.
4. Departemen Kehakiman (Department of Justice)
   Tugas: Mengawasi penegakan hukum federal, termasuk pengadilan federal, serta bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak sipil dan menangani kasus kriminal.
5. Departemen Dalam Negeri (Department of the Interior)

Tugas: Mengelola sumber daya alam, taman nasional, dan tanah publik termasuk juga bertanggung jawab atas urusan suku asli Amerika.

6. Departemen Pertanian (Department of Agriculture)
   Tugas: Mengelola program pertanian, kebijakan pangan, dan program nutrisi. Departemen ini juga memberikan dukungan kepada petani dan peternak.
7. Departemen Perdagangan (Department of Commerce)
   Tugas: Mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat standar perdagangan, dan mengawasi statistik ekonomi, serta membantu bisnis dalam ekspor dan investasi.
8. Departemen Tenaga Kerja (Department of Labor)
   Tugas: Mengawasi kondisi kerja, upah minimum, perlindungan hak-hak pekerja, dan menyediakan pelatihan kerja dan program pengangguran.
9. Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia (Department of Health and Human Services)
   Tugas: Mengelola program kesehatan publik, termasuk Medicare dan Medicaid. Departemen ini juga berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat dan penelitian kesehatan.
10. Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (Department of Housing and Urban Development)
    Tugas: Mengawasi kebijakan perumahan, pembangunan perkotaan, dan program bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Departemen Transportasi (Department of Transportation)
    Tugas: Mengelola infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, dan penerbangan. termasuk keselamatan transportasi.
12. Departemen Energi (Department of Energy)
    Tugas: Mengelola kebijakan energi nasional, penelitian energy terbarukan, dan pengawasan keamanan nuklir.
13. Departemen Pendidikan (Department of Education)



Tugas: Mengawasi sistem pendidikan nasional, memberikan bantuan keuangan kepada pelajar, dan menetapkan standar pendidikan.

14. Departemen Urusan Veteran (Department of Veterans Affairs)
    Tugas: Memberikan layanan kesehatan dan dukungan kepada veteran militer serta keluarga mereka.
15. Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security)
    Tugas: Melindungi negara dari ancaman teroris dan bencana alam, serta mengelola imigrasi dan keamanan perbatasan.

Setiap kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang disebut Sekretaris, diangkat oleh Presiden AS dengan persetujuan Senat. Sekretaris memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah federal di bidang masing-masing.

## 2. Arab Saudi

Arab Saudi adalah salah satu negara monarki absolut di Asia Barat atau oleh Barat disebut Timur Tengah. Saat ini, pemimpin Arab Saudi adalah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dipimpin oleh seorang Raja.Struktur politik Arab Saudi sangat sentralistis, dengan kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh keluarga kerajaan Al Saud. Hukum Syariat Islam menjadi landasan utama bagi hukum nasional, memastikan implementasi nilai-nilai islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

### Awal Sejarah dan Pembentukan Dinasti Al Saud

Sejarah Arab Saudi modern dimulai dengan munculnya Dinasti Al Saud di wilayah Najd pada tahun 1744. Pada saat itu, Muhammad bin Saud, seorang pangeran lokal, menjalin aliansi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama yang mendirikan gerakan Wahhabisme.

Aliansi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang konservatif dan memberantas praktik-praktik Islam yang dianggap



menyimpang. Melalui pernikahan dan perjanjian ini, mereka berhasil mendirikan Emirat Diriyah, yang menjadi cikal bakal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Muhammad bin Saud, dinasti ini mengalami beberapa kali kebangkitan dan kejatuhan. Pada awal abad ke-19, Dinasti Al Saud mengalami kekalahan dari Kekhalifahan Ottoman, tetapi berhasil bangkit kembali di bawah kepemimpinan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud (Ibn Saud).

Tahun 1902, Ibn Saud merebut Riyadh dari penguasa Rasyid, yang menandai awal dari ekspansi wilayah yang lebih luas. Ibn Saud terus melakukan penaklukan dan pada tahun 1926, ia memproklamasikan diri sebagai raja dari Kerajaan Hijaz.

Setelah menyatukan berbagai wilayah di Semenanjung Arab, tahun 1932, ia mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi (Al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah) dan menjadi raja pertama kerajaan tersebut.

**Era Modern dan Perubahan Sosial-Politik (1932 - 1975)**

Sejak berdirinya kerajaan, fokus terpusat pada modernisasi negara dengan membangun infrastruktur dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Ibn Said menerapkan kebijakan detribalisasi untuk mengurangi kekuatan klan-klan tradisional dan memperkuat identitas kenegaraan.

Sepanjang periode ini, Arab Saudi juga mulai mengeksplorasi sumber daya minyaknya. Penemuan minyak pada tahun 1938 di Dammam mengubah perekonomian negara secara drastis dan membawa kekayaan yang signifikan. Arab Saudi menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal industri minyak.

Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang naik takhta pada tahun 1964, melanjutkan modernisasi negara dengan berbagai reformasi sosial dan ekonomi. Ia memperkenalkan pendidikan umum dan meningkatkan peran wanita dalam masyarakat. Namun, pemerintahannya juga diwarnai oleh ketegangan politik internal dan ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu.

Raja Faisal dikenal karena kebijakan luar negerinya yang tegas, termasuk embargo minyak terhadap negara-negara Barat selama Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan harga minyak secara global tetapi juga menimbulkan tantangan bagi negara-negara konsumen.

**Transisi ke Monarki Absolut (1975 - 2024)**

Setelah pembunuhan Raja Faisal pada tahun 1975, putranya (Khalid bin AbdulAziz) menggantikan posisinya. Sejak saat itu, Arab Saudi terus mempertahankan sistem monarki absolut di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja (saat ini Salman bin Abdul Aziz, yang naik tahta pada



tahun 2015).

Di bawah kepemimpinan Salman dan putranya Mohammed bin Salman (MBS), Arab Saudi telah meluncurkan program reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Visi 2030. Visi 2030 bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan diversifikasi ekonomi negara. Program ini mencakup pengembangan sektor pariwisata, investasi dalam teknologi baru, serta peningkatan hak-hak wanita.

Namun, meskipun terjadi reformasi sosial-ekonomi, sistem politik tetap terkonsentrasi pada keluarga kerajaan dengan sedikit ruang untuk oposisi politik atau kebebasan sipil. Ketegangan regional juga tetap ada, terutama terkait dengan konflik di Yaman dan hubungan dengan Iran.

**Sistem Pemerintahan**

Sebagai negara Monarki Absolut, Arab Saudi memiliki struktur pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan Amerika Serikat yang telah dibahas sebelumnya. Monarki Absolut merupakan titik ekstrem yang berseberangan dengan demokrasi liberal ala Amerika. Monarki absolut menitahkan Raja sebagai pemimpin tunggal, hulu semua kebijakan dan aturan yang berlaku.

1. Negara Monarki Absolut
    - Raja Arab Saudi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai raja, dan Muhammad bin Salman (MBS) adalah putra mahkota serta perdana menteri.
    - Dalam sistem ini, raja menggabungkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
    - Semua keputusan penting dibuat oleh raja, yang juga memiliki wewenang untuk memberhentikan atau melantik pejabat pemerintah.

2. Dasar Hukum
    - Al-Qur'an dan Sunnah

      Konstitusi Arab Saudi tidak tertulis secara formal; namun, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dianggap sebagai konstitusi negara. Hukum dasar negara adalah Syariah Islam.
    - Undang-undang dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditafsirkan oleh ulama.

3. Dewan Menteri
    - Dewan Menteri

      Dewan Menteri terdiri dari raja, wakil perdana menteri, dan menteri-menteri lainnya yang ditunjuk oleh raja. Dewan ini bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik.
    - Anggota dewan sebagian besar berasal dari keluarga kerajaan dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya.

4. Majelis Syura (Dewan Konsultasi)
    - Majelis Syura terdiri dari sekitar 150 anggota yang diangkat oleh raja. Meskipun tidak memiliki kekuasaan legislatif formal, majelis ini memberikan saran kepada raja dan Dewan Menteri mengenai isu-isu kebijakan.
    - Anggota majelis berasal dari berbagai latar belakang sosial dan politik, tetapi tidak ada pemilihan umum untuk posisi ini.

5. Sistem Peradilan
    - Arab Saudi memiliki sistem peradilan mahkamah syari'ah, yang menangani perkara-perkara hukum berdasarkan hukum Islam.
    - Pengadilan diangkat oleh raja dan harus independen dalam menjalankan tugasnya.

6. Pembagian Administratif
   - Arab Saudi terbagi menjadi 13 provinsi (mintaqah), masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur (amir) yang ditunjuk oleh raja.
   - Setiap provinsi memiliki dewan daerah yang terdiri dari pejabat pemerintah lokal dan tokoh masyarakat.

7. Partai Politik dan Pemilihan Umum

   Tidak ada partai politik yang diizinkan di Arab Saudi; sistem politik lebih bersifa feodal dengan kekuasaan terpusat pada keluarga kerajaan.
   - Pemilihan umum hanya dilakukan untuk beberapa posisi lokal dan tidak ada pemilihan umum untuk posisi nasional.

     Arab Saudi menjadi monarki absolut karena memiliki latar belakang politik, sosial, dan budaya yang menjadikan bentuk negara seperti itu. Peperangan antar klan sering terjadi, konsekuensi dari banyaknya klan di semenanjung Arab yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan wilayah yang lebih luas. Maka, pilihan menyatukan wilayah yang luas itu di bawah satu pemerintahan tunggal dan absolut bisa jadi merupakan pilihan terbaik saat itu.

**3. Inggris (Britania Raya)**

Inggris yang kita kenal hari ini sebenarnya merupakan gabungan dari "3 negara", yaitu: England, Skotlandia, dan Wales, ditambah Irlandia Utara. Baik Skotlandia maupun Wales memiliki Perdana Menteri, Bendera, dan Lagu Kebangsaan sendiri. Namun, mereka bergabung dalam negara monarki berdaulat Inggris Raya atau United Kingdom.

Inggris muncul sebagai kekuatan global pada akhir abad ke-16, mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas yang meliputi berbagai benua. Kekaisaran Inggris menjadi yang terbesar dalam sejarah, mencakup

wilayah di Amerika Utara, Karibia, Afrika, Asia, dan Pasifik.

Administrasi kolonial ditandai oleh eksploitasi sumber daya dan pendirian jalur perdagangan, yang secara signifikan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi Inggris. Namun, pada era ini juga muncul perlawanan dan pemberontakan di berbagai koloni, yang memicu dorongan untuk kemerdekaan.

**Perkembangan Politik Abad ke-19**

Abad ke-19 ditandai oleh perubahan politik yang signifikan di dalam Inggris itu sendiri. Undang-Undang Reformasi tahun 1832 memperluas hak suara dan memperkenalkan distrik pemilihan baru, meletakkan dasar bagi demokrasi modern.

Kebangkitan partai politik, terutama Partai Konservatif dan Partai Liberal, membentuk politik parlementer. Periode ini juga menunjukkan reformasi sosial sebagai respons terhadap industrialisasi, termasuk hak-hak buruh dan inisiatif kesehatan masyarakat.

**Awal Abad ke-20 dan Perang Dunia**

Awal abad ke-20 didominasi oleh dua Perang Dunia yang berdampak besar pada Inggris. Perang Dunia I (1914-1918) menyebabkan kehilangan jiwa yang signifikan dan tekanan ekonomi, sementara Perang Dunia II (1939-1945) mengakibatkan kehancuran lebih lanjut dan evaluasi ulang peran global Inggris. Setelah Perang Dunia II,banyak koloni memperoleh kemerdekaan, yang berakibat pada gerakan dekolonisasi di seluruh Asia dan Afrika.

**Periode Pasca Perang dan Devolusi (1945 - 1990-an)**

Di era pasca perang, Inggris fokus pada pemulihan ekonominya dan mendirikan kebijakan negara kesejahteraan. Kemenangan Partai Buruh

pada tahun 1945 menghasilkan reformasi sosial yang signifikan, termasuk pendirian Layanan Kesehatan Nasional (NHS). Gerakan untuk devolusi di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara muncul di akhir abad ke-20, yang kemudian menghasilkan pendirian parlemen dan majelis masing-masing pada akhir 1990-an.

**Lanskap Politik Terkini**

Memasuki abad ke-21, Inggris menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, imigrasi, dan ketidaksetaraan ekonomi. Krisis keuangan tahun 2008 memiliki dampak jangka panjang pada kebijakan publik dan stabilitas ekonomi. Pada tahun 2016, referendum menghasilkan suara tipis untuk Brexit—keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa—yang secara resmi dilaksanakan pada 31 Januari 2020. Langkah ini telah mengubah politik Inggris dan hubungannya dengan Eropa.

Hingga tahun 2024, Inggris tetap menjadi monarki konstitusi parlementer dengan perdebatan yang berkelanjutan tentang identitas nasional, otonomi regional, dan perannya di panggung global. Lanskap politik ditandai oleh sistem multi-partai yang didominasi oleh Partai Konservatif dan Partai Buruh, dengan dukungan yang meningkat untuk partai nasionalis di Skotlandia dan Wales yang mengadvokasi kemerdekaan lebih besar.

**Sistem Politik Inggris**

A. Monarki Konstitusional

Inggris menganut monarki konstitusional, yang artinya raja ( saat ini Raja Charles III) atau ratu berfungsi sebagai kepala negara. Meskipun raja memiliki beberapa kekuasaan formal, perannya lebih bersifat simbolis dan seremonial. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri.

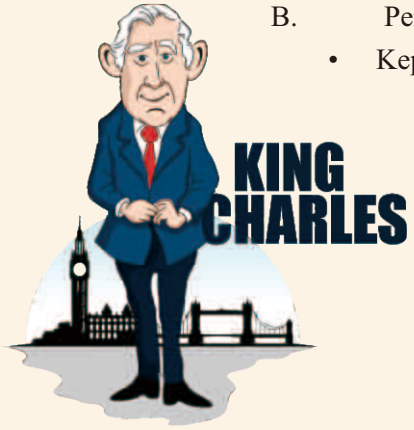


B. Peran Raja

- Kepala Negara: Raja berfungsi sebagai simbol persatuan dan kontinuitas negara.
- Pelantikan Perdana Menteri: Raja mengangkat perdana menteri berdasarkan siapa yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen, umumnya merupakan pemimpin partai pemenang pemilihan umum
- Royal Prerogative: Raja memiliki kekuasaan tertentu yang dikenal sebagai prerogatif kerajaan, seperti pengeluaran paspor dan deklarasi perang, meskipun banyak dari kekuasaan ini dilaksanakan atas nama pemerintah.
- Pertemuan dengan Perdana Menteri: Raja mengadakan pertemuan mingguan dengan perdana menteri untuk membahas isu-isu penting negara.

C. Peran Perdana Menteri

- Kepala Pemerintahan: Perdana menteri adalah pemimpin pemerintah dan bertanggung jawab atas kebijakan dan administrasi negara.
- Pemilihan Menteri: Perdana menteri memilih anggota kabinet dan menteri lainnya, yang bertanggung jawab atas berbagai departemen pemerintahan.
- Pengambilan Keputusan: Perdana menteri memimpin



rapat kabinet untuk merumuskan kebijakan dan keputusan penting.

- Akuntabilitas kepada Parlemen: Perdana menteri harus mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah kepada Parlemen dan dapat dimintai keterangan oleh anggota parlemen.

**4. Iran**

**Sejarah Iran: Dari Masa Lalu hingga Revolusi Islam**

Iran, yang dimasa lalu dikenal sebagai Persia, merupakan salah satu peradaban tertua di dunia, dengan jejak sejarah yang dapat ditelusuri kembali hingga 4000 SM. Pada abad ke-7 SM, Medes menyatukan wilayah Iran sebagai sebuah negara dan kekaisaran. Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh Cyrus Agung (550–330 SM) menjadi kekaisaran terbesar pada masanya, mencakup wilayah dari Balkan hingga Afrika Utara dan Asia Tengah.

Setelah itu, Iran mengalami berbagai invasi dan pemerintahan oleh kekaisaran lain, seperti Seleucus, Parthia, dan Sasanian, sebelum akhirnya mengalami penaklukan oleh bangsa Arab yang membawa Islam pada abad ke-7 M.

**Era Qajar dan Pahlavi**

Setelah periode kekuasaan Sasanian, Iran mengalami banyak perubahan politik dan sosial. Dinasti Qajar (1789–1925) menghadapi banyak tantangan ketika menguasai Iran, termasuk intervensi asing oleh Rusia dan Inggris. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Qajar memuncak dalam Revolusi Konstitusi (1905–1911), yang menghasilkan pembentukan parlemen pertama di Iran.

Pada tahun 1921, Reza Khan, seorang jenderal dalam Brigade Kosak Persia, melakukan kudeta dan mendirikan dinasti Pahlavi. Reza Shah

Pahlavi (1925–1941) memperkenalkan berbagai reformasi modernisasi yang bertujuan untuk mengubah Iran menjadi negara modern dengan mengadopsi hukum Barat dan mengurangi pengaruh agama dalam pemerintahan. Namun, kebijakan-kebijakan ini sering kali ditentang oleh masyarakat tradisional.

**Masa Shah Mohammad Reza Pahlavi**

Setelah pengasingan Reza Shah pada tahun 1941 akibat Perang Dunia II, putranya, Mohammad Reza Pahlavi, naik takhta. Ia melanjutkan kebijakan modernisasi dan sekularisasi melalui program yang dikenal sebagai Revolusi Putih (1963–1979). Program ini mencakup reformasi agraria, pemberdayaan wanita, dan nasionalisasi sumber daya alam. Meskipun berhasil secara ekonomi dalam beberapa aspek, reformasi ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan berbagai kelompok masyarakat, termasuk ulama dan kelas pekerja.

**Revolusi Islam**

Ketidakpuasan terhadap rezim Shah semakin meningkat pada akhir 1970-an. Rakyat merasa bahwa modernisasi yang cepat tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia. Pada tahun 1978, protes besar-besaran dimulai sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap otoriter. Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang pemimpin religius yang berada dalam pengasingan di Prancis, menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Shah.

Revolusi Islam mencapai puncaknya pada 11 Februari 1979 ketika rezim Shah digulingkan dan Republik Islam Iran didirikan. Khomeini kembali ke Iran sebagai pemimpin baru negara tersebut. Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur politik Iran tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Iran.

**Teokrasi di Republik Islam Iran**

Republik Islam Iran, didirikan setelah Revolusi Islam pada tahun 1979, adalah contoh teokrasi dengan kekuasaan politik dan agama yang saling berkelindan. Sistem ini didasarkan pada konsep Wilayat al-Faqih, yang berarti "Kepemimpinan Para Ulama".

Konsep ini menempatkan ulama, khususnya seorang Rahbar (Pemimpin Tertinggi), sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan. Wilayat al-Faqih mengharuskan pemimpin negara harus memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan kemampuan untuk memimpin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

**Struktur Politik di Republik Islam Iran**

Wilayat al-Faqih dirumuskan oleh Imam Khomeini yang menjadikan konsep ini unik dan belum pernah ada. Struktur politik Republik Islam Iran yang mendasarkan pada wilayat al-Faqih terdiri dari beberapa lembaga utama yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dimodifikasi. Berikut adalah uraian struktur politik Republik Islam Iran:

1. Pemimpin Tertinggi (Rahbar):
    - Rahbar adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem politik Iran, dengan masa bakti tanpa batas.
    - Rahbar bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan pengawasan terhadap semua lembaga pemerintah.
    - Rahbar diangkat oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts) yang terdiri atas 88 ulama yang dipilih melalui pemilihan umum setiap delapan tahun sekali. Majelis Ahli juga memiliki wewenang untuk memberhentikan Rahbar jika dianggap tidak memenuhi syarat.

2. Presiden:
    - Presiden adalah kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun dan dapat

menjabat maksimal dua periode berturut-turut.
- Meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif, keputusan penting tetap berada di bawah pengawasan Pemimpin Tertinggi.

3. Majelis Syura Islam (Parlemen):
   - Majelis Syura terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat untuk periode empat tahun.
   - Parlemen bertugas membuat undang-undang, tetapi semua undang-undang harus disetujui oleh Dewan Wali (Guardian Council), yang terdiri dari enam ulama dan enam ahli hukum sipil.

4. Dewan Wali:
   - Dewan ini bertugas untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang diajukan oleh Majelis Syura sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusi.
   - Anggota Dewan Wali diangkat oleh Rahbar dan Ketua Mahkamah Agung.

5. Majelis Ahli:
   - Majelis ini terdiri dari ulama terpilih yang memiliki tanggung jawab untuk memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi (Rahbar)
   - Mereka juga dapat memberhentikan Pemimpin Tertinggi (Rahbar) jika dianggap tidak layak.

6. Kementerian dan Lembaga Eksekutif:
   - Pemerintah Iran memiliki berbagai kementerian yang mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
   - Menteri-menteri biasanya diangkat oleh presiden tetapi harus disetujui oleh Parlemen.

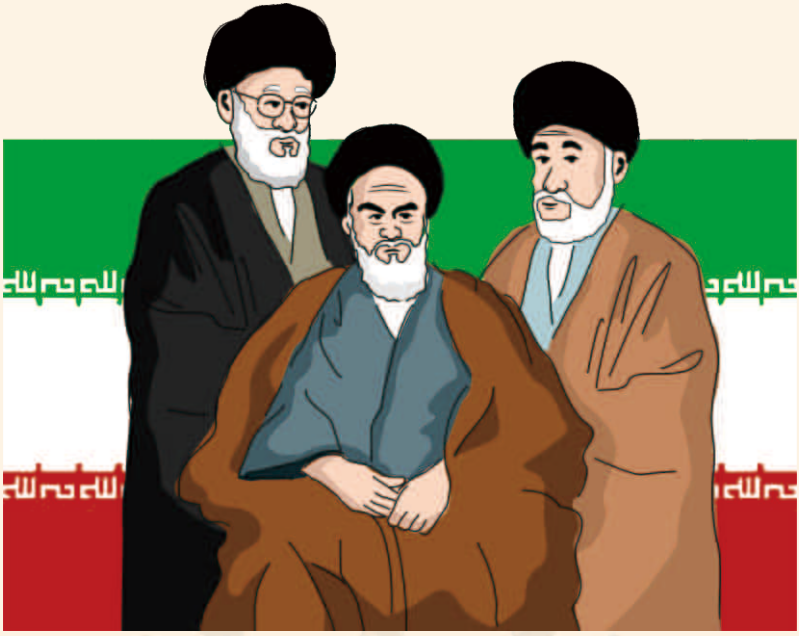

Dari uraian ringkas tentang sejarah dan transformasi Iran dari kekaisaran menuju Republik Islam dan struktur politik di atas, bisa dilihat bagaimana Iran mengembangkan dan memodifikasi secara ekstrem model pemerintahan demokrasi. Pemerintahan Republik demokrasi di Iran menjadi unik dan menyediakan laboratorium pemerintahan berdasarkan teokrasi Islam syiah.

**5. Tiongkok**

Tiongkok, meski saat ini merupakan kekuatan ekomomi terbesar di dunia setelah Amerika. secara mengejutkan diprediksi akan segera menyalip Amerika menjadi nomor satu di dunia dalam satu dekade ke depan.

Lalu seperti apa politik Tiongkok sejak masa pra modern hingga saat ini? Bagaimana revolusi kebudayaan Mao yang dianggap gagal kemudian diubah menjadi kebijakan yang berhasil mentransformasikan Tiongkok

menjadi raksasa hanya dalam waktu 25 tahun?

**Tiongkok: Dari Penyatuan hingga Revolusi Kebudayaan**

Penyatuan Tiongkok dimulai pada tahun 221 SM ketika Kaisar Qin Shi Huang dari Dinasti Qin berhasil menyatukan berbagai negara bagian yang sebelumnya terpecah dalam Perang Negara-negara (The Warring States Period). Ia mendirikan sistem pemerintahan sentral yang kuat, memperkenalkan standar ukuran dan mata uang, serta membangun infrastruktur seperti jalan dan tembok.

Namun, pemerintahannya yang otoriter dan kebijakan-kebijakan yang keras menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat, dan berujung pada keruntuhan dinasti ini setelah kematiannya.

**Dinasti Han (206 SM - 220 M)**

Setelah periode singkat Dinasti Qin, Dinasti Han muncul dan menjadi salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini memperkuat pemerintahan pusat, mengembangkan perdagangan melalui Jalur Sutra, dan mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara. Era Han dikenal sebagai zaman keemasan dalam bidang budaya, ekonomi, dan teknologi.

**Periode Tiga Kerajaan (220 - 280)**

Setelah keruntuhan Dinasti Han, Tiongkok terpecah menjadi tiga kerajaan: Wei, Shu, dan Wu. Meskipun ditandai dengan konflik militer,era ini juga menghasilkan perkembangan dalam sastra dan strategi militer.

**Dinasti Sui dan Tang (581 - 907)**

Dinasti Sui,. walaupun tidak bertahan lama, telah berhasil menyatukan kembali Tiongkok pada tahun 581 M. Dinasti Tang yang menggantikannya (618-907) adalah salah satu periode paling berpengaruh

dalam sejarah Tiongkok, dikenal karena kemajuan budaya, ekonomi, dan seni. Pemerintahan Tang juga memperkuat sistem ujian untuk pegawai negeri yang berbasis pada Konfusianisme.

**Dinasti Song (960 - 1279)**

Dinasti Song melanjutkan tradisi pemerintahan yang kuat dan inovasi teknologi, namun, menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden di utara. Meskipun mengalami kemunduran militer, periode ini dikenal karena kemajuan dalam perdagangan, seni, dan filosofi.

**Invasi Mongol dan Dinasti Yuan (1271 - 1368)**

Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan dan cucunya Kublai Khan berhasil menaklukkan Tiongkok dan mendirikan Dinasti Yuan. Meski membawa stabilitas sementara, pemerintahan Mongol sering kali ditentang oleh rakyat Tiongkok.

**Dinasti Ming (1368 - 1644)**

Didirikan setelah pemberontakan terhadap Mongol, Dinasti Ming merupakan periode ketika Tiongkok mengalami kemajuan pesat dalam bidang seni dan teknologi serta pembangunan tembok besar yang lebih kuat. Sayangnya, korupsi dan ketidakpuasan rakyat menyebabkan keruntuhan dinasti ini.

**Dinasti Qing (1644 - 1912)**

Dinasti Qing adalah dinasti terakhir di Tiongkok yang didirikan oleh Manchu. Pada awalnya, dinasti ini mengalami masa kejayaan dengan ekspansi wilayah yang luas. Namun, pada abad ke-19, Qing menghadapi berbagai tantangan termasuk perang dengan negara-negara Barat (seperti Perang Opium) dan pemberontakan internal seperti Pemberontakan Taiping.

**Awal Abad ke-20: Reformasi dan Revolusi**

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Qing memuncak pada awal abad ke-20 dengan munculnya gerakan reformasi. Pada tahun 1911, Revolusi Xinhai menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912.

**Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Perang Saudara**

Partai Komunis Tiongkok didirikan pada tahun 1921. Kemudian di tahun 1927, terjadi perang saudara (dipimpin oleh Chiang Kai-shek) antara PKT dan Kuomintang (KMT), yang. sebelumnya memerintah Tiongkok. Setelah perang saudara berkepanjangan dan invasi Jepang selama Perang Dunia II, PKT akhirnya berhasil mengalahkan KMT pada tahun 1949.

Sejak saat itu, Partai Komunis menguasai Tiongkok daratan, sementara Chiang Kai-shek menyeberang ke pulau Taiwan dan mendirikan Republik Tiongkok atau lebih dikenal dengan Taiwan. Tiongkok selalu menganggap Taiwan sebagai salah satu propinsinya, sedangkan Taiwan bersikeras bahwa mereka adalah pemerintah yang sah dari Republik Tiongkok.



Hal ini menjadi ketegangan terus-menerus antara Tiongkok daratan dan Taiwan, dan bahkan berpotensi memicu konflik jangka panjang yang suatu saat bisa meletus menjadi perang. Taiwan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Jepang dan Korea Selatan.

**Pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (1949)**

Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggantikan Republik Tiongkok yang sebelumnya dipimpin oleh Kuomintang. Pemerintahan baru ini menerapkan kebijakan komunis dengan fokus pada kolektivisasi pertanian dan industrialisasi.

**Revolusi Kebudayaan (1966 - 1976)**




Revolusi Kebudayaan dimulai pada tahun 1966 sebagai upaya Mao untuk memperkuat ideologi komunis di kalangan rakyat dan membersihkan elemen-elemen yang dianggap borjuis dalam masyarakat.

Gerakan ini melibatkan mobilisasi massa, terutama kaum muda melalui Garda Merah, untuk menyerang elit politik dan budaya yang dianggap tidak setia kepada Mao. Revolusi Kebudayaan berlangsung dalam beberapa tahap:

1. Mobilisasi Kaum Muda
   Para pelajar didorong untuk berpartisipasi aktif dalam revolusi.
2. Perebutan Kekuasaan
   Terjadi konflik antara pendukung Mao dan pejabat partai lainnya.
3. Kekacauan Sosial

Banyak orang ditangkap atau dieksekusi, institusi pendidikan lumpuh total.

**Akhir Revolusi Kebudayaan**

Revolusi Kebudayaan berakhir setelah kematian Mao pada tahun 1976. Selanjutnya Partai Komunis mulai mereformasi kebijakan untuk mengatasi dampak negatif dari revolusi.

**Politik Tiongkok Pasca Mao Zedong hingga 2024**

Kematian Mao Zedong pada tahun 1976 dan akhir Revolusi Kebudayaan, membawa Tiongkok pada periode transformasi politik yang signifikan.

1. Era Reformasi Deng Xiaoping (1978 - 1990-an)

   Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping muncul sebagai pemimpin utama yang mengarahkan Tiongkok menuju reformasi ekonomi dan pembukaan diri. Pada tahun 1978, Deng meluncurkan program "Reformasi dan Pembukaan" yang bertujuan untuk mengubah ekonomi Tiongkok dari sistem terpusat menjadi lebih terbuka dan berbasis pasar.

   - Reformasi Ekonomi

     Deng memperkenalkan kebijakan desentralisasi yang memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah dalam pengelolaan ekonomi. Ia juga mendirikan zona ekonomi khusus (SEZ) seperti Shenzhen untuk menarik investasi asing.
   - Pembangunan Infrastruktur

     Pemerintahan Deng fokus pada pembangunan infrastruktur dan industri, yang mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi.

2. Tragedi Tiananmen dan Konsolidasi Kekuasaan (1989)

   Meskipun reformasi membawa kemajuan ekonomi, ketidakpuasan terhadap korupsi dan kebebasan politik yang dikekang

memicu protes besar-besaran di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Malangnya, protes yang dipimpin oleh mahasiswa menuntut reformasi politik dan kebebasan sipil ini berakhir dengan tragedi berdarah, ribuan orang diduga tewas.

- Penanganan Protes
  Pemerintah Tiongkok menanggapi protes dengan keras, menggunakan kekuatan militer untuk membubarkan demonstrasi. Insiden ini dikenal sebagai Pembantaian Tiananmen, yang menyebabkan ribuan kematian dan penangkapan.
- Konsolidasi Kekuasaan
  Setelah insiden tersebut, Deng dan pemimpin lainnya memperkuat kontrol partai atas masyarakat dan mengekang kebebasan politik untuk mencegah gerakan serupa terjadi lagi.

3. Era Jiang Zemin (1989 - 2002)
   Ketika Jiang Zemin mengambil alih kepemimpinan, Tiongkok terus melanjutkan reformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat.
   - Teori Tiga Perwakilan
     Jiang memperkenalkan konsep "Teori Tiga Perwakilan," yang menyatakan bahwa Partai Komunis harus mewakili kepentingan masyarakat, perkembangan produktif, dan kekuatan budaya maju.
   - Integrasi ke dalam Ekonomi Global
     Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) pada tahun 2001. Kebijakan ini membuka akses Tiongkok ke pasar global dan bagi perdagangan internasional.

4. Era Hu Jintao (2002 - 2012)
   Hu Jintao menggantikan Jiang Zemin dan melanjutkan kebijakan reformasi sambil menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan

pembangunan berkelanjutan.

- Konsep Ilmu Pengetahuan dan Inovasi

  Hu memperkenalkan konsep pembangunan ilmiah yang menekankan inovasi teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sebagian kalangan menyebut hal ini sebagai salah satu pilar komunisme Tiongkok.



- Peningkatan Kesejahteraan Sosial

  Pemerintahan Hu juga fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

5. Era Xi Jinping (2012 - Sekarang)

   Sejak Xi Jinping menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 2012, ia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kontrol partai atas semua aspek kehidupan di Tiongkok.

   - Kampanye Anti-Korupsi

     Xi meluncurkan kampanye besar-besaran untuk memberantas korupsi dikalangan pejabat partai, meskipun banyak kritik

menyatakan bahwa aksi ini juga digunakan untuk menghilangkan lawan politik.

- Penguatan Kontrol Politik
  Xi memperkuat kekuasaan presiden dengan menghapus batasan masa jabatan presiden pada tahun 2018, memungkinkan dia untuk tetap berkuasa lebih lama.
- Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative)
  Xi meluncurkan proyek Belt and Road Initiative (BRI) untuk membangun jaringan infrastruktur global sekaligus memperluas pengaruh ekonomi Tiongkok di seluruh dunia.

**Struktur Politik Tiongkok**

Tiongkok mengadopsi sistem partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Menjadi satu-satunya partai politik yang berkuasa di Tiongok. Semua kebijakan utama dan keputusan politik dibuat oleh PKT. Partai ini. memiliki struktur hierarkis dengan Komite Sentral, Politbiro (badan pengambil keputusan tertinggi), dan Komite Tetap.

Pemimpin tertinggi PKT adalah oleh Sekretaris Jenderal, yang juga menjabat sebagai Presiden China. Saat ini, posisi tersebut dipegang oleh Xi Jinping. Sekretaris Jenderal memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berperan penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Dalam urusan pemerintahan, Presiden Tiongkok bertindak sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Meskip secara formal Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (NPC), proses ini pada dasarnya adalah formalitas, karena keputusan sebenarnya dibuat oleh PKT.

Lembaga lain yang ada di Tiongkok adalah Kongres Rakyat Nasional (NPC), lembaga legislatif tertinggi di China yang terdiri dari sekitar 3.000

anggota. NPC bertanggung jawab untuk menyetujui undang-undang, memilih pejabat utama negara, dan menyetujui anggaran negara. Meskipun NPC terlihat seperti parlemen pada umumnya, kekuasaannya dibatasi oleh kendali PKT. Selain iu, Tiongkok juga memiliki Konferensi Konsultatif Politik Rakyat.

Tiongkok (Chinese People's Political Consultative Conference). CPPCC menjadi badan penasehat yang terdiri dari wakil berbagai sektor masyarakat, termasuk partai politik non-komunis, organisasi masyarakat, dan individu berpengaruh. Meskipun tidak memiliki kekuasaan legislatif, CPPCC memberikan masukan dan saran kepada pemerintah.

**Sistem Hukum dan Peradilan**

Sistem peradilan di Tiongkok berada di bawah pengaruh kuat PKT. Independensi peradilan sangat terbatas dan harus mematuhi arahan partai. Ketua Mahkamah Agung China dipilih oleh NPC, tetapi pada praktiknya dia tunduk pada PKT.



Tiongkok juga mengadakan pemilu untuk memilih anggota kongres rakyat di tingkat lokal, tetapi pemilu ini sangat diatur dan dikendalikan oleh PKT. Pemilu pada tingkat nasional seperti untuk NPC tidak bersifat kompetitif dan lebih merupakan formalitas untuk mengukuhkan keputusan partai.

Dalam kehidupan sehari-hari, PKT mengawasi dan mengontrol berbagai aspek kehidupan di Tiongkok, termasuk media, internet, dan organisasi masyarakat. Sensor dan pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan tidak ada oposisi atau kritik terhadap partai dan pemerintah. Sehingga, semua kelompok kepentingan dan organisasi sosial di Tiongkok harus berafiliasi dengan PKT atau mendapatkan izin dari pemerintah. Organisasi yang tidak terdaftar atau dianggap menentang partai sering kali dilarang atau dibubarkan.

Dari uraian contoh lima negara diatas, bisa disaksikan betapa sistem yang diadopsi oleh suatu negara berbeda dengan negara lain, meskipun memiliki dasar pijakan yang sama.
Trias politica sebagai salah satu prinsip dasar demokrasi diterjemahkan secara berbeda di Amerika, Inggris, maupun Iran. Monarki pun dimaknai secara berbeda antara Inggris dan Arab Saudi. Tiongkok juga mengembangkan model pemerintahan yang unik dan khas.

Dengan demikian, lima negara ini menampilkan gambaran yang berbeda-beda tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan dapat beroperasi dalam konteks yang beragam. Dari demokrasi liberal di AS hingga teokrasi di Iran. Dari monarki absolut di Arab Saudi hingga monarki konstitusional di Inggris. Begitu juga, Republik ala Tiongkok yang dikuasai partai Tunggal. Setiap negara memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial dalam masyarakatnya.





# IV Sistem Ekonomi




Bagian ini membahas tentang sistem ekonomi yang diadopsi oleh negara-negara di dunia. Pada dasarnya, ada dua sistem ekonomi yang dikenal, yaitu: Kapitalis dan Sosialis. Namun, dalam perkembangannya, kedua sistem ekonomi yang saling bertolak belakang tersebut dikembangkan dan melahirkan formula baru, yaitu sistem ekonomi Komunisme, Ekonomi Liberal, dan Ekonomi Campuran.

## Pendahuluan

Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, setiap negara memilih dan menentukan sistem perekonomiannya berlandaskan pada ideologi ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Ideologi ekonomi merupakan seperangkat keyakinan dan prinsip yang mendasari cara suatu masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Ideologi ini berfungsi sebagai pedoman bagi kebijakan ekonomi dan keputusan yang diambil oleh individu, pemerintah, maupun lembaga di negara tersebut.

Tujuan utama dari ideologi ekonomi adalah untuk menciptakan sistem yang diharapkan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Berbagai ideologi ekonomi lahir sebagai respons terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat sepanjang sejarah.

Memahami berbagai ideologi ekonomi yang ada di dunia akan memberikan wawasan dan perspektif tentang bagaimana negara dikelola dan pilihan apa yang terbaik untuk suatu negara. Ini karena masing-masing ideologi memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara negara beroperasi dan bagaimana masyarakat berinteraksi dalam proses ekonomi.

Pada bagian ini, akan diuraikan ideologi-ideologi ekonomi di dunia, baik yang masih eksis maupun yang sudah tidak ada lagi . Kemudian, akan dijelaskan pula negara-negara yang mengadopsi ideologi-ideologi tersebut untuk memberi gambaran relasi praktek ideologi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang dicapai.

**Ideologi-Ideologi Ekonomi di Dunia**

Di dunia ini, terdapat beberapa ideologi ekonomi yang berpengaruh kuat. Masing-masing ideologi memiliki ciri khas dan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai ideologi-ideologi ekonomi utama yang ada di dunia saat ini.

1. **Kapitalisme**

   Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Alat-alat produksi sendiri merujuk pada semua sumber daya, peralatan, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, alat-alat produksi mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk menciptakan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Contoh alat produksi diantaranya adalah sumber daya alam (bahan tambang, air, hamparan tanah, dan sebagainya), modal (mesin produksi, bangunan pabrik, alat transportasi, gudang, dan sebagainya), tenaga kerja, dan juga teknologi.

Dalam sistem ini, individu atau perusahaan swasta memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk keuntungan pribadi. Ciri-ciri kapitalisme meliputi:

- Kepemilikan Pribadi
  Alat-alat produksi dimiliki oleh individu atau entitas swasta.
- Pasar Bebas
  Harga dan distribusi barang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran.
- Persaingan
  Terjadi persaingan antara perusahaan untuk menarik konsumen, yang mendorong inovasi dan efisiensi.

Kapitalisme lahir dari teori yang dikembangkan oleh Adam Smith pada buku yang berjudul The Wealth of Nations. Namun, seiring perjalanan waktu, kapitalisme versi Smith mengalami koreksi menyesuaikan dengan perkembangan sosial-politik.



Dua tokoh utama kapitalisme, yaitu:

- Adam Smith

  Adam Smith sering dianggap sebagai salah satu tokoh utama kapitalisme karena karyanya The Wealth of Nations. Smith memperkenalkan konsep laissez-faire, prinsip ekonomi yang mendorong pemerintah untuk tidak campur tangan dalam urusan bisnis. Konsep ini menjadi dasar bagi sistem pasar bebas yang menjadi karakter utama kapitalisme klasik.

- John Maynard Keynes

  Meski bukan penggagas awal kapitalisme. John Maynard Keynes memiliki peran penting dalam evolusi teori ekonomi pasca-periode Depresi Besar tahun 1930an. Keynes membangun teori untuk merevisi konsep klasik Adam Smith dengan mempertimbangkan intervensi makro ekonomi pemerintah untuk stabilisasi ekonomi.

  Kelak, teorinya kemudian dikenal dengan sebutan "Keynessian". Teori ini membantu menyelamatkan kapitalisme dari kritik keras yang timbul setelah Depresi Besar. Kapitalisme telah menjadi ideologi dominan di banyak negara, terutama di negara-negara Barat, dan seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

**2. Sosialisme**

Sosialisme adalah ideologi ekonomi dan sosial yang menekankan kepemilikan kolektif atau publik atas alat-alat produksi dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ideologi ini muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, terutama setelah revolusi industri yang menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan antara kaum borjuis (pemilik modal) dan proletar (kaum buruh) waktu itu. Sosialisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat

yang lebih adil dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Sosialisme mulai berkembang pada akhir abad ke-18 di Eropa sebagai reaksi atas kapitalisme dan kritik terhadap kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi pekerja selama revolusi industri. Pada awalnya, sosialisme muncul dalam bentuk utopis, ketika para pemikir seperti Owen dan Fourier mengusulkan model-model ideal untuk masyarakat tanpa kelas.

Utopia ini sebatas wacana. Tak ubahnya seperti impian belaka. Hingga kemudian muncul pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang memberi kerangka operasional. Pasca Marx-Engels, sosialisme bertransformasi menjadi gerakan politik yang lebih terorganisir. Marx berargumen bahwa perubahan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan ide-ide utopis. Sebaliknya, diperlukan revolusi kelas untuk menggulingkan sistem kapitalis.



Setelah revolusi Rusia pada tahun 1917, sosialisme mendapatkan momentum besar ketika kelompok Bolshevik di bawah pimpinan Lenin berhasil mendirikan negara sosialis pertama di dunia. Ini memicu gelombang adopsi sosialisme di berbagai negara lain, terutama di abad ke-20.

Dalam sistem sosialis, pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan mengendalikan produksi dan distribusi barang untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Ciri-ciri utama sosialisme meliputi:

- Kepemilikan Publik
  Alat-alat produksi dimiliki oleh negara atau kolektif masyarakat.
- Perencanaan Ekonomi
  Pemerintah merencanakan dan mengatur kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Pemerataan Kesejahteraan
  Fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Penggagas Sosialisme

Sosialisme lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai gagasan dan aksi setelah melalui banyak pemikir dan tokoh. Namun, ada beberapa tokoh utama dalam pengembangan sosialisme, antara lain:

- Robert Owen
  Dia seorang industrialis asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu pelopor sosialisme utopis. Owen percaya bahwa lingkungan sosial dapat membentuk perilaku manusia dan mengusulkan pembentukan komunitas berdasarkan prinsip-prinsip kolektivisme.
- Karl Marx dan Friedrich Engels
  Keduanya adalah tokoh paling terkenal dalam pemikiran

sosialisme, terutama melalui karya mereka The Communist Manifesto dan Das Kapital. Marx dan Engels mengembangkan teori bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, dimana kaum proletar (buruh) harus berjuang untuk merebut alat produksi dari borjuis (pemilik modal).

- Saint Simon dan Charles Fourier
  Keduanya adalah pemikir Prancis yang juga berkontribusi pada pemikiran sosialisme. Fourier mengembangkan konsep asosiasi sosial, sedangkan Saint Simon menekankan pentingnya organisasi industri dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik.

**3. Komunisme**

Komunisme bukan murni ideologi ekonomi, melainkan formulasi dari ideologi politik dan ekonomi sebagai wujud ekstrem dari sosialisme yang mengusung gagasan tentang masyarakat tanpa kelas. Dalam komunisme, tidak ada kepemilikan pribadi atas barang-barang produksi. Semua keputusan ekonomi diambil secara kolektif dengan harapan menciptakan masyarakat yang setara dan adil.

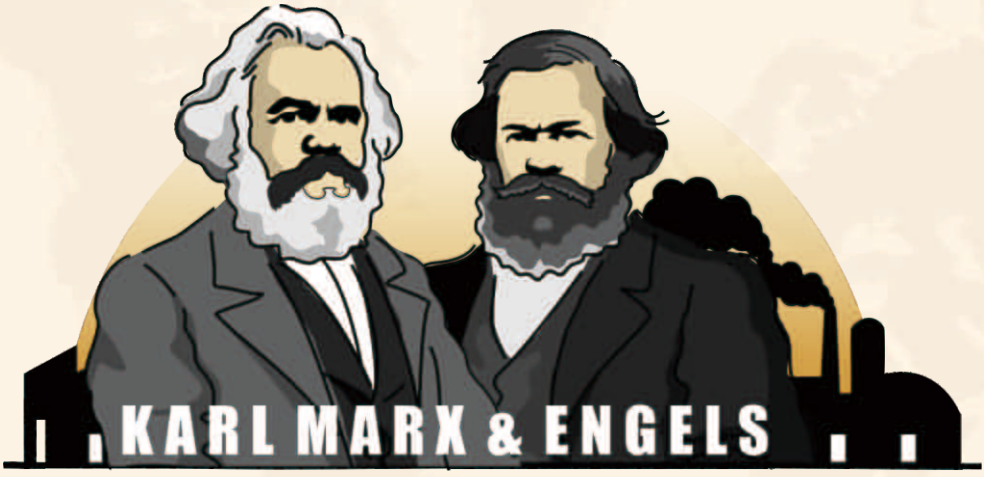

Komunisme mulai berkembang sebagai reaksi terhadap kondisi sosial dan ekonomi akibat revolusi industri pada abad ke-19. Ketidakadilan yang dialami oleh buruh, termasuk eksploitasi dan ketidakberdayaan mereka di hadapan pemilik modal, menjadi latar belakang penting bagi lahirnya ideologi ini.

Pada tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan Manifesto Komunis, yang menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik. Dalam manifesto tersebut, Marx dan Engels menjelaskan perjuangan kelas sebagai inti dari sejarah manusia dan menyerukan proletariat untuk bersatu melawan borjuasi.

Selanjutnya, pada tahun 1867, Marx menerbitkan karya monumental Das Kapital, dimana ia menganalisis sistem kapitalis dan menjelaskan bagaimana akumulasi modal menyebabkan kesenjangan sosial. Gagasan-gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi teori Marxisme, yang digunakan oleh banyak gerakan komunis di seluruh dunia.

Ciri-ciri utama komunisme meliputi:

- Kepemilikan bersama
  Semua alat produksi dimiliki oleh masyarakat tanpa kelas sosial.
- Penghapusan uang
  Dalam tahap akhir komunisme, uang akan dihapuskan sebagai alat tukar.
- Distribusi berdasarkan kebutuhan
  Barang dan jasa didistribusikan berdasarkan kebutuhan individu, bukan berdasarkan kemampuan membayar.

Tokoh-tokoh penting dalam Komunisme

- Karl Marx

  Sebagai penggagas utama ideologi komunis, Marx mengembangkan teori perjuangan kelas dan analisis kritis terhadap kapitalisme.
- Friedrich Engels

  Berkolaborasi dengan Marx dalam penulisan Manifesto Komunis dan memberikan dukungan finansial serta intelektual untuk gerakan komunis.
- Vladimir Lenin

  Pemimpin Bolshevik yang memimpin Revolusi Rusia pada tahun 1917. Lenin menerapkan ide-ide Marx dalam konteks Rusia dan mengembangkan teori revolusi proletariat.
- Joseph Stalin

  Pengganti Lenin yang menerapkan kebijakan industrialisasi cepat dan kolektivisasi pertanian di Uni Soviet, meskipun dengan metode yang dinilai represif.
- Mao Zedong

  Pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang menerapkan komunisme dengan pendekatan agraris, berbeda dengan model pendekatan industry di Soviet.



Implementasi Komunisme

Komunisme pertama kali diimplementasikan secara resmi setelah Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Di bawah kepemimpinan Lenin, negara sosialis-komunis pertama di dunia didirikan, yang dikenal sebagai Uni Soviet. Pada periode ini, pemerintah mengambil alih semua alat produksi dan mengaplikasikan sistem ekonomi terencana. Setelah itu, komunisme menyebar ke berbagai negara lain. Negara-negara yang mengadopsi komunisme umumnya adalah negara-negara yang mengorbit ke Uni Soviet, seperti:

- Tiongkok

  Setelah Perang Saudara Tiongkok berakhir pada tahun 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dengan model komunisme yang berfokus pada pertanian.
- Kuba

  Di bawah Fidel Castro setelah revolusi 1959, Kuba mengadopsi sistem komunis dengan nasionalisasi industri dan reformasi agraria.



- Vietnam

  Vietnam Utara menerapkan komunisme, di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh,setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975.
- Negara-Negara Eropa Timur

  Negara-negara eks Soviet di Eropa Timur seperti Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, dan Rumania, dan sebagainya, mengadopsi komunisme setelah Perang Dunia II sebagai bagian dari pengaruh Uni Soviet.
- Sedangkan di Asia Tengah

  Eks Uni soviet di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan sebagainya, menghadopsi komunisme hingga runtuhnya Uni Soviet 1991.

| No | Item | Sosialisme | Komunisme |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepemilikan Pribadi | Sosialisme masih mengakui kepemilikan pribadi, seperti pakaian atau rumah. Artinya, individu dapat memiliki properti pribadi namun dengan aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. | Komunisme menganggap tidak ad kepemilikan pribadi. Semu properti dimiliki secara bersam oleh negara atau masyarakat, da distribusi kebutuhan dasar seper makanan, rumah, dan kebutuha medis disediakan oleh pemerinta pusat |
| 2 | Kebebasan Beragama | Sosialisme biasanya memberikan kebebasan beragama yang lebih luas. Individu dapat mempraktikkan agama apa pun tanpa gangguan dari pemerintah. | Negara komunis biasanya tida memberikan kebebasan beragam Pemerintah seringkali mengatu dan mengkontrol prakti keagamaan untuk memastika bahwa tidak ada ancaman terhada ideologi komunis. |

| No | Item | Sosialisme | Komunisme |
|---|---|---|---|
| 3 | Status Sosial | Sosialisme menyatakan bahwa ada perbedaan status sosial di masyarakat. Artinya, Sebagian orang memungkinkan memiliki kekayaan yang lebih dibandingkan dengan orang lain, tetapi pemerintah berusaha untuk mengurangi kesenjangan melalui program-program sosial. | Komunisme menyatakan bahw semua orang itu sama kelasny Sistem ini berusaha untu menghapuskan perbedaan kel sosial dengan cara mengalihka kepemilikan alat produksi da individu ke masyarakat secar keseluruhan |
| 4 | Metode Mencapai Tujuan | Sosialisme mendorong perubahan dan reformasi melalui proses demokrasi di dalam struktur sosial dan politik. Reformasi ini dilakukan tanpa menggulingkan struktur sosial yang ada. | Komunisme dikenal sebag sosialisme revolusioner. Sistem in muncul sebagai reaksi terhada Revolusi Industri dan mencap akhir yang ekstrim dengan ca revolusi kekerasan. Para peker naik melawan kelas menengah da kelas atas untuk mencapai nega yang murni komunis |

## 4. Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal seringkali dianggap sama dan sebangun dengan kapitalisme, tapi sesungguhnya ada perbedaan diantara keduanya. Ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, dimana pasar bebas berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi liberal idealnya sangat membatasi peran pemerintah dalam perekonomian.

Sementara dalam kapitalisme, peran pemerintah masih dimungkinkan. Kendati dibatasi. Prinsip-prinsip utama dari ekonomi liberal mencakup kebebasan berusaha, hak milik pribadi, dan persaingan yang sehat.

Asal-usul ekonomi liberal dapat ditelusuri kembali dari periode pencerahan di Eropa pada abad ke-18. Di masa itu, banyak pemikir mulai menantang ide-ide feodalisme dan mengadopsi gagasan tentang kebebasan individu dan hak asasi manusia.

Revolusi industri yang dimulai pada akhir abad ke-18 juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi liberal dengan menciptakan kebutuhan akan sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya.

Para ekonom pun mulai merumuskan formula-formula yang saat itu dianggap efektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Diantara para ekonom yang menggagas ekonomi neo-liberal adalah Adam Smith dan John Stuart Mill.

Adam Smith adalah tokoh paling terkenal dalam pengembangan teori kapitalisme sekaligus ekonomi liberal. Dalam karyanya The Wealth of Nations yang terbit pada tahun 1776, Smith mengemukakan argumen bahwa pasar bebas, jika dibiarkan beroperasi tanpa campur tangan pemerintah, akan menghasilkan output yang optimal bagi masyarakat.

Konsep invisible hand (tangan tak terlihat) yang diperkenalkannya menggambarkan bagaimana individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka dapat secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan John Stuart Mill dianggap sebagai penggagas liberalisme klasik, menekankan pentingnya kebebasan individu dan hak-hak sipil. Dalam bukunya On Liberty (1859), Mill berargumen bahwa masyarakat harus melindungi kebebasan individu dari

penindasan oleh pemerintah atau mayoritas.

Ekonomi liberal mulai diterapkan secara luas pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya industrialisasi di Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi liberal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tidak bisa disangkal, liberalisasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh revolusi industri. Revolusi industri menciptakan perubahan besar dalam cara produksi dan distribusi barang, membawa dampak signifikan terhadap penerapan ekonomi liberal. Dengan meningkatnya produksi barang dan berkembangnya pasar, prinsip-prinsip pasar bebas semakin diterima.

Sistem ekonomi liberal mendapatan tekanan selama periode Depresi Besar pada tahun 1930-an. Tekanan ini melahirkan koreksi atas ekomi liberal klasik oleh John Maynard Keynes. Salah satu yang terpenting dalam teorinya, Keynesian, ialah menginput unsur intervensi pemerintah. Pasca perang dunia ke II, teori Keynessian ini diadopsi oleh banyak negara.

**Perbedaan Kapitalisme dengan Ekonomi Liberal**

**Pengertian**

- Kapitalisme

  Kapitalisme adalah sistem ekonomi dengan alat produksi dimiliki secara pribadi oleh individu atau perusahaan swasta. Dalam sistem ini, tujuan utama adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui pasar bebas, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kapitalisme mencakup berbagai model, termasuk kapitalisme laissez-faire, yang artinya pemerintah memiliki peran

minimal dalam ekonomi.

- Ekonomi Liberal

  Ekonomi liberal adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Meskip sering dikaitkan dengan kapitalisme, ekonomi liberal mengizinkan intervensi terbatas pemerintah untuk mencegah monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar

Prinsip-Prinsip

- Kapitalisme:
  a. Kepemilikan Pribadi
     Alat produksi dan sumber daya dimiliki secara pribadi.
  b. Pasar Bebas
     Harga ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa banyak intervensi pemerintah.
  c. Persaingan
     Mendorong inovasi dan efisiensi melalui persaingan antar pelaku usaha.
- Ekonomi Liberal:
  a. Kebebasan Ekonomi
     Menekankan hak individu untuk menjalankan bisnis dan berinvestasi.
  b. Intervensi Terbatas
     Pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mencegah monopoli dan melindungi konsumen, tetapi tidak mengontrol pasar secara langsung.
  c. Hak Milik Pribadi
     Menghargai kepemilikan pribadi sebagai dasar dari kegiatan ekonomi

| No | Item | Kapitalis | Liberal |
|---|---|---|---|
| 1 | **Tujuan** | **Akumulasi Kekayaan**: Fokus utama pada penciptaan dan akumulasi kekayaan melalui investasi dan produksi.<br><br>**Inovasi dan Persaingan**: Mendorong inovasi dan efisiensi melalui persaingan di pasar. | **Kebebasan Ekonomi:** Menekankan pentingnya kebebasan individu untuk bertransaksi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.<br><br>**Pasar Bebas:** Memfasilitasi perdagangan dan transaksi yang tidak terhambat oleh regulasi yang ketat. |
| 2 | **Peran pemerintah** | Pemerintah dapat terlibat dalam mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan melindungi kepentingan publik, meskipun prinsip dasar tetap pada pasar bebas | Pemerintah berfungsi sebagai pengatur dan penjaga mekanisme pasar, tetapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi sehari-hari |
| 3 | **Fokus sistem** | Lebih menekankan pada kepemilikan pribadi dan keuntungan sebagai tujuan utama. | Lebih menekankan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi dengan pengaturan minimal dari pemerintah untuk memastikan persaingan yang sehat. |

## 5. Ekonomi Campuran

- Kepemilikan Campuran

  Dalam ekonomi campuran, kepemilikan alat produksi dapat berupa milik pribadi (sektor swasta) maupun milik negara (sektor publik). Hal ini memungkinkan individu dan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

- Intervensi Pemerintah

  Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti pengurangan

ketidaksetaraan, perlindungan lingkungan, dan penyediaan layanan dasar. Ini termasuk regulasi harga, pajak, dan subsidi.

- Pasar Bebas dengan Regulasi

  Meskipun ada mekanisme pasar yang bebas, pemerintah tetap menetapkan aturan untuk memastikan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen serta pekerja.
- Fleksibilitas

  Sistem ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi tanpa kehilangan fokus pada kesejahteraan sosial. Sekaligus memberi ruang bagi inovasi sambil tetap menjaga perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Kelebihan Ekonomi Campuran

- Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan

  Ekonomi campuran menggabungkan keunggulan dari kedua sistem, yaitu efisiensi pasar dari kapitalisme dan keadilan sosial dari sosialisme.
- Inovasi dan pertumbuhan

  Dengan adanya sektor swasta yang bebas berinovasi, ekonomi campuran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Perlindungan sosial

  Sistem ini memungkinkan adanya program-program sosial yang membantu masyarakat yang kurang mampu melalui subsidi atau layanan publik.

Contoh Negara dengan Ekonomi Campuran

- Amerika Serikat

  Meskipun dikenal sebagai negara kapitalis, AS memiliki elemen-elemen sosialisme dalam bentuk program kesejahteraan sosial seperti Medicare dan Social Security. Sistem ini sering disebut

sebagai "kapitalisme non laissez-faire" karena adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi.

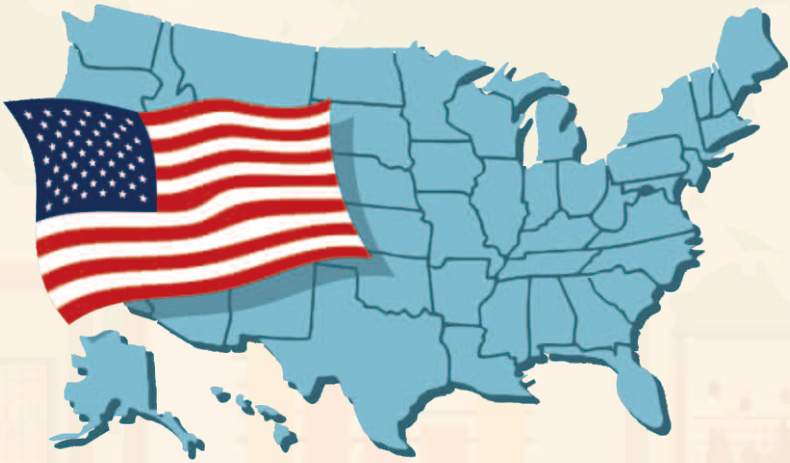

- Swedia

  Negara ini menerapkan model welfare state yang kuat, yaitu pemerintah menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial kepada warganya namun tetap mempertahankan sektor swasta yang dinamis.
- Cina

  Setelah reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Cina mengadopsi model "sosialisme dengan karakteristik Tiongkok" yang mengizinkan elemen kapitalis dalam perekonomian sambil mempertahankan kontrol politik oleh Partai Komunis.
- India

  Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, India mengadopsi kebijakan pembangunan sosialis tetapi kemudian beralih ke reformasi pasar pada tahun 1991, menciptakan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua ideologi.

Uraian dan contoh-contoh negara yang mengadopsi berbagai ideologi ekonomi di atas, menunjukkan bahwa tidak ada satu negara yang mengimplementasikan ideologi baik kapitalis, sosialis, komunis, maupun liberal dalam wujudnya yang solid. Negara-negara telah melihat bahwa tidak ada ideologi tunggal yang bisa mengatasi semua tantangan. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi antara kapitalis-sosialis pada kadar yang ditentukan oleh suatu negara.



# V Demokrasi

Demokrasi, sebagai salah satu pilar utama dalam tata pemerintahan modern, telah menjadi topik yang menarik perhatian di seluruh dunia. Secara umum, demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan dengan kekuasaan politik di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Meskipun memiliki prinsip dasar yang sama, terdapat berbagai variasi dalam penerapan demokrasi yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

Dalam bagian ini, akan dijelajadi tiga bentuk utama demokrasi: demokrasi liberal, yang menekankan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia; demokrasi rakyat, yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan demokrasi Pancasila, yang merupakan



sistem demokrasi khas Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal.

Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara variasi-variasi ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana demokrasi berfungsi di berbagai belahan dunia dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

**Pengertian Demokrasi Menurut Para Pakar**

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan). Demokrasi berarti kedaulatan kekuasaan ada di tangan rakyat. Untuk mengetahui lebih jauh, di bawah ini disajikan definisi demokrasi menurut beberapa pakar:

- Aristoteles menyatakan bahwa prinsip demokrasi adalah kebebasan,




karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

- C.F. Strong menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas

dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

- Haris Soche mengartikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, yang memberikan porsi bagi rakyat untuk mengatur dan melindungi diri dari paksaan pihak lain.

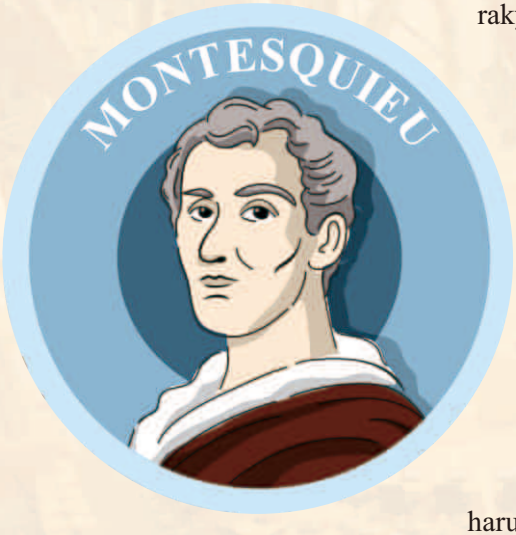


- Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dalam negara, yang artinya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus terpisah dan independen satu sama lain.
- Mohammad Hatta mengemukakan bahwa demokrasi berarti kedaulatan rakyat,yaitu rakyat memiliki hak untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara melalui konsensus dalam perundingan.
- John Dewey menggambarkan demokrasi sebagai pandangan hidup yang mencerminkan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa untuk membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama.
- Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang sekaligus menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan mereka.
- Hans Kelsen menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, dilaksanakan oleh wakil-wakil yang terpilih
- Samuel Huntington mengemukakan bahwa demokrasi ada jika para

pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui pemilihan umum yang adil dan berkala, dengan calon bebas bersaing untuk memperoleh suara

- Munir Fuady menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip dasar demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi aktif dalam proses politik. Demokrasi tidak hanya berfokus pada aspek politik tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

**Variasi Demokrasi yang Eksis di Dunia**

**1. Demokrasi Liberal:**

**Pengertian, Prinsip-Prinsip Dasar, Penggagas, Sejarah, dan Implementasinya**

**Pengertian Demokrasi Liberal**

Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dalam sistem ini, kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang diwakili melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Demokrasi liberal berfokus pada partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan, serta adanya pembatasan kekuasaan pemerintah untuk mencegah otoritarianisme.

**Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Liberal**

- Kebebasan Individu

  Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi merupakan prinsip utama dalam demokrasi liberal. Setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa takut akan represi..
- Pemisahan Kekuasaan

  Pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa tidak ada satu cabang pun yang memiliki kekuasaan absolut. Prinsip ini dijalankan dengan menciptakan sistem check and balance yang penting untuk menjaga keadilan.
- Partisipasi Politik

  Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya adalah esensial. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil.
- Pluralisme

  Demokrasi liberal menghargai keberagaman pandangan politik dan sosial. Berbagai partai politik dapat bersaing secara demokratis untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia

  Hak-hak individu dilindungi oleh konstitusi dan hukum, sehingga pemerintah tidak dapat melanggar hak-hak tersebut tanpa proses hukum yang sah.

**Penggagas Demokrasi Liberal**

Demokrasi liberal dipengaruhi oleh pemikir-pemikir seperti:

- John Locke

  Filsuf Inggris yang menekankan pentingnya hak-hak individu dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat.
- Montesquieu

  Mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan.
- John Stuart Mill




Menekankan kebebasan individu dan pentingnya toleransi dalam masyarakat pluralistik.

**Sejarah Demokrasi Liberal**

- Abad ke-17 hingga ke-19
  Konsep demokrasi liberal mulai berkembang di Eropa selama periode renaissance (pencerahan). Pemikir-pemikir seperti Locke dan Rousseau mengemukakan ide-ide tentang hak asasi manusia dan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat.
- Revolusi Amerika (1776)
  Pembentukan Amerika Serikat sebagai republik dengan konstitusi yang menjamin hak-hak individu menjadi contoh awal penerapan demokrasi liberal.
- Revolusi Prancis (1789)
  Revolusi Prancis menghasilkan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara yang menegaskan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara di seluruh dunia mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal sebagai bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

**Implementasi Demokrasi Liberal**

Demokrasi liberal telah diimplementasikan di berbagai negara dengan variasi dalam praktiknya:

- Amerika Serikat
  Sebagai salah satu contoh paling terkenal dari demokrasi liberal, AS menerapkan sistem pemerintahan republik dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- Negara-Negara Eropa Barat
  Inggris, Jerman, dan Prancis menerapkan demokrasi liberal dengan sistem parlementer yang menghargai pluralisme politik dan perlindungan hak asasi manusia.
- Indonesia (Era Demokrasi Liberal 1950-1959)
  Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal dengan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Namun, periode ini juga ditandai oleh ketidakstabilan politik yang menyebabkan transisi ke era Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno
- Negara-Negara Lain
  Banyak negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis setelah periode otoritarianisme atau kolonialisme.

Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan individu, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan akar sejarah yang kuat dalam pemikiran renaissance, konsep ini telah diaplikasikan di berbagai negara dengan hasil yang bervariasi.

Meskipun menghadapi tantangan dalam praktiknya seperti ketidakstabilan politik atau penurunan kualitas demokratis, demokrasi liberal tetap menjadi salah satu model pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia saat ini.

## 2. Demokrasi Rakyat

### Pengertian, Prinsip-Prinsip Dasar, Penggagas, Sejarah, dan Implementasinya

#### Pengertian Demokrasi Rakyat

Demokrasi Rakyat adalah sistem pemerintahan yang menekankan kekuasaan rakyat, terutama kelas pekerja atau proletariat, dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, demokrasi rakyat sering kali dihubungkan dengan ideologi sosialisme atau



komunisme, karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan sosial dan menghapuskan perbedaan kelas.

**Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Rakyat**

- Kepemilikan Kolektif

  Dalam demokrasi rakyat, alat-alat produksi dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan kepemilikan pribadi atas sumber daya yang dapat menciptakan ketimpangan ekonomi.
- Partisipasi Langsung

  Demokrasi rakyat mendorong partisipasi langsung dari rakyat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk organisasi masyarakat, seperti serikat pekerja dan lembaga komunitas.
- Kesejahteraan Sosial

  Fokus utama dari demokrasi rakyat adalah pencapaian kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
- Penolakan terhadap Oposisi Kelas

  Dalam banyak kasus, demokrasi rakyat menolak keberadaan kelas-kelas yang dianggap sebagai penghalang terhadap pencapaian tujuan kolektif. Hal ini seringkali mengarah pada tindakan represif terhadap oposisi politik.

**Penggagas Demokrasi Rakyat**

Demokrasi rakyat berakar pada pemikiran Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berargumen bahwa perjuangan kelas adalah inti dari sejarah manusia dan bahwa proletariat harus bersatu untuk menggulingkan borjuasi (kelas pemilik modal). Konsep ini kemudian diadaptasi oleh berbagai gerakan politik di seluruh dunia yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip sosialisme.

**Sejarah Demokrasi Rakyat**

Awal Mula Konsep demokrasi rakyat muncul pada abad ke-19 seiring dengan berkembangnya pemikiran sosialis dan komunis. Setelah Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, konsep ini diterapkan secara praktis ketika Bolshevik mendirikan negara sosialis pertama di dunia.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang membentuk pemerintahan dipimpin oleh partai-partai komunis atau sosialis, mulai mengimplementasikan ideologi demokrasi rakyat sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

**Negara-Negara yang Mengimplementasikan Demokrasi Rakyat**

- Uni Soviet
  Sebagai contoh paling terkenal dari demokrasi rakyat, Uni Soviet menerapkan prinsip-prinsip ini setelah Revolusi Bolshevik. Pemerintah Soviet berusaha untuk mewakili kepentingan proletariat melalui berbagai institusi politik seperti Soviet (dewan).
- Republik Rakyat Tiongkok
  Didirikan pada tahun 1949 setelah kemenangan Partai Komunis Tiongkok dalam Perang Saudara Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengklaim penerapan demokrasi rakyat dengan fokus pada kepemilikan kolektif dan penghapusan kelas-kelas sosial.
- Korea Utara
  Negara ini juga mengadopsi sistem pemerintahan yang disebut sebagai "demokrasi rakyat," meskip praktiknya sering kali bersifat otoriter dengan penekanan pada kontrol pemerintah yang ketat terhadap masyarakat.
- Negara-Negara Lain
  Beberapa negara lain pernah menganut sistem serupa termasuk Kuba




dan Vietnam, dengan pemerintah komunis berusaha menerapkan prinsip-prinsip demokrasi rakyat dalam konteks lokal mereka.

Demokrasi rakyat adalah sebuah sistem pemerintahan yang berfokus pada kekuasaan kolektif rakyat, terutama kelas pekerja, dengan tujuan mencapai keadilan sosial melalui kepemilikan kolektif dan partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Meskipun ideologi ini memiliki akar yang kuat dalam pemikiran Marxisme, implementasinya di berbagai negara sangat bervariasi dan dapat melibatkan elemen-elemen otoritarian. Negara-negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara adalah contoh dari penerapan konsep ini dalam sejarah modern.

**Perbedaan Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Liberal**

Demokrasi Rakyat dan Demokrasi Liberal adalah dua bentuk sistem pemerintahan yang memiliki karakteristik dan prinsip dasar yang berbeda. Berikut penjelasan mengenai perbedaan kedua jenis demokrasi ini:

1. **Definisi dan Konsep Dasar**

   Demokrasi Rakyat:

   Demokrasi rakyat juga dikenal sebagai demokrasi proletar, berakar dari ideologi Marxisme. Dalam sistem ini, kekuasaan politik

berada di tangan kelas pekerja (proletariat) dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Demokrasi rakyat menekankan kolektivitas dan partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi Liberal:

Sistem pemerintahan yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum,




dan ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

**2. Kepemilikan dan Ekonomi**

Demokrasi Rakyat:

Demokrasi rakyat cenderung mengadopsi sistem ekonomi sosialis dimana alat produksi dimiliki secara kolektif atau oleh negara. Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan kepemilikan pribadi

atas alat produksi dan mencapai pemerataan ekonomi.

Demokrasi Liberal:

Mengedepankan ekonomi pasar bebas dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi, sistem ini membuka peluang individu untuk memiliki hak untuk berbisnis dan berinvestasi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.

**3. Partisipasi Politik**

Demokrasi Rakyat:

Demokrasi rakyat menjunjung partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Keputusan diambil berdasarkan kepentingan kolektif kelas pekerja, umumnya melalui organisasi atau partai politik yang mewakili proletariat.

Demokrasi Liberal:

Sedangkan demokrasi liberal mendorong partisipasi warga negara untuk memilih wakilnya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Keputusan politik biasanya diambil oleh perwakilan yang dipilih melalui proses demokratis.

**4. Perlindungan Hak Individu**

Demokrasi Rakyat:

Faktanya, dalam operasionalnya demokrasi rakyat, hak-hak individu acap kali dikorbankan demi kepentingan kolektif. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengambil tindakan represif terhadap oposisi untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Demokrasi Liberal:

Sistem demokrasi ini menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Kebebasan berpendapat, kebebasan

pers, dan hak-hak sipil lainnya dijamin dalam konstitusi dan dilindungi oleh hukum.

**5. Contoh Negara**

*Demokrasi Rakyat:* Contoh negara yang menganut demokrasi rakyat adalah bekas Uni Soviet, Kuba, dan beberapa negara dengan pemerintahan komunis lainnya.

*Demokrasi Liberal:* Contoh negara yang menerapkan demokrasi liberal termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan banyak negara Eropa lainnya.

Perbedaan antara demokrasi rakyat dan demokrasi liberal terletak pada pendekatan terhadap kekuasaan, ekonomi, partisipasi politik, perlindungan hak individu, serta tujuan akhir dari sistem pemerintahan tersebut. Demokrasi rakyat lebih menekankan kolektivitas dan kepentingan kelas pekerja. Sementara demokrasi liberal lebih fokus pada kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia.

| Isu | Demokrasi Rakyat | Demokrasi Liberal |
|---|---|---|
| Konsep dasar | - Berakar dari ideologi Marxisme.<br>- Kekuasaan politik berada di tangan kelas pekerja (proletariat)<br>- Bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas.<br>- Menekankan kolektivitas dan partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan. | - Menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap hak - hak minoritas.<br>- Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum<br>- Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. |
| Ekonomi dan kepemilikan | - Mengadopsi sistem ekonomi sosialis dimana alat produksi dimiliki secara kolektif atau oleh negara.<br>- Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mencapai pemerataan ekonomi. | - Mengedepankan ekonomi pasar bebas dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi.<br>- Individu memiliki hak untuk berbisnis dan berinvestasi tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. |

| Isu | Demokrasi Rakyat | Demokrasi Liberal |
|---|---|---|
| Partisipasi rakyat | - Menekankan partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik.<br>- Keputusan diambil berdasarkan kepentingan kolektif kelas pekerja . Lazimnya melalui organisasi atau partai politik yang mewakili proletariat. | - Mendorong partisipasi melalui pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih wakil rakyat.<br>- Keputusan politik diambil oleh perwakilan yang dipilih melalui proses demokratis. |
| Pelindungan hak individu | - Sering ditemukan fakta operasionalnya mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan kolektif.<br>- Dalam beberapa kasus, pemerintah bisa mengambil tindakan represif terhadap oposisi untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. | - Menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama.<br>- Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak -hak sipil lainnya dijamin dalam konstitusi dan dilindungi oleh hukum. |

## 3. Demokrasi Pancasila

### Pengertian, Penggagas, Prinsip-Prinsip, dan Implementasinya

Dari uraian tentang demokrasi rakyat dan demokrasi liberal yang bertolak belakang secara ekstrem, ada jalan ketiga yang memperkenalkan perimbangan atas keduanya. Jalan ketiga itu disebut demokrasi Pancasila yang dirumuskan oleh Indonesia.

### Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Didesain tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Demokrasi Pancasila menekankan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tujuan

untuk kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Prinsip-prinsip dasar dari Demokrasi Pancasila mencakup:**

1. Kedaulatan Rakyat
   Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Musyawarah untuk Mufakat
   Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
3. Persamaan Hak dan Kewajiban
   Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.
4. Kebebasan yang Bertanggungjawab
   Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial dan moral terhadap orang lain.
5. Keadilan Sosial
   Menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan sosial.
6. Pendidikan Politik
   Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses politik melalui pendidikan politik.

**Sejarah Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila mulai berkembang setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ketika para pendiri bangsa merumuskan nilai-nilai Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu, demokrasi Pancasila menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

- Era Orde Lama (1945-1966)
  Pada masa ini, konsep demokrasi Pancasila mulai diterapkan meskipun sering kali terpengaruh oleh kekuatan politik yang dominan, bahkan, pernah bergeser menjadi demokrasi liberal.
- Era Orde Baru (1966-1998)
  Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi Pancasila menghadapi banyak keberatan terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia. Meskipun Orde Baru tetap mengklaim sebagai implementasi demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen.
- Era Reformasi (1998-sekarang)
  Setelah reformasi, tampak adanya upaya untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara lebih konsisten dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Kendati yang terjadi di lapangan adalah demokrasi liberal.

**Implementasi Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila diimplementasikan melalui berbagai lembaga negara dan mekanisme politik:

- Perwakilan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat
- Pemilihan Umum
  Pemilihan umum dilaksanakan secara berkala untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Partisipasi Masyarakat
  Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik melalui organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan forum-forum diskusi.
- Pendidikan Kewarganegaraan
  Pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila dan demokrasi diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang unik bagi Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip demokratis. Dengan menekankan kedaulatan rakyat melalui musyawarah untuk mufakat, demokrasi ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Implementasi demokrasi Pancasila terus berevolusi seiring dengan dinamika politik dan sosial di Indonesia. Secara gagasan, demokrasi Pancasila masih terus tumbuh dan dikembangkan di Indonesia. Tapi implementasinya, saat ini Indonesia berada dalam praktik demokrasi liberal.



## Penutup

Setelah menguraikan pengertian, karakteristik, dan implementasi dari demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila, kita dapat melihat bahwa meskipun ketiga bentuk demokrasi ini memiliki prinsip dasar yang sama yaitu keterlibatan rakyat dalam pemerintahan mereka menawarkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks budaya dan sejarah masing-masing.

Demokrasi liberal menekankan pada perlindungan hak individu dan kebebasan sipil, sementara demokrasi rakyat lebih mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai lokal Indonesia dengan prinsip-prinsip universal demi menciptakan keadilan sosial.

Selain itu, di berbagai belahan dunia, terdapat variasi-variasi lain dari sistem demokrasi yang diimplementasikan, mencerminkan keragaman cara masyarakat mengatur diri mereka sendiri. Dengan memahami berbagai bentuk demokrasi ini, kita dapat menghargai kompleksitas dan dinamika dalam praktik pemerintahan global serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.





# VI Partai Politik & Civil Society




Dalam demokrasi, partai politik dan civil society merupakan dua elemen penting di antara pi-pilar demokrasi. Keduanya memainkan peran yang esensial dalam membentuk dinamika sosial dan politik suatu negara.

Partai politik berfungsi sebagai wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi, kepentingan, dan ideologi mereka. Melalui pemilihan umum, partai politik menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Di sisi lain, civil society mencakup berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, meningkatkan kesadaran publik, serta mengawasi tindakan pemerintah. Di Indonesia, kelompok civil society yang besar, kuat, dan organik tentu saja Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Jika partai politik bekerja dari dalam sistem pemerintahan. Sebaliknya, civil society mengawal aspirasi rakyat dari luar sistem pemerintahan. Idealnya, terjadi kolaborasi positif antara partai politik dan civil society sehingga program-program yang direncanakan dan dijalankan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam negara demokrasi, keduanya saling melengkapi dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan dinamis.

Namun faktanya, dalam banyak kasus, terutama di negara miskin dan berkembang, hubungan antara partai politik dan civil society tidak selalu harmonis. Tantangan yang dihadapi oleh kedua entitas ini dalam menjalankan peran mereka masing-masing. Misalnya, partai politik acap kali terjebak dalam praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Di sisi lain, civil society sering kali menghadapi tekanan dari pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha membungkam suara kritis mereka. Ada pihak-pihak yang berusaha mengendalikan kelompok ini dengan cara-cara tertentu, sehingga, kritik terhadap pemerintah sebagai penyeimbang dipaksa hilang.

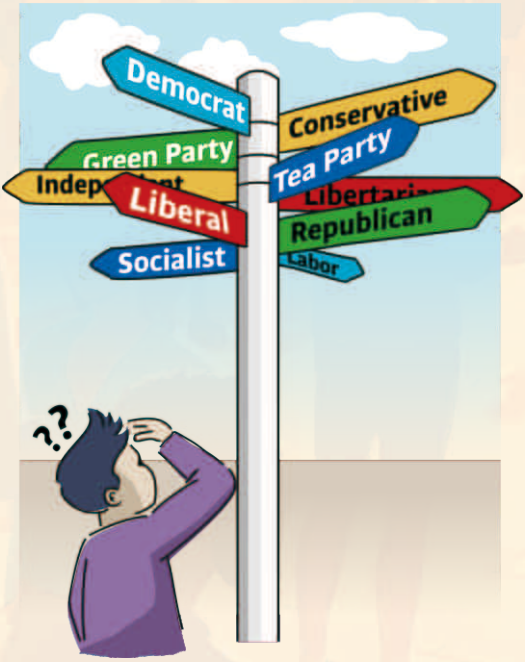


Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara partai politik dan civil society serta bagaimana keduanya dapat bekerjasama untuk mendorong pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Bagian ini akan membahas peran masing-masing entitas, tantangan yang dihadapi, serta potensi kolaborasi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

## 1. Partai Politik

Partai politik, menurut para pakar, dapat didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan politik tertentu, terutama dalam konteks pemilihan umum. Menurut Robert Dahl, partai politik berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan menyatukan kepentingan masyarakat, serta sebagai sarana untuk memfasilitasi partisipasi politik.

Dalam pandangan lain, Giovanni Sartori menekankan bahwa partai politik adalah aktor utama dalam sistem politik yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.

Peran partai politik dalam negara demokrasi sangat krusial karena mereka menjadi perwakilan suara rakyat, mengembangkan kebijakan publik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya partai politik, masyarakat memiliki platform untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan.

### 1.1 Ideologi Partai Politik dari Kiri ke Kanan

#### 1.1.1 Spektrum Ideologi Politik: Klasifikasi dari Kiri hingga Kanan

Spektrum ideologi politik adalah kerangka yang digunakan untuk mengklasifikasikan posisi politik berdasarkan nilai-nilai dan pandangan yang dipegang oleh individu atau kelompok.

Istilah "kiri" dan "kanan" berasal dari aransemen tempat duduk di parlemen Prancis setelah Revolusi Perancis, ketika saat itu kelompok yang mendukung perubahan sosial dan ekonomi berada di sisi kiri. Sementara kelompok konservatif yang ingin

mempertahankan status quo berada di sisi kanan.

Dalam konteks ini, ideologi politik dapat dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari sayap kiri yang mencakup sosialisme dan komunisme, hingga sayap kanan yang meliputi konservatisme dan fasisme. Di antara kedua ekstrem ini, terdapat posisi tengah yang mengadopsi elemen-elemen dari kedua sisi. Umumnya, partai-partai di Indonesia mengambil posisi tengah ini. dengan sedikit kecenderungan pada kanan atau kiri.




1.1.2 Ideologi Sayap Kiri

Partai sayap kiri adalah kelompok politik yang mendukung ide-ide seperti kebebasan, persamaan derajat, solidaritas, pembelaan hak-hak, perjuangan sosial, reformasi, dan internasionalisme. Mereka sering kali berlawanan dengan sistem hierarki sosial yang dipromosikan oleh partai sayap kanan.

Istilah "sayap kiri" berasal dari Prancis, dianggap sebagai "partai gerakan", sedangkan sayap kanan sebagai "partai keteraturan." Konsep ini muncul selama Revolusi Prancis, ketika mereka yang duduk di kiri menentang Ancien Régime dan monarki Bourbon serta mendukung Revolusi Prancis, pembentukan republik demokratis, dan sekularisasi masyarakat.

Menurut Barry Clark, pendukung sayap kiri "mengklaim bahwa perkembangan manusia akan terjadi ketika para individu terlibat dalam kerja sama yang saling menghormati. Hal itu bisa terjadi jika perbedaan yang berlebihan dalam status, kekuasaan, dan kekayaan dihilangkan."

Saat ini, sayap kiri mencakup berbagai ideologi politik kontemporer, seperti komunisme, sosialisme, anarkisme, dan libertarianisme kiri. Kelompok ini juga melibatkan isu-isu seperti anti-globalisasi, anti-kapitalisme, egalitarianisme, feminisme, dan pro-lingkungan hidup. Dalam konteks internasional, gerakan hak-hak sipil, gerakan feminis, gerakan hak aborsi, multikulturalisme, gerakan anti-perang, dan gerakan lingkungan hidup juga termasuk dalam spektrum sayap kiri

### 1.1.3 Ideologi Sayap Kanan

Partai sayap kanan sering kali diidentifikasi dengan ideologi yang menekankan nilai-nilai konservatif, nasionalisme, dan penolakan terhadap imigrasi. Partai-partai sayap kanan membangun platform ideologis mereka di atas isu-isu nasionalisme yang sarat dengan perjuangan nilai tradisi dan eksklusivisme. Isu nasionalitas menjadi pendorong utama bagi pergerakan sayap kanan radikal, yang sering kali diringkas dalam istilah ultranasionalisme.




Dalam literatur akademis, partai sayap kanan umumnya dihubungkan dengan ideologi yang mendukung kapitalisme, menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi,dan mengadvokasi kebijakan yang lebih ketat terhadap imigrasi. Partai sayap kanan cenderung berfokus pada isu-isu seperti keamanan, penegakan hukum, dan pelestarian nilai-nilai budaya yang dianggap terancam oleh globalisasi dan perubahan sosial.

### 1.1.4 Ideologi Moderat




Di antara spektrum kiri dan kanan terdapat posisi Tengah atau moderat. Partai-partai Tengah berusaha untuk menjembatani perbedaan antara kedua sisi dengan mengadopsi kebijakan yang seimbang. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara

mencerminkan pendekatan moderat yang mencoba mengakomodasi berbagai ideologi dalam satu kerangka. Sehingga umumnya, dasar partai politik di Indonesia pada dasarnya menganut ideologi moderat atau tengah. Tentu saja dengan sedikit kecenderungan ke kanan maupun ke kiri.

## 1.2 Perkembangan Ideologi Politik Global

Di era kontemporer, perkembangan ideologi politik tidak hanya terbatas pada klasifikasi sederhana antara sayap kiri dan sayap kanan. Batasan ini boleh dibilang mulai kabur. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul berbagai gerakan baru yang menantang batasan tradisional ini. Misalnya, gerakan hijau atau lingkungan hidup, seringkali menggabungkan elemen-elemen dari kedua spektrum tersebut untuk memperjuangkan isu-isu keberlanjutan dan keadilan lingkungan.

Selain lahirnya populisme, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan, telah muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap elit politik dan globalisasi. Populisme seringkali disebut sebagai "ideologi cair" (thin-centered ideology) yang tidak menawarkan sistem sosial-politik ideal, tetapi lebih berfokus pada oposisi antara "rakyat murni" dan "elit korup".

## 1.3 Praktek Ideologi Politik di Berbagai Negara

### 1.3.1 Negara dengan Pemerintahan Sayap Kiri

Negara-negara dengan pemerintahan sayap kiri umumnya ditandai oleh kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial, redistribusi kekayaan, dan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah Meksiko, di masa pemerintahan Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO mengusung agenda populis dan sosial yang

menekankan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Dalam artikel yang diterbitkan oleh International Journal of Latin American Studies, Feier Herd dan kawan-kawan mencatat bahwa kebangkitan kembali "Pink Tide" di Amerika Latin menunjukkan tren positif bagi partai-partai sayap kiri, dengan Meksiko sebagai salah satu contohnya.




1.3.2 Negara dengan Pemerintahan Sayap Kanan

Di sisi lain, negara-negara dengan pemerintahan sayap kanan sering kali menekankan nilai-nilai nasionalisme, keamanan, dan kebijakan imigrasi yang ketat. Brazil di masa kepemimpinan Jair Bolsonaro merupakan contoh pemerintahan sayap kanan yang mengedepankan agenda konservatif.

Seperti disampaikan Baker dan kawan-kawan dalam analisis yang dimuat dalam “Journal of Politics in Latin America”, Bolsonaro digambarkan sebagai pemimpin yang memanfaatkan sentimen anti-imigran dan nasionalisme untuk mendapatkan dukungan politik. Selain Brazil, negara Eropa Hungaria di bawah pemerintahan Viktor Orbán juga menunjukkan kecenderungan

sayap kanan dengan kebijakan yang menolak imigrasi dan memperkuat identitas nasional.

1.3.3 Negara yang Mengadaptasi Keduanya

Selain kecenderungan kepemimpinan sayap kiri dan sayap kanan seperti telah diuraikan di atas, beberapa negara menunjukkan tendensi untuk mengadopsi elemen-elemen dari kedua ideologi ini.

Chile, misalnya, dimasa kepemimpinan Gabriel Boric. menggabungkan elemen sosialisme dengan pendekatan pragmatis terhadap ekonomi pasar. Cordova dan Valenzuela dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Latin American Politics and Society, menyatakan bahwa Boric dianggap sebagai pemimpin yang berusaha menjembatani kesenjangan antara kebijakan sosial progresif dan kebutuhan ekonomi pasar

Selain Chile, Indonesia juga dapat dianggap sebagai contoh negara yang mengadopsi elemen-elemen dari kedua sisi. Dengan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai sosialisme dan kapitalisme dalam kebijakan ekonominya

**2. Civil Society**

Pada permulaan bab ini telah disinggung sekilas tentang civil society, dan secara lebih detil akan dibahas pada bagian ini. Civil society merujuk pada ruang di luar pemerintah dan pasar, dimana individu dan kelompok berkumpul untuk mengejar kepentingan bersama, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Konsep ini telah ada sejak zaman kuno, tetapi mendapatkan perhatian baru dalam konteks modern, terutama dalam studi tentang demokrasi dan partisipasi politik. Menurut Neera Chandhoke dalam artikelnya yang diterbitkan di The Journal of Political Philosophy, civil society mencakup



berbagai organisasi dan gerakan sosial yang berfungsi sebagai jembatan antara individu dan negara, memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembangan konsep civil society sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang dinamis. Dalam artikel yang ditulis oleh John Keane di The Journal of Democracy, ia menjelaskan bahwa civil society tidak hanya terbatas pada organisasi non-pemerintah (LSM) atau kelompok advokasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi masyarakat, termasuk gerakan sosial, asosiasi sukarela, dan media independen. Keane menekankan bahwa civil society memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan menyediakan platform bagi dialog publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

Dalam konteks internasional, civil society juga berfungsi sebagai aktor penting dalam tata kelola global. Thomas Carothers menerbitkan laporannya di Foreign Affairs dan menunjukkan bahwa organisasi-organisasi civil society seringkali terlibat dalam isu-isu internasional seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Carothers mencatat bahwa meskipun civil society dapat menghadapi tantangan dari pemerintah otoriter yang mencoba membungkam suara-suara kritis, mereka tetap menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan sosial.

## 2.1 Civil Society di Indonesia

Di Indonesia, civil society telah berkembang pesat sejak reformasi 1998. Reformasi telah membuka ruang bagi berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (Ornop), untuk berkontribusi dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa civil society berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai pengawas kebijakan publik.

Ada dua organisasi besar yang sering dianggap sebagai contoh civil society organik di Indonesia, yaitu: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya tidak hanya berperan dalam aspek keagamaan tetapi juga aktif dalam pendidikan, kesehatan, dan advokasi sosial.

### 2.1.1 Muhammadiyah

Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, dikenal sebagai organisasi yang berfokus pada pembaruan Islam dan pengembangan masyarakat. Muhammadiyah, misalnya, memiliki jaringan pendidikan yang luas sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pengembangan rumah sakit dan klinik kesehatan serta panti asuhan.

Belakangan, Muhammadiyah juga berkontribusi secara

positif dalam advokasi kebencanaan dan aksi-aksi sosial nyata di masyarakat melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Dengan demikian, Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan tetapi juga sebagai kekuatan civil society yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan pendidikan di Indonesia.

Lebih lanjut, Prof. Komaruddin Hidayat dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu civil society yang paling solid di Indonesia. Ia menekankan pentingnya Muhammadiyah untuk tetap menjaga posisinya sebagai civil society yang independen dan tidak terkooptasi oleh kekuatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan umat dan kebijakan pemerintah.






2.1.2 Nahdlatul Ulama

Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) juga dikenal sebagaai organisasi keagamaan dengan pendekatan moderatnya dalam mengatasi isu-isu sosial dan politik. serta berkontribusi positif pada dialog antar agama. Seperti halnya Muhammadiyah, NU juga mulai mengembangkan bidang-bidang pelayanan sosial dengan mendirikan banyak klinik serta rumah sakit dan mulai membangun berbagai perguruan tinggi.

Di era kepemimpinan Gus Dur, dimasa Orde Baru, NU merupakan salah satu kelompok yang kurang disenangi Soeharto karena Gus Dur sangat vokal dan menyerang pemerintahan Soeharto yang dinilai otoriter dan anti-demokrasi. Gus Dur sendiri sejatinya dikenal luas sebagai aktivis prodemokrasi dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong demokratisasi di Indonesia.

Oleh karena itu, tidak heran jika di era Orde Baru, NU mengalami tekanan yang mengakibatkannya sulit berkembang.

Baru pasca reformasi, NU mendapatkan momentum untuk semakin berkembang dari sisi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, baik Muhammadiyah maupun NU berfungsi sebagai agen perubahan yang mendukung penguatan civil society dan demokrasi di Indonesia, menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik.

Meskipun ada banyak sekali kelompok masyarakat lain yang juga menjadi pilar civil society, dua kelompok di atas sudah merupakan contoh terbaik karena organik, jumlah anggotanya puluhan juta, dan terstruktur dengan baik hingga ke wilayah administrasi paling kecil.

**Penutup**

Demikian telah diuraikan peran dan kontribusi penting yang dimainkan oleh partai politik dan civil society dalam sebuah negara demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, mengorganisir kepentingan masyarakat dan memperjuangkan agenda politik yang mencerminkan aspirasi publik. Sementara itu, civil society berperan sebagai pengawas dan penggerak perubahan sosial, memberikan suara bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Pentingnya kolaborasi antara keduanya tidak dapat diabaikan; sinergi ini menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih kuat, yang berarti partai politik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sementara civil society dapat memperkuat suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan kolaborasi ini, partai politik dan civil society dapat memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga sebuah mekanisme yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan. Oleh karena itu, membangun hubungan yang harmonis antara kedua entitas ini adalah langkah krusial dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

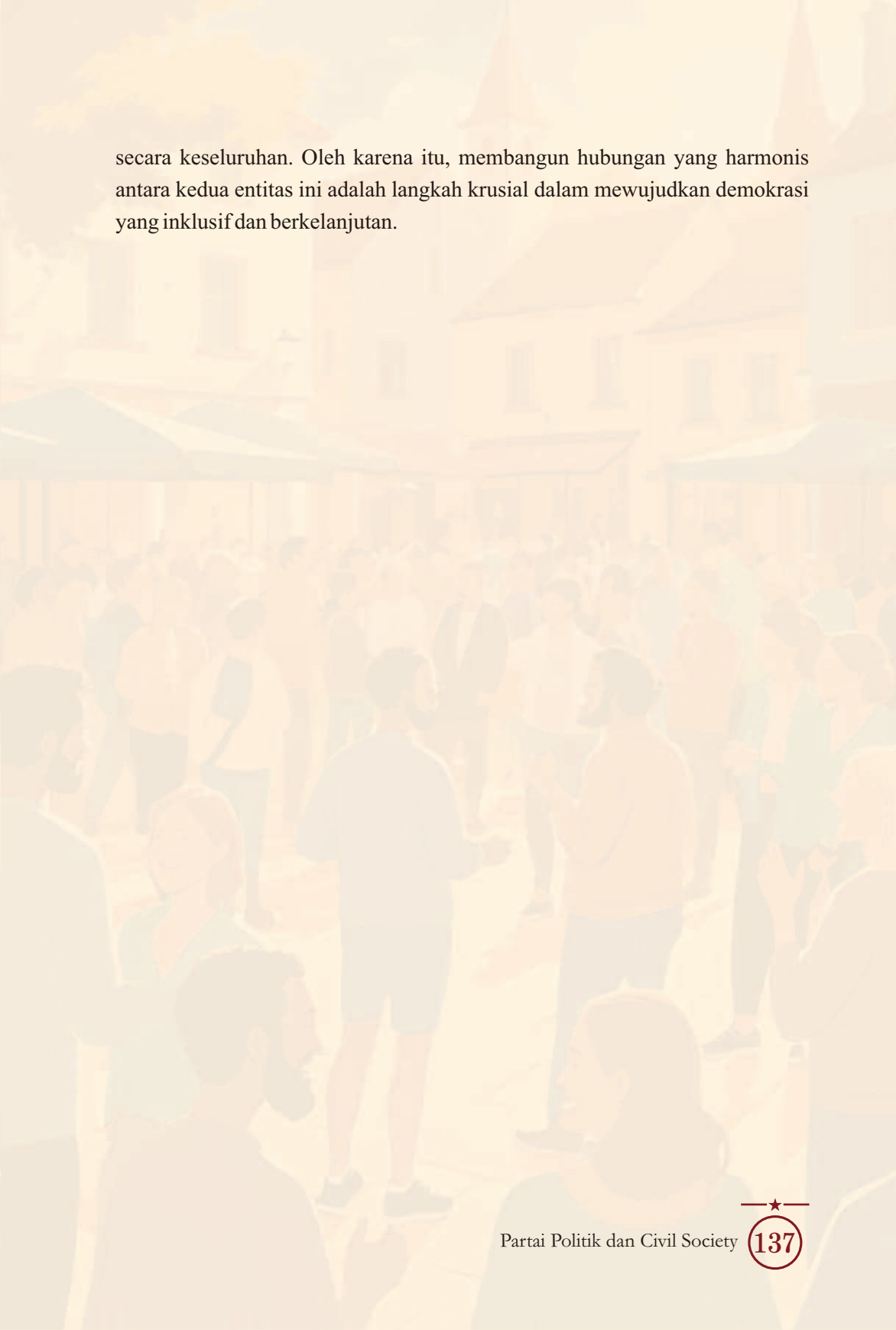

# VII Organisasi Regional dan Global




Organisasi internasional maupun regional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antarnegara di seluruh dunia atau di kawasan. Salah satu organisasi paling berpengaruh adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan setelah Perang Dunia II dengan tujuan mencegah konflik berskala besar, mempromosikan kerja sama antar negara, dan mempublikasikan hak asasi manusia.

PBB dan organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO), berfungsi sebagai platform bagi negara-negara untuk berdialog, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam berbagai isu global, mulai dari kesehatan, pendidikan, kebudayaan, perubahan iklim hingga keamanan internasional.

Menjadi anggota organisasi internasional memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara anggotanya. Keanggotaan dalam organisasi seperti PBB memungkinkan negara untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan global dan berkontribusi pada penyelesaian masalah yang mempengaruhi komunitas internasional.

Selain itu, negara anggota juga dapat mengakses sumber daya dan dukungan teknis yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Hal ini memudahkan anggota mendapatkan dukungan pada implementasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keanggotaan ini juga meningkatkan legitimasi internasional negara tersebut dan membantu memperkuat posisinya di panggung dunia.

Urgensi untuk menjadi anggota organisasi internasional semakin meningkat di tengah tantangan global yang kompleks seperti pandemi COVID-19, terorisme, dan krisis iklim. Kolaborasi antarnegara menjadi sangat penting untuk menghadapi masalah-masalah ini secara efektif.

Dengan bergabung dalam organisasi internasional, negara-negara tidak hanya dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya, tetapi juga membangun aliansi strategis yang dapat memperkuat keamanan dan kesejahteraan nasional mereka. Oleh karena itu, keanggotaan dalam organisasi-organisasi ini bukan hanya sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan bagi negara-negara yang ingin berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera.

Berikut ini beberapa organisasi internasional dan regional dan uraian pentingnya secara ringkas.

**A. Organisasi Terbuka**

**1. Perserikatan Bangsa Bangsa**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 24 Oktober 1945, sebagai respons terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II. Tujuan utama pendirian PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,

serta mencegah terulangnya konflik berskala besar yang menghancurkan seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Dalam piagam pendiriannya, PBB menetapkan komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, mempromosikan kerjasama antarnegara, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, PBB berperan sebagai forum bagi negara-negara untuk berdialog dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan global.

Selain menjaga perdamaian, berdirinya PBB juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Melalui berbagai program dan inisiatif, PBB berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas global yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia.

Urgensi menjadi anggota PBB semakin meningkat seiring dengan kompleksitas tantangan global yang dihadapi saat ini, seperti perubahan iklim, terorisme, dan krisis kesehatan. Keanggotaan dalam PBB memberikan negara-negara kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan internasional dan mendapatkan dukungan dalam menghadapi isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat mereka.

Dengan demikian, PBB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menjaga perdamaian, tetapi juga sebagai platform bagi negara-negara untuk bekerjasama demi mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.




Namun ini bukan berarti PBB sempurna. Jika dicermati, salah satu sisi negatif dari PBB adalah keberadaan hak veto bagi 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak veto merupakan priviledge bagi Amerika, Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Inggris yang jika salah satu diantara mereka berlima menggunakannya, maka Keputusan Dewan Keamanan PBB otomatis batal.

**2. World Health Organization (WHO)**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 7 April 1948, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan global dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. WHO berperan sebagai otoritas koordinasi internasional dalam bidang kesehatan dan bertanggung jawab untuk menetapkan standar kesehatan, memberikan

panduan teknis, serta memfasilitasi penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan.

Dengan keanggotaan dari 194 negara, WHO memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan kesehatan global, termasuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan masalah kesehatan mental. Salah satu fungsi utama WHO adalah mengkoordinasikan respons global terhadap wabah penyakit. Organisasi ini memiliki pengalaman luas dalam menangani epidemi dan pandemi, seperti wabah Ebola, SARS, dan yang terbaru, pandemi COVID-19.

Dalam situasi darurat kesehatan, WHO bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk menyediakan dukungan teknis, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Melalui sistem pemantauan dan deteksi dini, WHO berupaya memastikan bahwa negara-negara dapat merespons dengan cepat terhadap ancaman kesehatan yang muncul.

WHO juga berfokus pada pengembangan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Organisasi ini melakukan penelitian dan analisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utama di berbagai negara dan merekomendasikan solusi yang efektif.

Misalnya, WHO telah meluncurkan berbagai program untuk memerangi penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis, serta inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap vaksin dan perawatan kesehatan dasar. Dengan pendekatan berbasis data ini, WHO berusaha menciptakan sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga

menjadi bagian integral dari misi WHO. Melalui kampanye global seperti Hari Kesehatan Sedunia, organisasi ini berusaha mendidik masyarakat tentang isu-isu kesehatan penting dan mendorong tindakan preventif.




WHO menyadari bahwa kesadaran masyarakat adalah kunci untuk mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam program-program kesehatan, WHO berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat.

### 3. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) didirikan pada 16 November 1945 dengan

tujuan untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. UNESCO berfokus pada pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, pelestarian warisan budaya dunia, serta promosi kebebasan berekspresi.

Bersama 193 negara anggota, UNESCO memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antarbudaya dan mempromosikan nilai-nilai universal yang mendukung perdamaian dan keberagaman.

Salah satu fokus utama UNESCO adalah pendidikan. Organisasi ini berupaya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Melalui program-program seperti Pendidikan untuk Semua (Education for All) dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, UNESCO berkomitmen untuk meningkatkan tingkat melek huruf dan memberikan pendidikan yang relevan bagi semua orang. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan mampu berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

UNESCO juga dikenal karena perannya dalam pelestarian warisan budaya dunia. Melalui program Warisan Dunia, organisasi ini mengidentifikasi dan melindungi situs-situs yang memiliki nilai budaya dan alam yang signifikan. Situs-situs tersebut tidak hanya mencerminkan sejarah dan identitas suatu bangsa, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Dengan melestarikan warisan budaya, UNESCO berusaha mendorong rasa saling menghormati antarbudaya dan memperkuat identitas global.

Selain itu, UNESCO juga aktif dalam bidang ilmu pengetahuan dengan cara mempromosikan penelitian ilmiah dan kolaborasi internasional di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, sains alam, dan teknologi. Melalui program-program seperti Man and the Biosphere (MAB) dan International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), UNESCO mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Inisiatif ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.




**B. Organisasi Karakter Spesifik**

Organisasi antar negara memainkan peran penting dalam menciptakan kerja sama di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun keamanan. Setiap organisasi memiliki karakteristik dan tujuan spesifik yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan negara-negara anggotanya.

Misalnya, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) berfungsi sebagai forum bagi negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia untuk mengatur produksi dan harga minyak global. Dengan mengkoordinasikan kebijakan produksi, OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar minyak dan memastikan pendapatan yang adil bagi negara-negara anggotanya.

Selain itu, ada pula Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk untuk memperkuat solidaritas di antara negara-negara Muslim dan mempromosikan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. OKI berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, konflik di negara-negara Muslim, dan kerjasama ekonomi. Melalui platform ini, negara-negara anggota dapat berdialog dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) muncul sebagai aliansi pertahanan yang bertujuan untuk menjamin keamanan kolektif anggotanya di Eropa dan Amerika Utara. Dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, NATO berfungsi sebagai jaminan keamanan yang kuat dalam menghadapi ancaman militer.

Di bawah ini diuraikan dengan ringkas mengenai organisasi-organisasi kerja sama tersebut:

**1. Organisasi Konferensi Islam (OKI/IOC)**

Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang kini dikenal sebagai Organisasi Kerja sama Islam merupakan platform kerjasama bagi negara-negara di dunia yang memiliki penduduk muslim. OKI didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di dunia Islam dan untuk memperkuat solidaritas antarnegara anggota.

OKI bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta untuk melindungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Anggota OKI saat ini mencakup 57 negara dari berbagai belahan dunia. OKI dikembangkan sebagai wahana bagi negara-negara Muslim untuk berdialog dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.

Salah satu fokus utama OKI adalah memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan Palestina dan hak-hak rakyat Palestina. Sejak awal berdirinya, OKI telah berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

Melalui berbagai resolusi dan pertemuan tingkat tinggi, OKI berusaha untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang masalah ini dan mendorong negara-negara anggota untuk memberikan dukungan politik dan material kepada rakyat Palestina. Hal ini

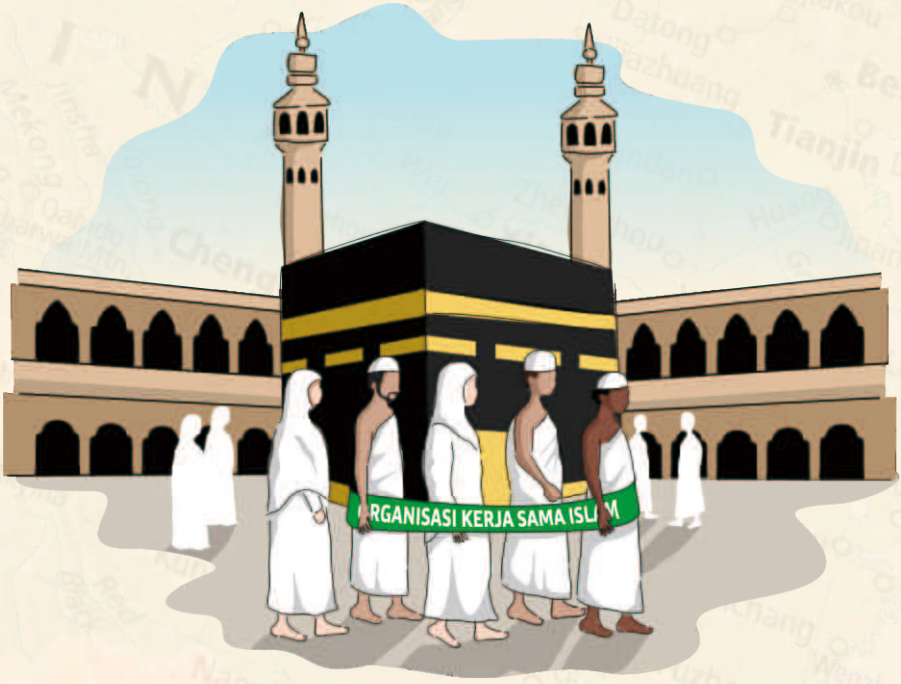

mencerminkan solidaritas yang kuat di antara negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam.

Selain isu Palestina, OKI juga aktif dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang mempengaruhi umat Islam di seluruh dunia. Organisasi ini telah mengembangkan berbagai program bantuan kemanusiaan untuk membantu negara-negara anggota yang mengalami bencana alam atau konflik bersenjata.

Selain itu, OKI pun berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan pembangunan ekonomi di negara-negara anggotanya melalui inisiatif-inisiatif seperti Program Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat, penting bagi negara-negara anggota untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas non-Muslim. Karenanya, OKI juga berperan dalam mempromosikan dialog antarbudaya dan antaragama

OKI telah mengadakan berbagai konferensi dan forum internasional untuk memfasilitasi dialog ini dan mengurangi ketegangan antara budaya yang berbeda. Melalui pendekatan ini, OKI berharap dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik antara umat Islam dan komunitas internasional lainnya.

**2. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC)**

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) adalah sebuah kartel yang didirikan pada 14 September 1960, oleh lima negara penghasil minyak: Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan utama

OPEC adalah untuk mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan produksi minyak di antara anggotanya agar dapat menjaga stabilitas harga minyak di pasar internasional.

Dalam menghadapi fluktuasi harga yang sering terjadi, OPEC berupaya memastikan bahwa negara-negara anggotanya mendapatkan pendapatan yang adil dari sumber daya alam mereka sambil mencegah penurunan harga yang merugikan.

Seiring berjalannya waktu, OPEC telah berkembang menjadi salah satu organisasi ekonomi paling berpengaruh di dunia dengan keanggotaan 13 negara, termasuk negara-negara besar penghasil minyak seperti Arab Saudi, Irak, dan UEA.

OPEC memainkan peran penting dalam menentukan output minyak global dengan mengatur kuota produksi bagi anggotanya. Dengan cara ini, OPEC dapat mempengaruhi harga minyak mentah di pasar internasional dan menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

OPEC juga berfungsi sebagai forum bagi negara-negara penghasil minyak untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai tren pasar dan kebijakan energi. Pertemuan rutin yang diadakan oleh OPEC memungkinkan anggotanya untuk mengevaluasi kondisi pasar dan membuat keputusan strategis terkait produksi minyak.

Dalam beberapa tahun terakhir, OPEC telah beradaptasi dengan tantangan baru seperti peningkatan produksi minyak dari negara-negara non-OPEC dan perubahan dalam konsumsi energi global akibat transisi menuju energi terbarukan.

Di tengah tantangan tersebut, OPEC mengembangkan kemitraan dengan negara-negara non-OPEC melalui inisiatif yang dikenal sebagai OPEC+. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi dengan negara-negara penghasil minyak lainnya seperti Rusia untuk mengatur produksi secara lebih luas dan bertujuan memperkuat pengaruh OPEC dalam menentukan harga minyak global dan menciptakan stabilitas di pasar energi. Dengan demikian, OPEC+ menjadi kekuatan penting dalam industri energi dunia. OPEC+ secara ekstrem bisa menciptakan krisis energi dunia.

### 3. NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO) adalah aliansi militer yang didirikan pada 4 April 1949, dengan tujuan utama untuk menjamin keamanan kolektif anggotanya. NATO dibentuk sebagai respons terhadap ancaman Perang Dingin, ketika negara-negara Barat merasa perlu untuk bersatu melawan potensi agresi Uni Soviet.

Berbekal prinsip dasar bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota (Pasal 5), NATO bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan yang kuat bagi



negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Sejak didirikan, NATO telah berkembang menjadi salah satu aliansi militer paling berpengaruh di dunia, dengan 30 negara anggota saat ini.

Salah satu aspek penting dari NATO adalah komitmennya terhadap pertahanan kolektif. Setiap negara anggota diharapkan untuk mengalokasikan setidaknya 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk anggaran pertahanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kapasitas militer yang memadai untuk mendukung satu sama lain dalam situasi krisis.

Selain itu, NATO juga melakukan latihan militer bersama dan berbagi informasi intelijen untuk meningkatkan interoperabilitas antara angkatan bersenjata negara-negara anggotanya. Melalui kerja sama ini, NATO berusaha untuk memperkuat pertahanan kolektif dan mempersiapkan anggotanya menghadapi berbagai ancaman, baik dari negara maupun non-negara.

Seiring berjalannya waktu, peran NATO telah berkembang dari sekadar aliansi pertahanan menjadi aktor penting dalam manajemen krisis internasional. NATO terlibat dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian dan misi kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Balkan, Afghanistan, dan Libya.

Melalui misi-misi tersebut, NATO tidak hanya berfokus pada aspek militer tetapi juga berupaya mendukung stabilitas politik dan pembangunan sosial di kawasan yang terkena dampak konflik. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma aliansi ini terhadap isu-isu keamanan, seperti terorisme, perubahan iklim, dan migrasi.

NATO juga menghadapi tantangan baru di era sekarang, misalnya perang dengan Rusia melalui proksinya: Ukraina. Pada situasi ini, NATO memutuskan merangsek ke timur mendekati perbatasan Rusia, memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara mitra di kawasan tersebut.

Selain itu, aliansi ini juga berfokus pada peningkatan kemampuan cyber dan pertahanan terhadap ancaman hibrida yang semakin kompleks. Maka, NATO akan terus beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang berevolusi dan berusaha untuk tetap relevan sebagai kekuatan stabilitas global.

## C. Organisasi Kerjasama Kawasan atau Regional

Organisasi kerjasama regional atau kawasan merupakan entitas yang dibentuk oleh negara-negara dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh organisasi ini meliputi ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara), Liga Arab, dan Uni Eropa. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan mereka, serta memfasilitasi dialog antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama.

Salah satu tujuan utama dari organisasi kerja sama regional adalah untuk mendorong integrasi ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Melalui penghapusan hambatan perdagangan, peningkatan investasi, dan kerjasama dalam bidang infrastruktur, organisasi ini berusaha menciptakan pasar yang lebih terbuka dan kompetitif.

Sebagai contoh, ASEAN telah mengembangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia

Tenggara. Dengan demikian, negara-negara anggota dapat saling mendukung dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, organisasi kerjasama regional juga berfokus pada isu-isu sosial dan budaya. Upaya membangun pemahaman dan solidaritas di antara masyarakat negara-negara anggotanya diwujudkan melalui program-program pertukaran budaya, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia Liga Arab, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai platform politik tetapi juga berupaya memperkuat identitas budaya dan bahasa Arab di seluruh wilayah. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, organisasi kerja sama regional berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan harmonis di kawasan masing-masing.

Berikut uraian lebih detil tentang beberapa contoh organisasi kerjasama Kawasan yang disebut di atas.

**1. ASEAN**

ASEAN, atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh lima negara pendiri: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, ASEAN telah berkembang menjadi organisasi yang beranggotakan 10 negara, termasuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dengan keanggotaan yang meluas, fungsi esensial ASEAN adalah sebagai platform penting untuk dialog dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu fokus utama ASEAN adalah integrasi ekonomi.

Melalui inisiatif seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang diluncurkan pada tahun 2015, negara-negara anggota berkomitmen untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi.




MEA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dengan mengurangi tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi aliran investasi dan tenaga kerja terampil di antara negara-negara anggota. Dengan langkah-langkah ini, ASEAN berusaha untuk meningkatkan daya saing kawasan di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain aspek ekonomi, ASEAN juga aktif dalam isu-isu politik

dan keamanan. Organisasi ini mengadopsi prinsip non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai dalam hubungannya dengan negara-negara anggotanya.

Melalui panel seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM), negara-negara anggota dapat berdiskusi tentang isu-isu keamanan regional, termasuk terorisme, keamanan maritim, dan perubahan iklim. Pendekatan ini menciptakan stabilitas politik di kawasan dan memperkuat kerjasama dalam mengatasi masalah bersama.

Di bidang sosial dan budaya, ASEAN berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan identitas regional dan memperkuat kerjasama antarbudaya. Program-program seperti Pertukaran Pelajar ASEAN dan Festival Budaya ASEAN dirancang untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat negara-negara anggota. ASEAN berharap dapat membangun solidaritas di antara rakyatnya dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan global lewat interaksi antarbudaya yang dijalin

**2. Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara anggota yang terletak di Eropa. Didirikan dengan tujuan untuk menciptakan integrasi mendalam di antara negara-negara Eropa. UE berawal dari Komunitas Ekonomi Eropa (CEE) yang dibentuk pada tahun 1957.

Seiring berjalannya waktu, UE telah berkembang menjadi entitas yang tidak hanya mengatur perdagangan dan ekonomi, tetapi juga mencakup kebijakan luar negeri, keamanan, dan isu-isu sosial.

Dengan struktur institusi yang kompleks, UE berfungsi sebagai platform bagi negara-negara anggotanya untuk berkolaborasi dalam berbagai bidang demi mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama.

Salah satu pencapaian terbesar Uni Eropa adalah pembentukan pasar tunggal, yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, orang, dan modal di antara negara-negara anggotanya. Melalui penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, pasar tunggal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan.

Selain itu, UE juga memperkenalkan mata uang bersama, Euro, yang digunakan oleh 19 dari 27 negara anggotanya dalam Zona Euro. Penggunaan Euro bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara anggota serta mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar.

Di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan, Uni Eropa berusaha memainkan peran yang lebih signifikan di panggung internasional. Melalui kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (CFSP), UE berkomitmen untuk mengkoordinasikan tindakan luar negeri negara-negara anggotanya dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme, konflik bersenjata, dan perubahan iklim. Selain itu, UE juga terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas global.

Aspek sosial dan budaya juga menjadi fokus penting bagi Uni Eropa. Melalui program-program seperti Erasmus+, UE mendorong pertukaran pelajar dan pengembangan pendidikan di antara negara-negara anggotanya. Program ini tidak hanya meningkatkan mobilitas

pelajar tetapi juga memperkuat identitas Eropa dengan mempromosikan pemahaman antarbudaya.

UE juga berupaya melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan kesetaraan gender di seluruh kawasan melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Boleh dibialng, Uni Eropa mendekati model konfederasi.

**3. CELAC**

Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) adalah sebuah organisasi regional yang didirikan pada tanggal 22 Juni 2011 di Cartagena, Kolombia. CELAC lahir dari transformasi dari Foro de Consulta Política (FCP), forum informal yang didirikan pada tahun 2004 untuk meningkatkan dialog dan kerjasama di antara negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Tujuan utama dari pembentukan CELAC adalah untuk memperkuat integrasi dan kerjasama politik, ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggotanya tanpa melibatkan Amerika Serikat dan Kanada.

CELAC memiliki 33 negara anggota yang mencakup sebagian besar negara di Amerika Latin dan Karibia. Organisasi ini beroperasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan multilateralisme. Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi, CELAC telah menginisiasikan berbagai proyek dan program yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas, investasi, dan infrastruktur di kawasan.

Sebagai contoh, CELAC telah mengembangkan inisiatif seperti Proyecto Integral del Norte Grande Chaco (ProInvertnorte)

yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan sosial di wilayah Amazonas.

Selain aspek ekonomi, CELAC juga berfokus pada isu-isu sosial dan budaya. Organisasi ini telah mengadakan berbagai acara dan seminar internasional untuk mempromosikan dialog antarbudaya dan memperkuat identitas regional. Dalam hal ini, CELAC berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama antar-regional dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan migrasi massal. Melalui program-program seperti Pertukaran Pelajar dan Mahasiswa Antar Regio, CELAC berusaha memperkuat pemahaman dan solidaritas di antara masyarakat negara-negara anggotanya.

**Penutup**

Kerja sama internasional, regional, dan multilateral sangat penting untuk mendukung upaya mencapai kepentingan nasional. Di era globalisasi yang semakin kompleks, negara-negara tidak dapat lagi beroperasi secara isolatif dalam menghadapi tantangan bersama. Kerjasama internasional, regional, dan multilateral menjadi esensi dalam menciptakan stabilitas, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan pembangunan nasional.

Kerjasama internasional seperti PBB, WHO, dan UNESCO, menawarkan platform yang luas untuk negara-negara berinteraksi dan berkolaborasi dalam menghadapi isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, perdamaian global, perubahan iklim, krisis kesehatan, dan sebagainya. Melalui forum-forum internasional ini, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan best practice untuk mengatasi masalah-masalah bersama.

Sama halnya dengan kerjasama regional seperti ASEAN, CELAC, dan

Uni-Afrika, dan lain-lain juga sangat penting dalam memperkuat integrasi ekonomi dan sosial di kawasan masing-masing. Dengan kerjasama regional, negara-negara dapat mengatasi perbedaan tingkat pembangunan dan meningkatkan kesadaran akan identitas regional.

Kerja sama internasional, regional, dan multilateral menjadi kunci dalam mencapai kepentingan nasional. Kolaborasi yang erat dan efektif, akan mampu meningkatkan kapabilitas negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan global dan regional, serta memajukan pembangunan nasional secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk terus meningkatkan partisipasi dan komitmen dalam berbagai bentuk kerjasama internasional, regional, dan multilateral guna mencapai tujuan yang lebih besar bagi kepentingan nasional dan global.



# VIII Partai X




Bagian ini akan menguraikan argumentasi mengapa opsi terbaik perjuangan politik di negara demokrasi harus melalui partai politik, tugas pokok partai, fungsi partai, apa itu Partai X, apa pembeda Partai X dari partai-partai politik yang telah eksis, dan bagaimana pandangan-pandangan unik serta krusial Partai X tentang pentingnya pembedaan secara tegas antara negara dan pemerintah serta pentingnya restrukturasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

**Mengapa Harus Partai Politik?**

Perjuangan politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, dan partai politik memainkan peran sentral dalam proses tersebut. Tanpa partai politik, maka negara sesungguhnya telah menjadi monarki absolut. Meskipun partai politik acap kali mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat, keberadaan partai politik adalah suatu keniscayaan untuk memastikan bahwa suara rakyat terwakili secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Menurut Katz dan Mair (1995), partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, mengorganisir kepentingan publik, dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Tanpa partai politik, proses politik akan menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola, yang pada akhirnya, berpotensi mengarah pada ketidakpuasan masyarakat dan ketidakstabilan politik.

Salah satu alasan mengapa opsi terbaik perjuangan politik adalah melalui partai politik adalah kemampuan partai untuk mengkonsolidasikan berbagai kepentingan dan pandangan dalam satu platform. Partai politik bertindak sebagai wadah bagi individu dengan ideologi dan tujuan yang sama untuk bersatu dan berjuang demi cita-cita yang sama pula.

Dalam konteks ini, Norris (2002) menekankan bahwa partai politik membantu menciptakan identitas kolektif di antara anggotanya, yang sangat penting dalam mobilisasi massa untuk mencapai tujuan politik. Tanpa struktur organisasi yang jelas seperti partai politik, perjuangan untuk transformasi sosial atau memengaruhi kebijakan publik akan kurang efektif.

Sering kali, persepsi masyarakat terhadap partai politik negative karena menganggapnya sebagai entitas yang korup dan tidak transparan. Namun, penting untuk diingat bahwa partai politik juga memiliki tanggungjawab untuk mendidik pemilih tentang isu-isu penting dan memberikan informasi yang relevan.

Sebuah studi oleh Schmitt-Beck (2014) menunjukkan bahwa partai politik dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pemilih, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik saat menghadapi pemilihan umum. Bahkan dengan meningkatkan kesadaran pemilih tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, partai politik dapat berkontribusi pada eskalasi kualitas demokrasi.

Di sisi lain, kritik terhadap partai politik sering kali berakar pada pengalaman individu dengan praktik-praktik buruk dalam sistem politik. Namun, alih-alih meninggalkan atau menolak partai politik, masyarakat sebaiknya berupaya untuk memperbaiki dan mereformasi sistem tersebut dari dalam.

Menurut Blais (2008), reformasi internal dalam partai politik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga memperbaiki citra partai politik dimata publik. Melalui keterlibatan aktif dalam partai politik, masyarakat dapat berkontribusi pada perubahan positif dan memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terwakili.

Sehingga, mau tidak mau, dalam sebuah negara demokrasi, keberadaan partai politik adalah keniscayaan. Meskipun ada persepsi negatif terhadap partai politik yang menciptakan keraguan tentang efektivitasnya dalam perjuangan politik, penting untuk memahami bahwa partai politik adalah alat yang diperlukan untuk mencapai transformasi sosial dan memengaruhi kebijakan publik. Melalui struktur organisasi yang ada, individu dapat lebih mudah terlibat dalam proses demokrasi dan menyuarakan aspirasi mereka.



Oleh karena itu, menghindari partai politik tidak merupakan jalan keluar. Akan lebih baik jika masyarakat berusaha untuk memperkuat peran mereka dalam sistem demokrasi guna mencapai hasil yang lebih baik bagi semua pihak dan mendorong lahirnya partai politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.

**Tugas Pokok Partai**

1. Menyusun kebijakan dan program-program partai yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Beralih bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil selalu berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
3. Bersikap progresif dan visioner dalam menghadapi perubahan zaman, dengan mempertahankan konsistensi terhadap nilai-nilai Pancasila untuk mencapai keadilan sosial.
4. Melaksanakan visi dan misi partai melalui program-program yang terukur, dalam upaya menjaga keadilan sosial, pelestarian lingkungan, kolaborasi antargenerasi, pemerintahan yang efektif, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
5. Mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan, menyederhanakan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**Fungsi Partai**

Sebagai representasi kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai ini mewakili aspirasi rakyat untuk menciptakan keadilan sosial, pelayanan publik yang baik, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Mengemban peran dalam penyelenggaraan Kewenangan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila demi terciptanya keadilan sosial.

2. Menjadi agen perubahan untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum.
3. Memainkan peran aktif dalam memperkuat sistem pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui penerapan teknologi yang berkelanjutan, menyederhanakan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

**Apa itu Partai X?**




George III oleh Edward Burke: 'Partai adalah sekelompok orang yang bersatu untuk memajukan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka berdasarkan beberapa prinsip tertentu yang disetujui oleh mereka semua' (Burke, 1770; 134).

Partai X merupakan partai politik yang fokus pada pendidikan politik, berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang dalam spektrum ideologi politik Indonesia berada di tengah. Partai X mendorong dan mengembangkan pemerintahan yang berbasis pada teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan big data dalam pengambilan kebijakan.

Di masa depan, Partai X meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan big data niscaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Gol akhirnya tentu saja membangun kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan big data dalam proses pengambilan kebijakan, Partai X berkomitmen untuk mendesain kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi negara.

Salah satu prioritas utama Partai X adalah pelayanan publik yang efisien dan transparan dengan menciptakan birokrasi yang sebenar-benarnya berwatak civil servant (pelayan masyarakat). Partai X menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada seberapa baik pelayanan publik diberikan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi, Partai X berupaya untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan transparan.



Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pemerintahan sehingga menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat.

Dengan visi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara, Partai X berkomitmen untuk berperan aktif dalam memperkuat posisi Indonesia, baik di kawasan maupun di kancah internasional. Melalui kebijakan berbasis teknologi dan inovasi, Partai X hendak mewujudkan Indonesia sebagai barometer bagi negara-negara lain di kawasan dalam hal pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa.

Dengan demikian, Partai X tidak hanya fokus pada isu-isu domestik, tetapi juga berupaya membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing dan berkontribusi secara signifikan di tingkat regional maupun global.

**Partai X:**

- Asas Pancasila
- Partai Tengah
- Pemerintahan berbasis teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan big data dalam proses pengambilan kebijakan.
- Birokrasi yang berwatak civil servant (pelayan masyarakat)
- Pelayanan publik mudah diakses, cepat, dan transparan (ngurus apa-apa gampang, hanya lewat aplikasi)
- Indonesia Pemimpin Asia Tenggara

**Apa Keunggulan Partai X dibanding partai-partai yang sudah eksis?**

Partai X memiliki keunggulan yang signifikan dalam pengelolaan dan operasionalnya berkat pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI) dan big data. Kelak akan ditingkatkan dengan implementasi Internet Of Things (loT), prediksi perilaku, dan blockhain. Di era ini, kemampuan untuk

mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Pengaplikasian teknologi informasi akan mempermudah Partai X dapat mengakses data masyarakat dan mengolahnya, mengetahui tren sosial, dan isu-isu yang relevan dengan cepat. Hal ini memungkinkan partai X untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Alhasil, legitimasi dan dukungan publik terhadap program-program yang diusung akan meningkat.

Selain itu, teknologi informasi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara Partai X dan masyarakat. Melalui platform digital, Partai X dapat menyampaikan informasi dan kebijakan dengan lebih efisien, serta menerima umpan balik dari masyarakat secara langsung. Penggunaan media sosial dan aplikasi mobile memungkinkan partai untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan membangun keterlibatan yang lebih aktif.

Dengan model ini, Partai X tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mendengarkan suara rakyat, menciptakan dialog dua arah yang sangat penting dalam demokrasi modern.

Partai X juga mendorong pelayanan publik berbasis digital. Bahkan, Partai X telah mengembangkan platform untuk mendukung program tersebut sehingga dapat menyediakan layanan publik secara lebih efektif, efisien dan transparan. Misalnya, pengembangan aplikasi layanan masyarakat dan sistem pengaduan online yang memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan atau pengurusan administrasi dengan mudah dan cepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan mereka terhadap Partai X sebagai entitas yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Integrasi teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam operasional Partai X menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya Partai X. Dengan analisis data yang canggih, partai dapat mengidentifikasi area-area di mana sumber daya dapat dialokasikan secara lebih tepat guna untuk mencapai hasil yang optimal.

Hal Ini tidak hanya menjdi slogan dalam kampanye politik, tetapi juga dalam implementasi program-program sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kecanggiihan teknologi tidak hanya meningkatkan kinerja Partai X, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

**Keunggulan Partai X:**




- Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kecerdasan buatan, dan Big Data untuk mendukung pengambilan kebijakan
- Mengimplementasikan pemerintahan berbasis digital sebenar-benarnya
- Integrasi data untuk pelayanan publik dalam administrasi kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, dan layanan umum

**Beberapa Pandangan Partai X**

Pengertian atau defisini sebuah konsep dibangun oleh konstruksi pikiran dari orang yang merumuskan definisi tersebut. Sehingga, sulit membayangkan bahwa sebuah definisi lahir dari ruang hampa sejarah dan pemikiran perumusnya. Oleh karena itu, Partai X juga merumuskan pengertian politik secara mandiri seperti di bawah ini:

> *"Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat."*

Selain politik, Partai X juga merumuskan pengertian negara, pemerintah, negarawan, dan sejahtera. Pengertian-pengertian yang dirumuskan Partai X tersebut disajikan di bawah ini:

> *"Negara adalah entitas yang terdiri atas wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat."*

> *"Pemerintah adalah Sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat."*

> *"Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan dengan baik."*

Untuk mengelola sebuah negara, dibutuhkan negarawan, yaitu: orang yang

bijaksana, berwibawa, visioner serta ahli dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Mereka berkomitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dalam merancang kebijakan negara,memastikan agar pengelolaan urusan negara dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

**Visi Partai X**

***"Menuju Indonesia Adil dan Hebat"***

Visi Partai X ialah terwujudnya Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembangunan sehingga tercapai pelayanan negara bagi rakyatnya demi kesejahteraan.

**Misi Partai X**

- Menegakkan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan, untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum
- Berkomitmen pada pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi alam, serta menggalakkan praktik ramah lingkungan dalam segala aspek kehidupan.
- Memastikan transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah serta memperkuat sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik KKN.
- Mendorong kolaborasi antara generasi muda dan tua dalam merumuskan kebijakan serta mengintegrasikan perspektif yang beragam untuk membangun masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan tata kelola pemerintahan melalui teknologi yang

berkelanjutan

**Asas Partai X**

Partai X berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

**Sifat**

Partai X bersifat inklusif, gotong royong, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila untuk keadilan sosial

**Jati diri**

Jati diri Partai X adalah kebangsaan, kerakyatan, akuntabel, dan transparan.

**Tujuan Partai X**

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Menjadi kekuatan yang inklusif, serta mendorong semangat gotong royong dalam upaya mencapai visi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Membentuk identitas partai yang menekankan pada kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam pembangunan bangsa.

**Pandangan Partai X tentang Negara dan Pemerintah**

Partai X memiliki pandangan yang jelas mengenai pentingnya pembedaan yang tegas antara negara dan pemerintah. Dalam konteks ini, negara diilustrasikan sebagai sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga (ayah). Kepala Keluarga menduduki posisi tertinggi sebagai penerima mandat rakyat sebagai kepala negara. Negara berfungsi sebagai entitas yang menciptakan kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi kepentingan

rakyat serta menjaga stabilitas dan keamanan.

Sebagai kepala keluarga, kepala negara bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota masyarakat mendapatkan hak-hak mereka dan bahwa kesejahteraan bersama diupayakan dan dijaga dengan baik. Dengan demikian, negara harus beroperasi secara netral dan inklusif, mewakili kepentingan seluruh rakyat tanpa memihak pada kelompok tertentu.

Di sisi lain, rakyat diilustrasikan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan pemerintah diilustrasikan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). ART dipekerjakan oleh kepala keluarga untuk mengelola urusan domestik dan memastikan kesejahteraan anggota keluarga. Pemerintah berfungsi sebagai eksekutor kebijakan yang ditetapkan oleh negara, bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik.

Dalam peran ini, pemerintah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien, efekstif, dan transparan demi mendapatkan manfaat yang optimal, serta memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan memisahkan fungsi negara dan pemerintah, Partai X meyakini akan tercipta akuntabilitas yang lebih baik sebab pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan kinerjanya dalam melayani rakyat tanpa mengaburkan peran negara sebagai entitas yang lebih besar.

Pembedaan ini juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketika negara dan pemerintah tidak dibedakan dengan tegas, ada risiko bahwa pemerintah berpeluang menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penegasan pospisi negara sebagai pemegang mandat dari rakyat, dan pemerintah adalah pelaksana kebijakan, menunjukkan upaya Partai X dalam

menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Lebih jauh lagi, pemisahan antara negara dan pemerintah juga menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan melalui perwakilan mereka di pemerintahan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik.

Partisipasi aktif ini merupakan bagian dari ikhtiar Partai X untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, Partai X berharap dapat menciptakan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.



Secara keseluruhan, pandangan Partai X tentang pembedaan antara negara dan pemerintah mencerminkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik. Masing-masing entitas menjalankan perannya secara jelas dan tegas dalam struktur pemerintahan, sehingga tercipta sistem yang lebih adil, transparan, dan melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Melalui pendekatan ini, Partai X tidak hanya ingin memperkuat legitimasi pemerintah tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sebagai pengayom bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Pembedaan Negara dan Pemerintah:**

**Negara**

- Negara berfungsi sebagai entitas yang menciptakan kerangka hukum dan kebijakan untuk melindungi kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas dan keamanan.
- Negara harus beroperasi secara netral dan inklusif, mewakili kepentingan seluruh rakyat tanpa memihak pada kelompok tertentu.
- Kepala Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan hak-hak mereka, mengupayakan kesejahteraan bersama dan menjaga kesinambungannya.

**Pemerintah**

Pemerintah berfungsi sebagai eksekutor kebijakan yang ditetapkan oleh negara, bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik.

**Pandangan Partai X tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Partai X memiliki pandangan yang unik mengenai peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pandangan Partai X, MPR merupakan kristalisasi dari rakyat, yang

mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Maka, MPR semestinya berfungsi sebagai wujud dari negara yang hidup, yang setiap keputusan dan kebijakan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partai X berpandangan bahwa MPR semestinya dikembalikan posisinya sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Oleh karena itu, Partai X berpendapat bahwa anggota MPR semestinya tidak diisi oleh para politisi dari partai politik, melainkan oleh negarawan yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini, Partai X menekankan pentingnya netralitas dan inklusivitas dalam keanggotaan MPR. Negara harus beroperasi secara netral dan inklusif agar dapat melayani seluruh rakyat tanpa memihak pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, anggota MPR idealnya terdiri dari orang-orang yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti yang saat ini sudah ada yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, ditambah dengan utusan Majelis Kerajaan Nusantara sebagai pemilik tanah air pra-kolonial, serta perwakilan dari berbagai profesi yang mencerminkan mayoritas profesi rakyat. Sementara anggota DPR, sebaiknya dikeluarkan dari MPR sebab anggota DPR umumnya diisi oleh partai politik yang watak dasarnya adalah partisan, meskipun pada kadar yang berbeda.

Pendekatan ini akan memastikan bahwa MPR tidak hanya menjadi ajang bagi kepentingan politik sempit, tetapi benar-benar menjadi representasi dari keberagaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia.

Partai X meyakini bahwa dengan menempatkan individu-individu yang memiliki latar belakang dan pengalaman beragam, lembaga ini dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan penentu arah

kebijakan nasional. Negarawan yang duduk di MPR akan lebih mampu berpikir jangka panjang dan mengambil keputusan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan lebih terjaga dan dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.

Lebih jauh lagi, dengan melibatkan utusan dari Majelis Kerajaan Nusantara dan berbagai profesi dan golongan-golongan lain dalam masyarakat, Partai X berharap dapat mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, MPR dapat menjadi wadah bagi dialog konstruktif antara berbagai elemen masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Secara keseluruhan, pandangan Partai X tentang MPR mencerminkan komitmen Partai X untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berorientasi pada rakyat. Melalui penegasan pentingnya keanggotaan yang netral dan inklusif, Partai X berupaya untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam setiap langkah kebijakan yang diambil oleh negara. Reformasi struktural dalam keanggotaan MPR, diyakini dapat mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

**Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Representasi Filosofis dalam Kehidupan Bernegara**

- Dalam konsep filosofi Jawa, menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan alam, serta manusia dan Sang Pencipta.
- Dalam konteks bernegara, *"Sedulur Papat Lima Pancer"* bisa dimaknai sebagai perlunya keseimbangan antara berbagai unsur masyarakat, dengan rakyat sebagai pusat utama *(pancer)* yang menjadi sumber kekuasaan dan orientasi arah pembangunan negara.

- Dengan semangat ini, struktur keanggotaan MPR idealnya dibentuk berdasarkan keseimbangan empat unsur penjaga tersebut, dengan rakyat sebagai pusat sumber mandat. Maka struktur MPR bukan hanya representatif secara politik, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai budaya dan spiritualitas Nusantara.

Konsep ini mengajarkan harmoni dan keselarasan sebagai fondasi kehidupan baik pribadi, sosial, maupun bernegara yang terdiri atas:

**1. Kaum Intelektual *(Otak)***

Sebagai pusat nalar dan kebijaksanaan, kaum intelektual berperan dalam memberi arah, membentuk visi kebangsaan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan ilmu. Mereka adalah guru, dosen, insinyur, advokat, hingga profesional teknologi sebagai unsur vital yang menjadi pencerdas kehidupan bangsa.

**2. Kaum Agama & Spiritualitas (Hati)**

Berfungsi sebagai penuntun moral dan etika, kelompok ini menjaga nilai-nilai luhur, spiritualitas, dan akhlak publik. Tokoh agama, rohaniawan, tenaga kesehatan yang berdedikasi, serta perwakilan kerajaan yang mengemban nilai spiritual adalah penjaga keseimbangan batin bangsa.

**3. TNI - Polri *(Tulang)***

Mereka menjadi kerangka yang menopang tegaknya negara, menjamin keamanan, kedaulatan, dan keutuhan. TNI dan Polri adalah garda pertahanan sekaligus simbol ketegasan dalam menjaga konsensus kebangsaan.

**4. Kaum Budaya & Adat Istiadat *(Darah & Daging)***

Inilah unsur yang menghidupkan, mewarnai, dan mewariskan kepribadian bangsa. Para seniman, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM lokal, hingga perwakilan etnis dan kerajaan menjadi ekspresi nyata keragaman dan kekayaan budaya Indonesia.

Semua unsur diatas bermuara pada Rakyat. Mereka adalah jiwa bangsa dan pemilik kedaulatan tertinggi. Dalam konteks keanggotaan MPR, rakyat

terwakili melalui berbagai jalur, baik melalui perwakilan daerah, kelompok profesi, adat, hingga kaum marjinal yang bersama-sama membentuk kesadaran kolektif dan arah masa depan bangsa.

**Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

| Kelompok Representasi | Jumlah Kursi | Rasionalisasi |
|---|---|---|
| **Utusan Daerah (Provinsi)** | **31** | 1 orang per provinsi/ gabungan provinsi di Indonesia. |
| **Kerajaan Nusantara** | **7** | Diambil dari kerajaan aktif dan diakui secara budaya/ historis. |
| **Kelompok Etnis** | **10** | Mewakili kelompok suku besar (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dll). |
| **TNI (AD, AL, AU)** | **9** | 3 per matra (Angkatan Darat, Laut, Udara). |
| **Polri** | **5** | Mewakili wilayah besar atau direktorat utama. |
| **Kelompok Profesi** | **37** | |
| • Guru & Dosen | 5 | |
| • Petani & Nelayan | 3 | |
| • Buruh & Pekerja Industri | 4 | |
| • Pengusaha & UMKM | 4 | |

| Kelompok Representasi | Jumlah Kursi | Rasionalisasi |
|---|---|---|
| • Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Bidan) | 3 | |
| • Insinyur & Teknokrat | 2 | |
| • Tokoh Agama & Rohaniawan | 7 | |
| • Seniman & Budayawan | 2 | |
| • Jurnalis & Media | 2 | |
| • Advokat & Ahli Hukum | 2 | |
| • Profesional TI/ Teknologi | 3 | |
| ***TOTAL = 99 KURSI*** | | |

**Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Implementasi *"Empat Penjaga Negara dan Satu Pusat Kedaulatan***

| Kelompok Representasi | Jumlah Kursi | Rasionalisasi |
|---|---|---|
| **KAUM INTELEKTUAL *(OTAK)* = 26 KURSI** | | |
| Guru & Dosen | 5 | |
| Insinyur & Teknokrat | 2 | |
| Profesional TI/ Teknologi | 3 | |
| Advokat & Ahli Hukum | 2 | |
| Jurnalis & Media | 2 | |
| Utusan Daerah | 5 | |
| Kelompok Profesi Lain | 7 | Misalnya pengusaha modern, UMKM berwawasan riset, dll. |
| **KAUM AGAMA & SPIRITUALITAS *(HATI)* = 12 KURSI** | | |
| Tokoh Agama & Rohaniawan | 7 | Perwakilan masing-masing agama dan kepercayaan 1 orang. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia 2 orang, yaitu 1 orang dari kalangan Ormas Islam Muhammadiyah dan 1 orang dari kalangan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU). |

| Kelompok Representasi | Jumlah Kursi | Rasionalisasi |
|---|---|---|
| Perwakilan kerajaan yang aktif secara spiritual | 3 | Dari 7 kerajaan diasumsikan 3 kursi diantaranya. |
| Tenaga Kesehatan | 2 | Sebagai etika pengabdian dan nilai kemanusiaan. |
| **TNI - POLRI *(TULANG) = 14 KURSI*** | | |
| TNI | 9 | 3 per matra (Angkatan Darat, Laut, Udara). |
| Polri | 5 | Mewakili wilayah besar atau direktorat utama. |
| **KAUM BUDAYA & ADAT ISTIADAT *(DARAH & DAGING) = 47 KURSI*** | | |
| Utusan Daerah | 26 | Dari total 31 dikurangi 5 yang masuk di Kaum Intelektual. |
| Kerajaan Nusantara | 4 | Dari total 7, dikurangi 3 yang masuk di Kaum Agama & Spiritualitas. |
| Kelompok Etnis | 10 | Mewakili kelompok suku besar (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dll). |
| Seniman & Budayawan | 2 | |
| Petani & Nelayan | 3 | |
| Buruh & Pekerja Industri | 4 | |
| Pengusaha & UMKM | 2 | Berbasis tradisional/ lokal |

## Arti Lambang Partai




**Perisai**

Mencerminkan komitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas politik

**Bintang**

Diartikan Sebagai tekad partai untuk mencapai prestasi tinggi dan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya

**Simbol X**

Mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan di semua lapisan masyarakat

**Daun**

Daun mencerminkan komitmen partai terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, serta upaya untuk membangun kebijakan yang mendukung teknologi.

**Elemen Digital**

Elemen digital dapat mencerminkan niat partai untuk menggunakan teknologi terbaru dalam merumuskan kebijakan dan solusi untuk isu - isu masyarakat

**Warna Merah**

Merah juga dapat melambangkan semangat dan semarak. Merah dapat memberikan kesan yang hidup dan dinamis, mencerminkan semangat perjuangan dan maraknya aktivitas politik.

**Pita**

Penggunaan Pita dalam logo mencerminkan komitmen partai untuk membawa bersama masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan dalam satu kesatuan yang kuat.

**SATU BANGSA SATU KEMAKMURAN**

Slogan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui dan menghormati keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

## Filosofi Arti Maskot




Terwujudnya Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam pembangunan sehingga tercapai pelayanan negara bagi rakyatnya demi kesejahteraan.

**Nama Maskot: Mr. X**

- *Kesetaraan dan Keragaman*, simbol "X" sering digunakan untuk melambangkan kesetaraan atau perkumpulan elemen-elemen yang berbeda. Dalam hal ini, "X" dapat menggambarkan keragaman budaya, suku, atau latar belakang yang berbeda-beda namun bersatu dalam satu identitas.
- *Teknologi dan Inovasi*, "X" dalam teknologi, terkadang dikaitkan dengan eksperimen, variabel yang tidak dikenal, atau pencarian hal baru. Selain itu, "X" bisa menggambarkan inovasi pencarian, keberanian untuk menjelajahi yang belum diketahui, atau fokus pada penemuan-penemuan baru.
- *Kombinasi atau Persilangan*, "X" juga dapat diartikan sebagai tempat persilangan atau perpaduan antara dua hal yang berbeda. Simbol "X" merujuk pada pertemuan antara nilai-nilai Indonesia dengan kemajuan teknologi yang modern.

**Peci**

- *Kesederhanaan*, peci sering kali diasosiasikan dengan kesederhanaan. Logo atau maskot yang menggambarkan peci bisa mencerminkan nilai-

nilai ini, mungkin dengan desain yang bersih dan sederhana namun kuat dalam pesannya.

- *Kearifan Lokal*, peci juga mewakili kearifan lokal dan tradisi yang kuat. Memasukkan elemen-elemen tradisional atau motif lokal ke dalam desain dapat memperkuat identitas tersebut.
- *Simbol Kesatuan dan Persatuan*, Bung Karno memaknai peci sebagai simbol perlawanan kepada penjajahan kolonialis dan imperialis pada masa itu. Secara sosiologis, Bung Karno dinilai sebagai seorang pemimpin revolusi yang benar-benar merakyat serta tulus untuk perjuangan rakyat Indonesia, simbol untuk mempersatukan rakyat melawan penjajah, serta menggambarkan tidak adanya kesenjangan antara pemimpin revolusi dan rakyatnya.
- *Spiritualitas dan Kedalaman*, dalam beberapa budaya di Indonesia, peci juga memiliki makna spiritual. Desain yang menggabungkan unsur-unsur spiritual atau filosofis dapat memberikan dimensi yang lebih dalam.
- *Identitas Nasionalisme*, peci seringkali dimaknai sebagai tokoh yang memiliki ekspresi yang kuat, menampilkan karakter yang ramah, bijaksana, atau bersemangat, sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.

**Pakaian Warna Merah Putih**

- *Makna Historis*, Warna merah melambangkan keberanian dan semangat para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Warna putih melambangkan kesucian dan perdamaian yang diinginkan bangsa Indonesia setelah meraih kemerdekaan.
- *Makna Budaya*, Di Indonesia, warna merah sering diperkuat dengan keberanian, semangat, dan kekuatan. Putih, sementara itu, sering kali diasosiasikan dengan kesucian, kedamaian, dan kejujuran.
- *Makna Filosofis*, Bendera Merah Putih juga sering diinterpretasikan dalam konteks Pancasila. Merah dapat menggambarkan semangat dan tekad untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila, sedangkan putih melambangkan kesucian dan perdamaian yang diharapkan dalam

menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

- *Kesatuan Nasional*, kombinasi merah dan putih juga mewakili kesatuan dalam keragaman, yang merupakan nilai yang sangat tinggi dalam masyarakat Indonesia yang beragam budaya dan suku.

**Warna Merah**

- *Semangat dan Kebanggaan*, merah sering diidentifikasi dengan semangat, keberanian, dan kebanggaan. Warna ini melambangkan semangat juang, semangat untuk maju, serta kebanggaan akan identitas dan warisan bangsa.
- *Keberanian dan Kekuatan*, merah pun dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, dan kegigihan. Makna ini menggambarkan semangat para pahlawan maupun tokoh-tokoh saat ini yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan.
- *Pengorbanan Darah*, merah juga mewakili pengorbanan dan semangat juang para pahlawan yang telah mendorong lahirnya kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan makna sejarah Bendera Merah Putih, melambangkan darah pejuang yang dicurahkan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di era sekarang ini, pengorbanan bukan lagi melawan penjajah, melainkan menenetang koruptor dan sejenisnya.
- *Kedaulatan dan Kemerdekaan*, warna merah digambarkan sebagai lambang kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta keberanian dalam menghadapi tantangan untuk menjaga kedaulatan tersebut.

**Kemeja Putih**

- *Kesucian dan Kesederhanaan*, warna putih sering dikaitkan dengan kesucian, kebersihan, dan ketidaknyamanan. Penggunaan kemeja putih bisa mencerminkan kesan profesionalisme yang bersih dan teratur.
- *Netralitas dan Kesetaraan*, warna putih juga sering dihubungkan dengan netralitas dan kesetaraan. Penggunaan kemeja putih dalam berbagai konteks dapat menunjukkan kesan netral dan tanpa prasangka.

**Dasi Hitam**

- *Keseriusan dan Profesionalisme*, dasi hitam sering dihubungkan dengan kesan serius, formalitas, dan profesionalisme. Penggunaannya dalam maskot bisa dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan dalam suatu organisasi atau entitas yang representasinya.
- *Keteraturan dan Ketegasan*, warna hitam sering diasosiasikan dengan ketegasan, kekuatan, dan keteraturan.

**Telinga Lebar**

- *Keterbukaan terhadap Suara Rakyat*, telinga lebar menggambarkan sikap terbuka untuk mendengarkan dan memperhatikan suara, keluhan, atau aspirasi rakyat secara menyeluruh dan efektif.
- *Sikap Empati dan Perhatian*, simbol ini mencerminkan sikap empati dan perhatian terhadap berbagai keluh kesah atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan serius.
- *Komunikasi yang Responsif*, telinga lebar juga bisa diartikan sebagai simbol komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan atau keinginan rakyat, menekankan pentingnya merespons secara tepat keluhan-keluhan dan aspirasi-aspirasi yang diungkapkan oleh masyarakat.

**Elemen Kata**

- *Jujur*, merujuk pada integritas dan kejujuran dalam perilaku dan komunikasi. Orang yang jujur akan selalu berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta.
- *Tenanan*, tenanan dalam Bahasa Indonesia berarti meyakinkan, yang merujuk pada kemampuan orang lain untuk membuat seseorang yakin dengan berbagai cara, baik melalui ajakan persuasif hingga mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
- *Transparan*, menggambarkan keterbukaan dan kejelasan. Orang atau

entitas yang transparan tidak menyembunyikan informasi penting dan berkomunikasi secara jelas, memungkinkan orang lain untuk memahami dengan baik apa yang sedang terjadi.

- *Komunikatif*, merujuk pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Orang yang komunikatif bisa mengekspresikan ide, pemikiran, atau pesan mereka dengan jelas dan efektif kepada orang lain.
- *Cerdas*, menunjukkan kecerdasan atau kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Orang yang cerdas biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan memahami situasi dengan cepat.



# PROFIL PENULIS

**Prayogi R. Saputra** adalah penulis, akademisi, dan aktivis budaya yang dikenal melalui karya-karyanya tentang spiritualitas, sosial, dan kebudayaan. Lahir di Takeran, Magetan, dari keluarga guru, ia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (S1 Hubungan Internasional), Universitas Jember (Magister Manajemen), dan kini tengah menyelesaikan studi doktoral di Sultan Abdul Halim Muadzam Shah International Islamic University, Malaysia. Ia berkarier sebagai dosen di Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, sekaligus menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Fiscus Watch (IFW), serta Direktur Sekolah Negarawan. Beberapa karyanya antara lain *Spiritual Journey Emha* (Kompas, 2012) serta buku kolaboratif *Suluh Nilai-Nilai Juang KH. Mahmud Zubaidi*. Selain itu, ia mendirikan Bermalam.net untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan menginisiasi sejumlah Rumah Tahfidz Daarul Qur'an.

Dalam pemikiran kenegaraan, ia konsisten mendorong pemaknaan kembali konsep republik, bahwa negara sejatinya adalah milik rakyat dan harus dikelola untuk kemakmurat rakyat. Ia menegaskan perbedaan antara negara dan pemerintah, di mana pemerintah hanyalah salah satu unsur negara selain rakyat, wilayah, konstitusi, dan kedaulatan. Penulis juga mengkampanyekan transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, Big Data, analisis perilaku, hingga blockchain, gagasan yang turut ia aktualisasikan dalam gerakan sosial-politik melalui Partai X.



**Prayogi R. Saputra**

**Rinto Setiyawan** adalah seorang profesional dengan latar belakang Teknik Elektronika kelahiran Kota Malang yang telah berkarya lebih dari dua dekade di bidang teknologi. Mengemban amanah sebagai Founder di beberapa perusahaan besar teknologi membuat Rinto Setiyawan akrab dengan aktivitas-aktivitas strategis. Dalam perannya, Rinto banyak berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi, infrastruktur digital, transformasi digital, hingga pembangunan kota cerdas di Indonesia.

Selain kiprahnya di dunia teknologi, penulis juga aktif dalam bidang sosial dan politik. Saat ini penulis juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai X, sekaligus Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), serta Wakil Direktur dari Sekolah Negarawan. Melalui IWPI, ia mendorong efisiensi dan transparansi perpajakan dengan pendekatan teknologi, guna menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai penulis, Rinto telah menerbitkan buku *Kota (Beneran) Pintar (2023)* yang membahas konsep smart city dengan perspektif praktis dan aplikatif. Karya tersebut mempertegas komitmennya dalam memadukan teknologi, tata kelola, dan keberlanjutan untuk mendorong kemajuan Indonesia. Dengan pengalaman lintas sektor dan visi yang luas, Rinto terus menghadirkan gagasan serta karya yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.



## Rinto Setiyawan

**Henry Karya Nugraha** atau yang lebih akrab disapa Erick Karya ini merupakan mantan karyawan BUMN Perkebunan yang fokus pada solusi terapan teknologi informasi sejak awal kariernya.

Lelaki berkacamata ini menempuh pendidikan S-1 Sistem Informatika dan seakan terlahir untuk mencuri perhatian. Kala itu berbagai media cetak bertaraf nasional mengulasnya karena tugas akhir yang *nyeleneh* tetapi efektif dapat digunakan, yaitu *software* simulator efek gitar yang mampu bekerja di komputer *personal low cost* sekalipun.

Setelah melepas status karyawan BUMN di tahun 2017, penulis mendirikan startup Matakota, sebuah platform forum masyarakat yang menghubungkan publik dengan pemerintah, hingga membawa namanya bersama tim ke Silicon Valley untuk inkubasi internasional. Kiprahnya terus berkembang dengan mendirikan PT Enygma Solusi Negeri, serta saat ini ia juga dipercaya sebagai Eksekutif X (Ketua Umum Partai X) yang berkomitmen mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital.

Sebagai penulis, Erick juga turut serta dalam menerbitkan buku *Kota (Beneran) Pintar (2023)*, yang membahas konsep smart city secara praktis dan aplikatif. Dengan rekam jejak kepemimpinan, inovasi, dan dedikasi terhadap pembangunan berkelanjutan, Erick Karya dikenal sebagai sosok yang konsisten menghadirkan gagasan segar dan solusi nyata bagi Indonesia yang lebih adil dan maju.



## Henry Karya Nugraha

Buku *Pengantar Politik Kenegaraan* ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar dan menyeluruh tentang konsep-konsep fundamental dalam studi politik, khususnya mengenai hubungan antara negara, kekuasaan, dan warga negara. Ditulis dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini menjembatani kebutuhan kalangan umum—baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat luas—untuk memahami bagaimana sistem kenegaraan bekerja dalam bingkai teori dan praktik.

Di dalamnya, pembaca akan diperkenalkan pada pengertian negara sebagai entitas politik yang memiliki kekuasaan mengatur kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Buku ini mengurai karakteristik negara modern, elemen-elemen yang menyusunnya, serta fungsi-fungsi vital negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembahasan juga mencakup asal-usul terbentuknya negara, baik dari pendekatan teoritik klasik (seperti teori kekuasaan, teokrasi, dan kontrak sosial) maupun dari pendekatan historis dan empiris.

Hubungan antara negara dan warga negara dikaji melalui aspek hak, kewajiban, serta keterlibatan politik. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, disalurkan, dan diawasi dalam sistem pemerintahan demokratis, serta bagaimana partisipasi politik menjadi salah satu pilar legitimasi kekuasaan negara.

Sebagai pengantar, buku ini menjadi pijakan awal yang kokoh untuk menjelajahi dunia politik kenegaraan, sekaligus memupuk kesadaran kritis warga negara dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara.

PenerbitX
Email: info@penerbitx.id

